



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan H. Kolonel Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212 Telepon (0552) 21567
Faximile (0552) 22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website www.kaltaraprov.go.id

PENGUMUMAN NOMOR : 800.1.2.8/5409/BKD/SETDA

TENTANG MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) DENGAN CAT UNTUK SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024

Merujuk pada Surat Sekretaris Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024 Tanggal 04 November 2024 Tentang Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan mengikuti seleksi tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan jadwal pada pengumuman sebelumnya, **WAJIB MEMBACA DAN MEMPEDOMANI PENGUMUMAN INI;**
2. Kelalaian peserta dalam **MEMBACA DAN MEMAHAMI PENGUMUMAN** menjadi **TANGGUNG JAWAB PESERTA;**
3. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA;**
4. Apabila ada **OKNUM** yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), kemudian meminta sejumlah biaya yang diakui untuk digunakan dalam proses seleksi, diharapkan untuk **SEGERA MELAPORKAN** kepada Panitia Seleksi ataupun **Sekretariat Seleksi CASN Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara;**
5. Keputusan dalam Pengumuman ini bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;

6. Apabila ada perubahan jadwal dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui website <https://kaltaraprov.go.id> dan Website SSCASN Tahun 2024 <https://sscasn.bkn.go.id>;
7. Dalam rangka memberikan layanan kepada pelamar ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024, maka pelamar dapat menghubungi pada **Sekretariat Seleksi CASN Tahun 2024 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.**

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada Tanggal 14 November 2024

SEKRETARIS DAERAH,

Selaku,

Ketua Panselda Seleksi Pengadaan
CASN Pemprov. Kaltara T.A 2024



Dr. H. SURIANSYAH, M. AP

Pembina Utama, IV/e.

NIP. 196502011991031009



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/5457/M.SM.01.00/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan
CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran
2024

04 November 2024

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah
di
Tempat

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersih, kompeten, dan melayani, maka setiap PNS wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, tahap seleksi pengadaan PNS setelah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian Materi Pokok Soal SKB agar para peserta seleksi CPNS TA. 2024 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan Materi Pokok Soal SKB dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan untuk jabatan pelaksana yang disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana. Untuk selanjutnya, Materi Pokok Soal SKB tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**A.N MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,
PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan

1. Menteri PANRB;
2. Kepala BKN.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

DAFTAR MATERI POKOK SOAL SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CPNS 2024

NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
1	Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama	Pengetahuan Umum:
		1 Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar
		2 Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
		3 Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
		Pengetahuan Khusus:
		1 Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
		2 Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
		3 Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Administrator Database
2	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Peraturan-Peraturan mengenai Kepegawaian dan Jabatan fungsional
		2 Peraturan-peraturan Bidang Kesehatan
		3 Kebijakan-Kebijakan Bidang Kesehatan
		4 Tata Kelola Bidang Kesehatan
		5 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan
		6 Jabatan Fungsional Adminkes
		Kemampuan Khusus:
		1 Pelayanan Administrasi Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan
		2 Analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan
		3 Perizinan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Pemberi Jasa Kesehatan
		4 Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		5 Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan
3	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Penyusunan kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
		2 Advokasi kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif
		Kemampuan Khusus:
		1 Tata kelola kerja sama dan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif
		2 Tata kelola pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif
		3 Tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata dan ekonomi kreatif
		4 Tata kelola pendanaan pariwisata dan ekonomi kreatif
		5 Tata kelola pembangunan industri serta hak kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
		6 Tata kelola penguatan ekonomi kreatif serta pengembangan ekonomi digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
4	Analisis Akuakultur Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Pedoman tentang pembudidayaan ikan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya
		2 Pengelolaan dan pengembangan pembenihan ikan air tawar, air payau, dan laut
		3 Identifikasi, inventarisasi dan analisis data proses produksi dan sertifikasi bidang perikanan budidaya
		4 Identifikasi, inventarisasi, dan analisis data pakan ikan
5	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Perindungan Pelaku Utama sektor Kelautan dan Perikanan dan Usaha Perikanan
		6 Pengelolaan Usaha Perikanan budidaya
		Kemampuan Umum:
		UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
		Kemampuan Khusus:
		1 Nota Keuangan R-APBN TA 2024
		2 UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024
6	Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama	3 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
		4 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
		5 PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
		Kompetensi Umum:
		1 Pengenalan ilmu data dalam Analisis Data Ilmiah
		2 Penelusuran dan pengelolaan data dan informasi ilmiah
		3 Rancangan kerja Analisis Data Ilmiah
7	Analisis Hukum Ahli Pertama	Kompetensi Khusus:
		1 Pengumpulan dan persiapan data
		2 Manajemen data
		3 Basis data
		4 Data mining
		5 Analisis dan interpretasi data
		Kemampuan Umum:
		1 Hukum Pidana
		2 Hukum Perdata
		3 Hukum Acara

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Hukum Tata Negara
		5 Hukum Internasional
		6 Hukum Administrasi Negara
		7 Hukum Umum
		Kemampuan Khusus:
		1 Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan
		2 Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan tugas dan fungsi instansi Pemerintah
		3 Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah
		4 Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
		5 Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan
8	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama	6 Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternatif penyelesaian sengketa
		1 Identifikasi data dan informasi penyelidikan dan rekomendasi tindakan bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI) dan bea masuk tindakan pengamanan perdagangan (BMTP), melakukan validasi administratif, dan membuat pemberitahuan publik terkait pelaksanaan penyelidikan tindakan anti dumping, anti subsidi dan pengamanan perdagangan
		2 Analisis data dan informasi dokumen inisiasi/petisi penyelidikan dalam kerangka penanganan tuduhan dumping/subsidi/safeguard dari otoritas negara mitra dagang dan menyajikan bahan serta menyusun laporan berkala perkembangan masalah hambatan perdagangan
		3 Analisis dan penyusunan bahan terkait pelaksanaan penanganan sengketa perdagangan internasional
		4 Penyiapan bahan terkait isu yang relevan dengan penguasaan substansi bidang perdagangan di kawasan atau negara mitra dagang
		5 Analisis terhadap permasalahan, dokumen-dokumen perjanjian, dan bukti dukung pelaksanaan perjanjian internasional
9	Analisis Kebakaran Ahli Pertama	6 Advokasi kebijakan dan monitoring dan evaluasi hasil advokasi
		Kompetensi Umum:
		1 Pembagian wewenang penyelenggaraan sub urusan kebakaran berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 dan Permendagri No 16 Tahun 2020, PP No 16 Tahun 2021, dan Permen PU No 25 Tahun 2008, dan Permen PU No 26 Tahun 2008
		2 Teori Segitiga Api
		3 Sarana Prasarana Pemeriksaan Gedung dan Kebutuhan Perlengkapan dalam pelaksanaan penyuluhan
		Kompetensi Khusus:
		1 Sistem Pipa Tegak
		2 Sistem Sprinkler Otomatis
		3 Pompa Pemadam Kebakaran
		4 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
		5 Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran
		6 Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap
		7 Pasangan Konstruksi Tahan Api
		8 Partisi Penghalang Asap
		9 Bahan Pelapis Interior
		10 Sarana Jalan Keluar
		11 Pencahayaan Darurat
		12 Teknik Dasar Penyuluhan
10	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Konsep Dasar Penanggulangan Bencana
		Kemampuan Khusus:
		1 Kesiapsiagaan Bencana
		2 Mitigasi Bencana
		3 Peringatan Dini Bencana
		4 Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan, kerugian, dan sumber daya
		5 Langkah dan tata cara dalam pelaksanaan kaji cepat
		6 Pengkajian informasi awal dalam kaji cepat
		7 Metode dan pengolahan data kaji cepat
		8 Penentuan status keadaan darurat bencana
		9 Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana
		10 Analisis penanganan korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
		11 Analisis kebutuhan dasar korban dan pengungsi saat status tanggap darurat
		12 Rencana operasi penanganan darurat
		13 Pengendalian operasi/komando penanganan
		14 Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
		15 Pemenuhan kebutuhan dasar
		16 Perlindungan terhadap kelompok rentan
		17 Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
		18 Fasilitas penanganan korban dan pengungsi bencana
		19 Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
		20 Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana
		21 Pemulihan dan peningkatan sosial, ekonomi dan sumber daya alam pasca bencana

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		22 Pengelolaan logistik dan peralatan kebencanaan
		23 Optimasi jaringan logistik dan peralatan kebencanaan
		24 Pengurangan risiko bencana
11	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Kemampuan Analisis:
		1 Konsep dan Studi Kebijakan Publik
		2 Manajemen Kebijakan Publik
		3 Metodologi Riset Kebijakan
		4 Analisis Kebijakan Publik
		5 Dokumentasi Saran Kebijakan
		Kemampuan Politis:
		1 Publikasi Saran Kebijakan
		2 Komunikasi dan Konsultasi Kebijakan
		3 Pemetaan Stakeholder dan Advokasi Kebijakan Publik
12	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Teori dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Kekayaan Intelektual
		Kemampuan Khusus:
		1 Prosedur permohonan kekayaan intelektual
		2 Penegakan hukum kekayaan intelektual
13	Analisis Kerja Sama Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2023 tentang JF Analisis Kerja Sama
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing
		2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
		4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
		5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri
14	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	1 Ketersediaan pangan
		2 Stabilisasi pasokan dan harga pangan
		3 Distribusi dan cadangan pangan
		4 Pengendalian kerawanan pangan
		5 Sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi (SKPG)
		6 Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi
		7 Penganekaragaman konsumsi pangan
		8 Perumusan standar keamanan dan mutu pangan
		9 Pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan
15	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Pengantar Akuntansi Pemerintah
		2 Pengantar Statistik
		3 Pengantar Ilmu Ekonomi
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
		2 Desentralisasi Fiskal: Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
		3 Hukum Administrasi Keuangan Negara
16	Analisis Legislatif Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Konsep pembagian kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
		2 Konsep sistem pembentukan peraturan perundang-undangan
		Kompetensi Khusus:
		1 UU MD3
		2 Peraturan Presiden tentang Setjen DPR RI
		3 Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2022
		4 Konsep dasar, teknik dan metode analisis
		5 Konsep analisis deskriptif
		6 Konsep dasar, teknik, dan metode asistensi dalam melakukan asistensi keahlian untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga legislatif
		7 Konsep dan teknik pemaparan hasil analisis
17	Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
		2 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
		3 Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri
18	Analisis Pasar Hasil Perikanan Terampil	4 Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
		5 Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan
		6 Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
		Kemampuan Umum:
		Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan
		2 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
		3 Peningkatan Akses Pasar Luar Negeri
		4 Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan
		5 Pemetaan Potensi usaha dan Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
19	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama	6 Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
		Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan terkait Analisis Pasar Hasil Pertanian
		2 Pengetahuan umum tentang pertanian dan ekonomi pertanian
		3 Akses informasi dan teknologi, akses kelembagaan keuangan, alat mesin pertanian, sarana produksi
		4 Pengetahuan tentang organisasi, kerjasama dan perdagangan Internasional
		Kompetensi Khusus:
		1 Ekonomi pertanian aspek produksi atau usahatani
		2 Ekonomi pertanian aspek pasar dan pemasaran
		3 Penyebarluasan informasi pasar
20	Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan terkait Analisis Pasar Hasil Pertanian
		2 Pengetahuan umum tentang pertanian dan ekonomi pertanian
		Kompetensi Khusus:
		1 Ekonomi pertanian aspek produksi atau usahatani
		2 Ekonomi pertanian aspek pasar dan pemasaran
		3 Metodologi analisis pasar hasil pertanian
21	Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Perencanaan Iptek
		2 Pemanfaatan Iptek
		3 Manajemen Kekayaan Intelektual
		4 Alih Teknologi
		Kompetensi Khusus:
		1 Intermediasi Iptek
22	Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama	2 Difusi Iptek
		3 Komersialisasi Teknologi
		Kemampuan Umum:
		1 Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 (Lembaga Tinggi Negara), UU Pemerintahan Daerah, UU Pemilihan Umum, UU Pemilihan Kepala Daerah, dan UU Mahkamah Konstitusi
		2 Kelembagaan DPR dan DPD
		3 UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juncto PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 17 Tahun 2020
		Kemampuan Khusus:
		1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD juncto Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPD RI
		2 Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2020, dan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang
23	Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Perencanaan Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		2 Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		3 Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		4 Advokasi Kebijakan Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		Kompetensi Khusus:
		1 Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		2 Diseminasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		3 Penyelenggaraan Program Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi, Sosialisasi, Kampanye Antikorupsi, dan pembinaan peran serta masyarakat
		4 Fasilitas Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK
24	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Penyelenggaraan KPBU
		2 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Perumahan
		Kompetensi Khusus:
		1 Perencanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
		2 Penyiapan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
		3 Pelaksanaan dan/atau transaksi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
		4 Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
25	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Keuangan Negara
		2 Perbendaharaan Negara
		3 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
		2 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran
		3 Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
		4 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
		5 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
26	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	6 Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		1 Kebijakan tentang Pengembangan Kompetensi ASN
		2 Manajemen ASN
		3 Manajemen Kinerja
		4 Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
		5 Standar Kompetensi Jabatan ASN
		6 Pengembangan Kompetensi Non Klasikal
		7 ASN Corporate University (Corpu)
		8 Manajemen Talenta
		9 Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
		10 Evaluasi pelaksanaan Bangkom ASN
27	Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Peraturan terkait sektor Kelautan dan Perikanan terkait UU dan PP
		Kompetensi Teknis:
		1 Wilayah pesisir dan laut sebagai penyedia jasa ekosistem
		2 Wilayah pesisir dan laut sebagai penyedia jasa bahan bioaktif dari biota perairan untuk pengembangan biofarmakologi
		3 Jenis air laut, faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi dan manfaat nya
		4 Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau kecil
		5 Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)
		6 Bangunan dan instalasi laut
		7 Pemahaman pariwisata secara umum
		8 Perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan wisata bahari
28	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	1 Penyajian data dan informasi perdagangan serta penjelasan terkait data dan informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya
		2 Analisis data dan informasi yang digunakan untuk pengelolaan ekspor dan impor meliputi perhitungan alokasi ekspor/impor, permasalahan teknis serta faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan ekspor impor dan fasilitasi sarana perdagangan
		3 Analisis kelayakan terhadap usulan penerbitan dokumen perizinan/non perizinan bidang perdagangan sesuai dengan pedoman kerja/petunjuk teknis
		4 Pemantauan dan analisis data dan informasi hasil pemantauan harga dan pasokan/stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, dan analisis terkait jaringan distribusi, sarana perdagangan dan logistik serta verifikasi data harga dan stok/pasokan barang tertentu pokok dan barang penting
		5 Analisis bahan rencana pelaksanaan, pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan konsumen dan pembinaan pelaku usaha
		6 Analisis bahan terkait penyelenggaraan promosi perdagangan dan menyiapkan penyelenggaraan promosi perdagangan
		Kemampuan Umum:
29	Analisis Perkara Peradilan	1 Pasal 24 UUD 1945, UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
		2 UU 14/1985 tentang MA jo. UU 3/2009
		3 UU 2/1986 jo. 49/2009 (Peradilan Umum), UU 7/1989 jo. 3/2006 (Peradilan Agama), UU 5/1986 jo. 9/2004 jo. 51/2009, UU 30/2014 (Peradilan TUN), UU 31/1997 (Peradilan Militer)
		4 UU 46/2009 (Pengadilan Tipikor), UU 2/2004 (Pengadilan Hubungan Industrial), UU 31/2004 jo. UU 45/2009 (Pengadilan Perikanan), UU 37/2004 (Pengadilan Niaga), UU 26/2000 (Pengadilan HAM), UU 11/2012 (Pengadilan Anak), Pengadilan Pajak (UU 14/2002), Mahkamah Syariah (UU 3/2006)
		5 Pembagian Hukum berdasarkan fungsi (hukum privat dan publik)
		Kemampuan Khusus:
		1 Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) dan Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg), Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA/UU 11/2012), Perma 1/2016 (Mediasi di Pengadilan)
		2 Kekhususan hukum acara pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga
		3 KUHP (existing), KUHP Baru (UU 1/2023), KUH Perdata (umum), UU di luar KUHP/KUHPerdata (khusus); UU Tipikor, UU TPPU, UU Perikanan, UU HAM, UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, UU Narkotika, UU TPPO, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Minerba, UU PPLH (Lingkungan Hidup), UU KDRT, UU TPKS (kekerasan seksual), UU Fidusia, UU Perpajakan, UU Kehutanan, UU Hak Tanggungan, UU Pokok Agraria, UU Kepailitan dan PKPU, UU Parpol, UU Arbitrase, UU Keterbukaan Informasi Publik
		4 Asas keberlakuan undang-undang menurut waktu dan tempat, Asas kekuasaan kehakiman, Asas hukum acara pidana dan perdata
		5 Sumber hukum nasional (undang-undang, yurisprudensi, traktat, kebiasaan dan doktrin)
		6 Sistem pembuktian dalam perkara pidana
		7 Sistem pembuktian dalam perkara perdata
		8 Upaya hukum di MA (upaya hukum biasa dan luar biasa)
		9 Perkara Grasi (UU 22/2002 jo. UU 5/2010)
		10 Bantuan hukum (Posbakum)
		11 Layanan administrasi perkara secara elektronik (SIPP, SIAP, Direktori Putusan)
		12 Layanan persidangan secara elektronik (eCourt/e Litigation)
30	Analisis Perkarantina Tumbuhan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Dasar-dasar perlindungan tanaman
		2 Pengantar Ilmu Pertanian
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Hama Tumbuhan
		2 Ilmu Penyakit Tumbuhan
		3 Karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati
		4 Pengendalian Hama Terpadu

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
31	Analisis Perkebunrayaan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Konsep kebun raya dan konservasi
		2 Pengembangan koleksi tumbuhan
		3 Pengembangan kawasan kebun raya
		4 Identifikasi tumbuhan
		Kompetensi Khusus:
		1 Lanskap kebun
		2 Penulisan ilmiah
		3 Database koleksi
		4 Pengolahan data
		5 Penyiapan sarana prasarana
		6 Perawatan koleksi
32	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Regulasi Bidang Irigasi Pertanian
		2 Regulasi terkait pendaftaran di bidang pestisida, pendaftaran pupuk, pengawasan pupuk dan pupuk bersubsidi
		3 Regulasi dan pengetahuan umum bidang asuransi pertanian dan penyaluran tanggung jawab sosial lingkungan
		4 Pengantar ilmu usahatani dan agribisnis
		5 Pengantar bisnis perbankan (konsep bisnis meliputi pengertian, aspek manajemen, fungsi dan lingkungan yang mempengaruhi iklim bisnis perbankan di Indonesia)
		6 Pengantar ilmu tanah
		7 Makroekonomi
		8 Regulasi bidang koperasi, lembaga keuangan mikro, UMKM
		9 Pengetahuan tentang koperasi, lembaga keuangan mikro, otoritas jasa keuangan, UMKM, ekonomi mikro dan pertanian
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengetahuan iklim (cuaca, fenomena, anomali, regulasi, perhitungan)
		2 Pengetahuan irigasi pertanian (P3A, jaringan irigasi, saluran, bendung/dam parit/embung, air tanah/permukaan)
		3 Perhitungan irigasi pertanian (volume, debit, luas layanan)
		4 Pengetahuan tentang organisme pengganggu tanaman, pengetahuan umum tentang pupuk dan pestisida, manfaat pupuk anorganik, pupuk organik dan pembenah tanah bagi tanaman dan pupuk bersubsidi
		5 Perhitungan dan mekanisme klaim asuransi pertanian
		6 Dasar agronomi
		7 Regulasi bidang koperasi dan lembaga keuangan mikro
		8 Pengetahuan tentang lembaga keuangan mikro, PUAP, LKM-A dan UMKM
		9 Pengetahuan budidaya pertanian
		10 Pengetahuan dasar-dasar ilmu tanah
		11 Pengetahuan dasar-dasar pemetaan dan penginderaan jauh
		12 Pengetahuan sistem informasi geografis
33	Analisis Standardisasi Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Pembinaan penerapan kebijakan standarisasi dan penilaian kesesuaian
		2 Pemantauan dan evaluasi bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan substansi teknis pada instansi/unit penempatan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengembangan standar
		2 Penerapan standar dan penilaian kesesuaian
		3 Pengelolaan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
34	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
		4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		Kemampuan Khusus:
		1 Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur
		2 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
		3 Pengadaan ASN
		4 Pangkat dan Jabatan ASN
		5 Pengembangan Karier ASN
		6 Pola Karier ASN
		7 Promosi ASN
		8 Mutasi ASN
		9 Penugasan ASN
		10 Pengembangan Kompetensi ASN
		11 Penilaian Kinerja ASN
		12 Disiplin ASN
		13 Penghargaan ASN
		14 Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN
		15 Pemberhentian ASN
		16 Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
		17 Perlindungan ASN
		18 Cuti ASN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		19 Sistem Informasi ASN
		20 Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas
		21 Struktur/kelembagaan/tata laksana/ proses bisnis unit kerja/instansi
		22 Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi
		23 Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur
35	Apoteker Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2 Kepmenkes No 13 tahun 2023 tentang Standar Profesi Apoteker
		3 Permenkes No 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
		4 Permenkes No 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
		5 Kode Etik Apoteker
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyusunan Rencana Praktik Kefarmasian
		2 Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP
		3 Pelayanan Farmasi Klinik
36	Arsiparis Ahli Pertama	4 Pelayanan Farmasi Khusus
		5 Penerapan Farmakoekonomi
		Kemampuan Umum:
		1 Sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan
		2 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kearsipan
		3 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
		4 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
		Kemampuan Khusus:
		1 Konsep dan teori tentang arsip dinamis
		2 Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis
37	Arsiparis Terampil	3 Konsep dasar penyusutan arsip
		4 Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan
		5 Konsep dan teori tentang arsip statis
		6 Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis
		7 Preservasi arsip statis
		8 Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis
		9 Standar Operasional Prosedur Kearsipan
		10 Penilaian kinerja Arsiparis
		11 Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN
		Kemampuan Umum:
38	Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama	1 Konsep dan teori tentang kearsipan
		2 Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan
		Kemampuan Khusus:
		1 Teori dasar pengelolaan arsip dinamis
		2 Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip dinamis
		3 Penciptaan arsip
		4 Pemberkasan arsip aktif
		5 Penataan arsip inaktif
		6 Teori dasar pengelolaan arsip statis
		7 Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip statis
39	Asesor Sumber Daya Manusia	8 Restorasi arsip
		9 Pameran arsip
		10 Teori dasar pembinaan kearsipan
		11 Peraturan perundangan dalam rangka pembinaan kearsipan
		12 Bimbingan teknis kearsipan
		Kemampuan Umum:
		1 Tugas Pokok Jabfung AMMI
		2 Jenjang Jabfung AMMI
		3 Lembaga Infrastruktur Mutu
		4 Konsep Organisasi
		5 Pengetahuan tentang Standar
		6 Konsep dasar Sistem Manajemen
		7 Pengetahuan tentang Regulasi
		8 Wawasan Industri
		9 Pengetahuan tentang ISO
		10 Pengetahuan umum tentang konsep sistem industri manufaktur
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengetahuan tentang Jabatan Fungsional AMMI
		2 Pengetahuan Produk dan Pengujian
		3 Pengetahuan Sertifikasi Produk
		4 Sistem Manajemen Mutu
		5 Pengetahuan tentang SNI
		6 Pemberlakuan SNI Wajib Bidang Industri
		7 Pengetahuan Asesmen Sistem Manajemen Mutu
		8 Analisis Studi Kasus Sistem Manajemen Mutu
		9 Pemahaman aspek-aspek yang mendukung kompetensi atribut dan personil Lembaga Sertifikasi produk
		10 Pengetahuan Dasar Proses Sertifikasi Produk, persyaratan dan skema lembaga sertifikasi produk
		Kemampuan Umum:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
	Aparatur Ahli Pertama	1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Kemampuan Khusus: 1 Jabatan Fungsional Asesor SDM Aparatur 2 Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Kompetensi 3 Kerangka Kerja dan Implementasi Manajemen SDM berbasis Talenta 4 Proses dan Pengelolaan Asesmen Kompetensi/Potensi ASN 5 Kerangka Kerja Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Hasil Asesmen 6 Kerangka Kerja Pengembangan Strategik Asesmen
40	Asisten Apoteker Terampil	Kemampuan Umum: 1 Kekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi menimbang, mengemas, dan menyimpan dengan mengacu pada Cara Pembuatan Obat yang Baik, dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik 2 Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara penyusunan rencana praktik kefarmasian 3 Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelayanan farmasi klinik Kemampuan Khusus: 1 Kegiatan pelayanan farmasi klinik 2 Penyampaian informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tepat, akurat, terkini dan relevan dengan kebutuhan penerima informasi dan mampu berkomunikasi secara efektif 3 Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pelayanan farmasi klinik 4 Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, Alat Kesehatan, dan BMHP sesuai pedoman 5 Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP
41	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	Kemampuan Umum: 1 Sistem manajemen keamanan pangan 2 Sistem manajemen mutu pengujian 3 Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan 4 Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor budidaya 5 Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap 6 Pengenalan bahan baku hasil perikanan Kemampuan Khusus: 1 Sistem manajemen keamanan pangan 2 Sistem manajemen mutu pengujian 3 Penanganan kasus mutu hasil perikanan 4 Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor budidaya 5 Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap 6 Pengoperasian alat industri pangan 7 Ketertelusuran dan penarikan produk pangan
42	Asisten Konselor Adiksi Terampil	Kompetensi Umum: 1 Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi GPN 2 Pengetahuan adiksi narkoba 3 Pengetahuan komunikasi efektif Kompetensi Khusus: 1 Penyiapan skrining 2 Asistensi orientasi layanan rehabilitasi 3 Penyiapan asesmen 4 Penyiapan rencana rawatan 5 Asistensi konseling 6 Asistensi pendampingan 7 Asistensi manajemen kasus 8 Asistensi penanganan krisis 9 Asistensi edukasi 10 Penyiapan rujukan 11 Penyiapan konsultasi
43	Asisten Pelatih Olahraga Pemula	Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan tentang olahraga Kompetensi Khusus: 1 Faal dan fisiologi tubuh 2 Identifikasi psikologis atlet 3 Ilmu kepelatihan olahraga
44	Asisten Pelatih Olahraga Terampil	Kompetensi Umum: 1 Pengetahuan tentang olahraga Kompetensi Khusus: 1 Faal dan fisiologi tubuh 2 Identifikasi psikologis atlet 3 Ilmu kepelatihan olahraga
45	Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil	Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan Kemampuan Khusus: 1 Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan 2 Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Memahami konsep dasar, teknik, metode, tatacara prosedur penerapan standar mutu dan keasaman hasil kelautan dan perikanan
		4 Memahami konsep dasar uji terap teknik produk kelautan dan perikanan
		5 Memahami konsep dasar, pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan
46	Asisten Penata Anestesi Terampil	Kemampuan Umum: 1 Peraturan tentang etik legal dan keselamatan pasien 2 Peraturan terkait pengembangan diri dan profesionalisme 3 Peraturan terkait komunikasi efektif 4 Peraturan terkait dengan Landasan ilmu biomedik, anestesiologi dan instrumentasi Kompetensi Khusus: 1 Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan Pra, Intra, Pasca Anestesi 2 Peraturan terkait dengan Tatalaksanaan Obat, Gas, Mesin dan Peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan Pra, Intra, Pasca anestesi 3 Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan anestesi pada Kegawatdaruratan dan bencana
47	Asisten Pengawas Perikanan Pemula	Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan Pengawasan Perikanan 2 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 3 Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan
48	Asisten Pengawas Perikanan Terampil	Kemampuan Umum: Peraturan Kelautan dan Perikanan Kemampuan Khusus: 1 Perencanaan Pengawasan Perikanan 2 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 3 Penanganan Pelanggaran bidang Perikanan
49	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula	Kemampuan Umum: Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap Kemampuan Khusus: 1 Pengenalan Jenis Ikan 2 Identifikasi jenis - jenis kapal penangkapan ikan 3 Identifikasi awak kapal perikanan 4 Identifikasi jenis mesin dan alat penangkapan ikan 5 Identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
50	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	Kemampuan Umum: Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap Kemampuan Khusus: 1 Kelompok Sumberdaya Ikan 2 Identifikasi komponen kapal perikanan 3 Identifikasi Sertifikasi Awak Kapal Perikanan 4 Identifikasi komponen mesin dan alat penangkapan ikan 5 Identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
51	Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi Terampil	1 Dasar-dasar kelistrikan 2 Dasar-dasar elektronika 3 Dasar telekomunikasi 4 Telekomunikasi seluler 5 Optik 6 Satelit 7 Radar 8 Antenna 9 Rangkaian Digital 10 Dasar-dasar komputer 11 Jaringan komputer 12 Perangkat lunak 13 Medan elektromagnetik 14 Gelombang radio 15 Pengoperasian komputer 16 Literasi digital 17 Statistika 18 Optik 19 Alat pengolah perkantoran
52	Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian Terampil	Kemampuan Umum: 1 UU Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian 2 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian 3 Permenpan RB No 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian 4 Permenhub No 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian Kemampuan Khusus: 1 PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api 2 PM 29 Tahun 2011 tentang Stasiun 3 PM 44 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian 4 PM 45 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian 5 PM 50 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian 6 Proses entri data

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
53	Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian Terampil	7 Pengecekan data persiapan alat uji
		8 Prosedur dan tata cara pengujian jalur dan bangunan perkeretaapian
		9 Prosedur dan tata cara pengujian fasilitas pengoperasian kereta api
		Kemampuan Umum:
		1 Pengetahuan umum tentang Kebijakan tentang Perkeretaapian
		2 Pengetahuan umum terkait Dasar Perkeretaapian
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengetahuan tentang Kereta
		2 Pengetahuan tentang Lokomotif
54	Asisten Perisalah Legislatif Terampil	3 Pengetahuan tentang Gerbong
		4 Pengetahuan tentang Peralatan Khusus
		5 Pengetahuan tentang Sarana Perkeretaapian
		Kompetensi Umum:
		1 Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
		2 Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
		Kompetensi Khusus:
		1 Kelembagaan DPR
		2 Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
55	Asisten Perpustakaan Terampil	3 Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
		Kompetensi Umum:
		1 Pembudayaan kegemaran membaca
		2 Sejarah dunia kepustakawanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan teknis bahan perpustakaan
		2 Pelayanan dasar perpustakaan
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
56	Asisten Pranata Siaran Terampil	2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
		3 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)
		4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		5 Kode Etik Jurnalistik Nomor 6 Tahun 2008
		6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika
		7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
		Kemampuan Khusus:
		1 Definisi dan Konteks Komunikasi
		2 Prinsip Komunikasi
		3 Komunikasi Massa
		4 Fungsi Komunikasi
		5 Definisi, Produk, dan Prinsip Jurnalistik
		6 Digital
		7 Media Sosial
		8 Terestrial
		9 Profesi, Produksi, dan Program Siaran
		10 Penulisan Naskah Siaran
		11 Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan
		12 Videografi, Fotografi, dan Animasi
		13 Tata Cara Pembuatan Berita
		14 Naskah
57	Asisten Statistisi Terampil	15 Dasar-dasar Komunikasi
		16 Desain Grafis
		17 Konten
		18 Multimedia
		19 Pengetahuan Umum, UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik
		20 Pra Produksi dan Pasca Produksi
		21 Wawancara
		22 P3SPS
		Kemampuan Umum:
58	Asisten Teknisi Siaran Pemula	Statistik Dasar
		Kemampuan Khusus:
		1 Persiapan Kegiatan Statistik
		2 Pengumpulan Data
		3 Pengolahan Data
		4 Diseminasi Hasil Kegiatan Statistik
		Kemampuan Umum:
		Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
		Kemampuan Khusus:
		1 Broadcasting
		2 Sistem Komputer
		3 Jaringan Dasar Komputer
		4 Multimedia
		5 Fisika Dasar

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
59	Asisten Teknisi Siaran Terampil	6 Dasar-Dasar Listrik
		7 Pertelevisionian
		8 Transmisi
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
		3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		4 Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Komunikasi dan Informatika
		5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/6/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 2 GHz
		6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/6/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada Pita Frekuensi Radio 5.8 GHz
		7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 51/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
		8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Video Conference
		9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		10 Kode Etik Jurnalistik Nomor 6 Tahun 2008
		Kemampuan Khusus:
		1 Perkembangan Media Massa
		2 Media Sosial
		3 Teknik Dasar Komputer
		4 Teknik Dasar Jaringan
60	Auditor Ahli Pertama	5 Sistem Komputer
		6 Multimedia
		7 Teori Dasar Pemancar
		8 Teknik Audio Studio
		9 Teknik Audio Siaran Luar
		10 Teknik Penyuntingan Audio
		11 Teknik Dasar-Dasar Kamera
		12 Teknik Videografi
		13 Desain Grafis
		14 Teknik Pencahayaayaan
		15 Produksi Siaran
		16 Tata Artistik
61	Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama	17 Dasar-Dasar Fotografi
		18 Teknik Elektronika
		19 Teknik Listrik
		20 Frekuensi
		Kemampuan Umum:
		1 Standar Audit
		2 Kode Etik dan Pedoman Perilaku
		Kemampuan Khusus:
		1 Peran Internal Audit Layanan Audit: Assurance and Consulting
		2 Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program
		3 Governance, Risk, and Control
		4 Risiko Fraud
62	Auditor Perkeretaapian Ahli Pertama	5 Proses Bisnis dan Risiko
		6 Penerapan Metodologi Pengawasan
		7 Buku Audit dan KKA
		8 Perubahan metodologi pengawasan audit intern
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		Kemampuan Khusus:
		1 Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN
		2 Perencanaan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
		3 Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
		4 Laporan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
		5 Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
		6 Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sarana di bidang perkeretaapian
		3 Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di bidang perkeretaapian
		4 Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SDM di bidang perkeretaapian
		5 Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan di bidang perkeretaapian
		6 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan audit perkeretaapian serta dasar-dasar audit
		7 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan audit perkeretaapian serta dasar-dasar audit
		8 Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keselamatan dan audit perkeretaapian serta dasar-dasar audit
		Kemampuan Khusus:
		1 Perencanaan Audit (Bahan perencanaan audit, Rencana kerja audit, Potensi bahaya, Potensi permasalahan, Program audit)
		2 Pelaksanaan Audit (Lembar kerja audit, Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian)
		3 Pelaporan Audit (Penilaian hasil audit)
		4 Dasar-Dasar Audit (Penyiapan bahan pelaporan audit, Pemantauan dan tindak lanjut audit, Diseminasi laporan audit)
63	Auditor Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Standar Audit
		2 Kode Etik dan Pedoman Perilaku
		Kemampuan Khusus:
		1 Peran Internal Audit Layanan Audit: Assurance and Consulting
		2 Risk Based - Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program
		3 Governance, Risk, and Control
		4 Risiko Fraud
		5 Identifikasi proses bisnis dan risikonya
		6 Implementasi proses bisnis dan risikonya
		7 Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi proses bisnis dan risiko mitra
		8 Metodologi pengawasan
		9 Bukti audit dan KKA
64	Bidan Ahli Pertama	Keterampilan Umum:
		1 Etik legal dan keselamatan pasien
		2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pelayanan Kesehatan Ibu
		2 Pelayanan Kesehatan Anak
		3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana
		4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Communicator)
		5 Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pelayanan Kebidanan
65	Bidan Terampil	Keterampilan Umum:
		1 Etik legal dan keselamatan pasien
		2 Asuhan dasar praktik klinik kebidanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pelayanan Kesehatan Ibu
		2 Pelayanan Kesehatan Anak
		3 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana
		4 Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (Communicator)
		5 Pengelolaan Pelayanan Kebidanan
66	Co-Pilot	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
		2 Peraturan pemerintah No. 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang penerbangan
		Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
		4 ICAO Annexes
		5 Keudaraan
		Kemampuan Khusus:
		1 PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome)
		2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara
		3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara
		Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan
		5 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual of Standard CASR-Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara
		7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional
		8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara
		9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan
		10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional
		11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara
		12 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
		13 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139-10), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara
		14 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 038 Tahun 2017 Tentang Apron Management Service
		15 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 164 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 145 Amandemen tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara
		16 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (Civil Aviation Safety Regulations Part 65) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0)
		17 Advisory Circular 171 – 05 Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan
		18 Civil Aviation Safety Regulation Part 61 Licensing of Pilots and Flight Instructors
		19 Civil Aviation Safety Regulation Part 91 General Operating and Flight Rules
		20 Civil Aviation Safety Regulation Part 135 Certification and Operating Requirement: For Commuter and Charter Certificate Holders
		21 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan
67	Desainer Buku	Kompetensi Umum:
		1 Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan
		2 Penerapan proses pemerolehan naskah buku
		3 Bentuk, jenis, dan isi buku
		4 Aspek legalitas dan etika penerbita buku
		5 Penerapan standar mutu buku
		6 Ekosistem dan pelaku perbukuan
		7 Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku
		8 Bagian-bagian buku
		9 Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku
		Kompetensi Khusus:
		1 Prinsip dalam mendesain buku
		2 Objektif dalam mendesain
		3 Penggunaan Perangkat Lunak Desain
		4 Penggunaan tipografi
		5 Penggunaan warna
		6 Proses Produksi
		7 Regulasi perbukuan
		8 Aset Audio visual
		9 Buku elektronik
68	Diplomat Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
		2 Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri
		3 Negosiasi
		Kemampuan Khusus:
		1 Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
		2 Penanganan dan Kerja Sama Multilateral
		3 Penanganan dan Kerja Sama Regional dan ASEAN
		4 Diseminasi Informasi Kebijakan Politik Luar Negeri
		5 Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri
		6 Pelayanan Kekonsuleran
		7 Pelayanan Keprotokolan
		8 Penanganan dan Pengelolaan Media
		9 Penguasaan Substansi dan Kawasan/Negara
		10 Pelayanan Fasilitas Diplomatik
		11 Pembuatan Perjanjian Internasional
		12 Diplomasi Publik
		13 Kerja Sama dan Bantuan Luar Negeri
		14 Layanan Keamanan Diplomatik

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
69	Dokter Ahli Muda	15 Manajemen Kelembagaan Diplomasi
		Kompetensi Umum:
		1 Penjabaran Pancasila
		2 Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
		3 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan OBL
		4 Permenkes Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		Kompetensi Khusus:
		1 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003
		2 Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
		3 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
		4 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
		5 Permenkes Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
		6 Permenkes Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak
		7 Permenkes Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TBC
		8 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
		9 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang RAHASIA KEDOKTERAN
70	Dokter Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
		Kompetensi Khusus:
		1 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 139/KEP/M.PAN/11/2003
71	Dokter Gigi Ahli Pertama	2 Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012
		Kemampuan Umum:
		1 Undang- Undang Kesehatan, dan Peraturan Perundang-undangan Jaminan Kesehatan Nasional
		2 Sustainable Development Goals (SDGs) bidang Kesehatan
		3 Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012
		4 Undang-Undang Kesehatan no 17 tahun 2023. Hukum dan Etika Profesi
		5 Permenkes Nomor 43 tahun 2019
		6 Standar profesi kedokteran gigi sesuai peraturan pemerintah no 2 tahun 2018
		7 GERMAS
		8 Peraturan perundangan tentang pencegahan narkoba
		9 Sistem kesehatan nasional dan 7 sub sistem kesehatan nasional
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyembuhan Penyakit Gigi dan Mulut
		2 Pemulihan Kesehatan Akibat Penyakit Gigi dan Mulut
		3 Peningkatan Derajat Kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut
		4 Undang-Undang Kesehatan no 17 tahun 2023
		5 Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat
72	Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		Advokasi Kebijakan Bidang Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani
		Kemampuan Khusus:
		1 Analisis Risiko HPHK dan Keamanan Hayati Hewani
		2 Identifikasi HPHK dan Pemantauan Daerah Sebar HPHK
		3 Pengawasan Keamanan Hayati Hewani
		4 Pengembangan metode karantina hewan dan keamanan hayati hewani
73	Dokter Pendidik Klinis Ahli Muda	5 Tindakan karantina hewan
		Kompetensi Umum:
		1 Pelaksanaan pelayanan spesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik untuk kepentingan hukum
		2 Penyelenggaraan, pembimbingan, penyusunan peta jalan, atau pelaksanaan pelayanan subspecialistik yang holistik dan komprehensif dalam pelayanan spesialisik/sub spesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik untuk kepentingan hukum
		3 Evaluasi metode, bahan ajar Pendidikan kedokteran
		4 Perencanaan penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		5 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		6 Pelayanan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		7 Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada individu, keluarga, dan masyarakat dalam lingkup institusional/nasional/internasional
		8 Penyusunan dan evaluasi kebijakan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam lingkup institusional/nasional/internasional
		9 Pengembangan konsep, teori terkait pemecahan masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit dalam lingkup institusional/nasional/internasional
		Kompetensi Khusus:
		1 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara pelayanan spesialisik/sub spesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik untuk kepentingan hukum
		2 Pelaksanaan pelayanan spesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik untuk kepentingan hukum

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Penyelenggaraan, pembimbingan, penyusunan peta jalan, atau pelaksanaan pelayanan subspecialistik yang holistik dan komprehensif dalam pelayanan spesialisik/sub spesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik untuk kepentingan hukum
		4 Evaluasi dan penyusunan perangkat norma standar prosedur instrument penatalaksanaan klinis holistik dan komprehensif dalam pelayanan spesialisik/sub spesialisik yang holistik dan komprehensif atau pelayanan kedokteran spesialisik untuk kepentingan hukum
		5 Perencanaan terkait pendidikan kedokteran
		6 Pelaksanaan pendidikan kedokteran
		7 Analisis kelayakan pelaksanaan pendidikan kedokteran
		8 Evaluasi metode, bahan ajar Pendidikan kedokteran
		9 Pengembangan metode, bahan ajar terkait pendidikan kedokteran
		10 Konsep, teknik, metode dan etika dalam penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/internasional
		11 Perencanaan penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		12 Pengelolaan penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
		13 Evaluasi hasil penelitian bidang Kesehatan dalam lingkup institusional/nasional/ internasional
74	Dokter Pendidik Klinis Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Tata cara pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama
		2 Tata cara dan prosedur tindakan resusitasi
		3 Macam-macam pemeriksaan penunjang
		4 Tata cara pemberian informasi kepada publik terkait kasus kedokteran
		5 Tata kelola dan penanganan wabah/KLB
		6 Tata cara pemberian KIE
		7 Kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan
		8 Pemberian informed consent ke pasien
		Kemampuan Khusus:
		1 Tata kelola pelayanan medis spesialisik dengan pembimbingan dokter peserta pendidikan
		2 Satuan unit kerja pelayanan kesehatan
		3 Langkah dan tata cara tindakan medis spesialisik dengan pembimbingan peserta pendidikan
		4 Pemeriksaan luar dengan pembimbingan peserta pendidikan
		5 Pemeriksaan dalam dengan pembimbingan peserta pendidikan
		6 Penanggulangan bencana dengan pembimbingan peserta pendidikan
		7 Diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing, fasilitator dan mentor
		8 Diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing, fasilitator dan mentor
		9 Tata cara penyuluhan/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dengan pembimbingan peserta pendidikan dokter
		10 Tata cara pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing
		11 Tata cara pembimbingan dan pengujian dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing utama dan pembimbing pendamping
		12 Tata cara sebagai penguji pada ujian akhir sebagai anggota
		13 Program kuliah dan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai anggota
		14 Tugas jaga melalui panggilan dan di tempat
		15 Tata cara saksi ahli pada kasus kedokteran
75	Dokumentalis Hukum	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
		2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		5 Pengetahuan umum teknologi dan informasi
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
		2 Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
		3 Konsep dasar, teknik, metode, pedoman dan prosedur dalam pengelolaan informasi hukum
		4 Penyiapan data dan bahan yang dibutuhkan dalam pengelolaan dan pengembangan informasi hukum
		5 Pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum
76	Dosen Asisten Ahli	Kompetensi Khusus:
		Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Etika, Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)
		Kompetensi Umum:
		1 Penalaran dan Pemecahan Masalah (Analytical Thinking, Creative Thinking, Critical Thinking, dan Strategic Thinking)
		2 Dimensi Psikologi (Integritas Akademik, Keterampilan Interpersonal, Motivasi Berprestasi, Belajar Berkelanjutan, Kemampuan Sosial, dan Perilaku Kolaboratif)
		3 Bahasa Inggris meliputi teks artikel ilmiah, teks argumentatif, teks pengumuman, dan teks berita
77	Dosen Lektor	Kompetensi Khusus:
		Etika dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Etika, Pendidikan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)
		Kompetensi Umum:
		1 Penalaran dan Pemecahan Masalah (Analytical Thinking, Creative Thinking, Critical Thinking, dan Strategic Thinking)
		2 Dimensi Psikologi (Integritas Akademik, Keterampilan Interpersonal, Motivasi Berprestasi, Belajar Berkelanjutan, Kemampuan Sosial, dan Perilaku Kolaboratif)
		3 Bahasa Inggris meliputi teks artikel ilmiah, teks argumentatif, teks pengumuman, dan teks berita

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
78	Editor Buku	Kompetensi Umum:
		1 Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan
		2 Penerapan proses pemerolehan naskah buku
		3 Bentuk, jenis, dan isi buku
		4 Aspek legalitas dan etika penerbita buku
		5 Penerapan standar mutu buku
		6 Ekosistem dan pelaku perbukuan
		7 Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku
		8 Bagian-bagian buku
		9 Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku
		Kompetensi Khusus:
		1 Prinsip-prinsip penyuntingan
		2 Kode etik penyunting
		3 Kriteria kelayakan naskah
		4 Tahapan penyuntingan dengan benar
		5 Aspek penyuntingan mekanis
		6 Aspek penyuntingan substantif
		7 Pengutipan atau perizinan dengan benar
		8 Penyuntingan visual
79	Edukator	1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
		2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
		5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
80	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN
		2 Permenkes No.2 Tahun 2023 Pelaksanaan (Bab VI)
		3 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
		4 Metode Penulisan Karya Tulis Ilmiah
		Kemampuan Khusus:
		1 Surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit
		2 Investigasi vektor dan binatang pembawa penyakit
		3 Intervensi vektor dan binatang pembawa penyakit
		4 Uji Resistensi/Efikasi vektor dan/atau binatang pembawa penyakit
		5 Perumusan kebijakan di bidang vektor dan binatang pembawa penyakit
81	Entomolog Kesehatan Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
		2 Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
		3 Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
		Kemampuan Khusus:
		1 Surveilans vektor dan/atau BPP
		2 Investigasi vektor dan/atau BPP
		3 Intervensi vektor
82	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Komunikasi Efektif
		2 Komunikasi Interpersonal
		3 Advokasi
		4 Pengorganisasian kegiatan epidemiologi
		Kemampuan Khusus:
		1 Manajerial Epidemiologi
		2 Surveilans Epidemiologi
		3 Manajemen Data Epidemiologi
		4 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB/wabah
		5 Pemberdayaan masyarakat dalam deteksi dini penyakit dan masalah kesehatan
		6 Kajian Epidemiologi
		7 Kewaspadaan Dini KLB
83	Epidemiolog Kesehatan Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Komunikasi Efektif
		2 Team Work
		3 Organisasi
		4 Etika kerja
		5 Perundang-undangan
		Kemampuan Khusus:
		1 Surveilans Epidemiologi
		2 Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini KLB
		3 Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB
		4 Manajemen Data

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
84	Fasilitator Bahasa Isyarat	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan dan advokasi layanan kesejahteraan sosial
		2 Implementasi kebijakan dan advokasi layanan kesejahteraan sosial
		Kompetensi Khusus:
		1 Penyusunan dan perencanaan kerja layanan fasilitasi Bahasa Isyarat
		2 Analisis kelayakan program layanan fasilitasi Bahasa Isyarat
85	Fasilitator Bela Negara	3 Pendampingan penerima layanan/kelompok sasaran layanan fasilitasi Bahasa Isyarat
		4 Penyusunan laporan hasil kerja pelaksanaan layanan fasilitasi Bahasa Isyarat
		1 Pengetahuan Dasar Bela Negara
		2 Kesadaran Bela Negara
86	Fasilitator Pemerintahan	3 Bela Negara dalam Pembangunan Nasional
		4 Konsepsi Bela Negara
		Kemampuan Umum:
		1 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
		2 Macam Sistem Pemerintahan di Indonesia
		3 Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
87	Fasilitator Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Kemampuan Khusus:
		1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
		Kemampuan Umum:
		1 Penyusunan kebijakan bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian
88	Fasilitator Rehabilitasi	2 Pembinaan penerapan kebijakan standarisasi dan penilaian kesesuaian
		Kemampuan Khusus:
		1 Pemberdayaan stakeholder penerapan standar dan penilaian kesesuaian
		2 Pendampingan (coaching) penerapan SNI
		Kemampuan Umum:
		1 Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi GPN
89	Fisikawan Medis Ahli Pertama	2 Naskah kebijakan
		3 Perencanaan
		4 Komunikasi Efektif
		5 Advokasi
		6 Pengetahuan dasar adiksi
		Kemampuan Khusus:
90	Fisioterapis Ahli Pertama	1 Persiapan peningkatan kemampuan penyelenggara rehabilitasi
		2 Pelaksanaan peningkatan kemampuan penyelenggara rehabilitasi
		3 Evaluasi peningkatan kemampuan penyelenggara rehabilitasi
		4 Rehabilitasi berkelanjutan
		5 Skrining
		6 Asesmen
89	Fisikawan Medis Ahli Pertama	7 Rencana terapi
		8 Intervensi psikososial
		9 Konseling
		10 Rujukan
		11 Rehabilitasi
		12 Instrumen identifikasi
90	Fisioterapis Ahli Pertama	13 Pengumpulan data
		14 Monitoring
		15 Evaluasi
		Kemampuan Umum:
		1 Manajemen Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
		2 Jaminan Kualitas Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
89	Fisikawan Medis Ahli Pertama	3 Proteksi dan Keselamatan Radiasi
		4 Pelayanan Dosimetri
		Kemampuan Khusus:
		1 Jaminan Kualitas Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
		2 Proteksi dan Keselamatan Radiasi
		3 Pelayanan Dosimetri
90	Fisioterapis Ahli Pertama	4 Audit Dosis Radiasi
		5 Manajemen Peralatan Sumber Radiasi dan Alat Ukur
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
		3 Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapis Indonesia Nomor : 0314/KEP/PP-IFI/I/2023
90	Fisioterapis Ahli Pertama	4 PMK NOMOR 80 TAHUN 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis
		5 PMK NOMOR 65 TAHUN 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi
		Kemampuan Khusus:
		1 Standar kompetensi Fisioterapi Indonesia
		2 Identifikasi problematika Fisioterapi
		3 Tindakan Fisioterapi
90	Fisioterapis Ahli Pertama	4 Penyusunan laporan hasil pemeriksaan
		5 Penyusunan laporan kemajuan intervensi
		6 Penyusunan laporan penghentian/kelanjutan terapi
		7 Penyusunan laporan dan dokumentasi diagnosis Fisioterapi berdasarkan ICF

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
91	Fisioterapis Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
		3 Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapis Indonesia Nomor : 0314/KEP/PP-IFI/I/2023
		4 PMK NOMOR 80 TAHUN 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis
		5 PMK NOMOR 65 TAHUN 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi
		Kemampuan Khusus:
		1 Standar kompetensi Fisioterapi Indonesia
		2 Identifikasi problematika Fisioterapi
		3 Tindakan Fisioterapi
		4 Penyusunan laporan hasil pemeriksaan
		5 Penyusunan laporan kemajuan intervensi
		6 Penyusunan laporan penghentian/kelanjutan terapi
92	Guru Ahli Pertama	7 Penyusunan laporan dan dokumentasi diagnosis Fisioterapi berdasarkan ICF
		1 Konsep suatu disiplin ilmu yang relevan
		2 Materi suatu disiplin ilmu yang relevan
		3 Hirarki konsep dan materi suatu disiplin ilmu
		4 Prasyarat dari suatu disiplin ilmu yang relevan
		5 Keterkaitan suatu konsep dengan konsep yang lain
		6 Konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin
		7 Teori belajar Ausubel
		8 Teori belajar Gagne
		9 Teori belajar Piaget
		10 Karakteristik murid berkebutuhan khusus
		11 Tahapan perkembangan berdasarkan usia dan karakteristik khas masing-masing tahap
		12 Teori belajar Gagne: Taksonomi Bloom dan perkembangannya
		13 Profil Pelajar Indonesia
		14 Teori Belajar Gagne
		15 Learning Objective
		16 Individualized Education Program (IEP) dan Prinsip-prinsip differentiated learning
		17 Teori dasar komunikasi
		18 Active listening
		19 Kesepakatan dan kebiasaan positif di lingkungan belajar
		20 Konsep dan prinsip-prinsip motivasi dalam pendidikan
		21 Mengembangkan motivasi siswa
		22 Behavior modification & habit formation
		23 Prinsip-prinsip reward, punishment, dan reinforcement dalam pembentukan tingkah laku
		24 Desain pembelajaran
		25 Facilitating learning
		26 Berfikir kritis
		27 Berbagai teknik asesmen di tingkat kelas (classroom-based assessment) sesuai dengan tujuan pembelajaran
		28 Konsep dan prinsip assessment as learning dan assessment for learning
		29 Pemanfaatan hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran (feedback)
		30 Program remedial dan program pengayaan berdasarkan hasil asesmen
		31 Refleksi
		32 Procedural & declarative knowledge
		33 Working memory & long-term memory
		34 Kode etik guru
		35 Interaksi guru-murid
		36 School safety
		37 Diversity
		38 Pengertian dan pengembangan potensi
		39 Perencanaan karir dan pengembangan potensi diri
93	Ilustrator Buku	Kompetensi Umum:
		1 Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan
		2 Penerapan proses pemerolehan naskah buku
		3 Bentuk, jenis, dan isi buku
		4 Aspek legalitas dan etika penerbita buku
		5 Penerapan standar mutu buku
		6 Ekosistem dan pelaku perbukuan
		7 Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku
		8 Bagian-bagian buku
		9 Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku
		Kompetensi Khusus:
		1 Brief proyek ilustrasi
		2 Riset dalam penciptaan ilustrasi
		3 Dasar penciptaan ilustrasi
		4 Evaluasi fungsi ilustrasi
		5 Media ilustrasi manual dan digital
		6 Proses pengerjaan ilustrasi
		7 Teori perspektif
		8 Prinsip penciptaan karakter
		9 Cara merancang latar setting
		10 Etika dalam penciptaan ilustrasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
94	Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan terkait regulasi ketenagalistrikan
		2 Pengetahuan terkait keselamatan ketenagalistrikan
		3 Pengetahuan terkait tugas dan fungsi Inspektur Ketenagalistrikan
		4 Pengetahuan terkait isu terkini ketenagalistrikan
		Kompetensi Khusus:
		1 Inspeksi instalasi pembangkit tenaga listrik
		2 Inspeksi instalasi transmisi tenaga listrik
		3 Inspeksi instalasi distribusi tenaga listrik
		4 Inspeksi instalasi pemanfaatan tenaga listrik
		5 Pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan pada badan usaha penyediaan tenaga listrik
		6 Pengawasan pelaksanaan regulasi ketenagalistrikan pada badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
95	Inspektur Minyak dan Gas Bumi Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi terkait kegiatan usaha minyak dan gas
		2 PermenpanRB nomor 21 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di bidang energi dan sumber daya mineral
		3 Isu strategis terkait industri migas
		Kompetensi Khusus:
		1 Teknik Eksplorasi/pengeboran
		2 Teknik Produksi
		3 Pengetahuan geologi dan geofisika
		4 Teknologi Informasi
		5 Teknik Fasilitas Produksi Permukaan
		6 Pemantauan dan evaluasi
		7 Keamanan dan keselamatan kerja dan lingkungan
		8 Inventarisasi dampak lingkungan
		9 Pemantauan lingkungan
96	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Sistem manajemen keamanan pangan
		2 Sistem manajemen mutu pengujian
		3 Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
		4 Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor budidaya
		5 Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap
		6 Kimia Pangan
		Kemampuan Khusus:
		1 Sistem manajemen keamanan pangan
		2 Sistem manajemen mutu pengujian
		3 Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
		4 Penanganan kasus mutu hasil perikanan
		5 Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor budidaya
		6 Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap
97	Inspektur Panas Bumi Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
		2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
		4 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
		5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2017 tentang Wilayah Kerja Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
		6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penugasan Survei Pendahuluan Dan Penugasan Survei Pendahuluan Dan Eksplorasi Panas Bumi
		7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penawaran Wilayah Kerja Panas Bumi, Pemberian Izin Panas Bumi, dan Penugasan Pengusahaan Panas Bumi
		8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
		9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80 /PMK.08/2022 Tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
		Kompetensi Khusus:
		1 Prinsip Dasar Geologi dalam Eksplorasi Panas Bumi
		2 Struktur Geologi yang Berperan dan Teknologi Inderaja serta Sistem Informasi Geografis
		3 Aplikasi berbagai metode geofisika untuk eksplorasi panas bumi, distribusi dan sebaran sistem panas bumi, karakteristik geofisika sistem panas bumi
		4 Prinsip-prinsip dasar geokimia dalam eksplorasi panas bumi, cara estimasi temperatur, karakter reservoir, jenis manifestasi dan fluida panas bumi
		5 Teknologi rekayasa eksploitasi panas bumi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
98	Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	6 Konsep sistem panas bumi
		7 Teknologi pemanfaatan panas bumi secara langsung maupun tidak langsung, sistem pembangkit listrik panas bumi, optimalisasi produksi panas bumi, dan infrastruktur pendukung panas bumi
		Kemampuan Umum:
		1 UU No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
		2 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3 Permenpan RB No 35 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian
		Kemampuan Khusus:
		1 PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api
		2 PM 29 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api
		3 PM 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain
		4 PM Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian
		5 PM Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian
		6 PM Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
		7 Perencanaan pengawasan, rencana kerja, lembar kerja dan identifikasi potensi bahaya pengawasan prasarana
		8 Penyusunan studi kelayakan, basic engineering design, detail engineering design, Factory acceptance test, Site Installation Test dan Commissioning test
		9 Rencana operasi, perawatan prasarana perkeretaapian dan rencana pengusahaan prasarana perkeretaapian
		Kemampuan Umum:
		1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2007
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009
		3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 22 Tahun 2011
99	Inspektur Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2022
		5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 94 Tahun 2010
		6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 153 Tahun 2016
		7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 175 Tahun 2015
		8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 41, 43, 44 Tahun 2010
		9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 54 Tahun 2016
		10 Tupoksi Petugas Inspektur Sarana Perkeretaapian
		Kemampuan Khusus:
		1 Persiapan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		2 Pengawasan pengadaan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		3 Pengawasan pengoperasian kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		4 Pengawasan perawatan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		5 Pengawasan pemeriksaan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		6 Pengusahaan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		7 Pengembangan pengawasan kelaikan teknis dan operasional penyelenggaraan sarana perkeretaapian
		Kompetensi Umum:
		1 UU Nomor 3 Tahun 2020 & UU Nomor 4 Tahun 2009
		2 PP Nomor 96 Tahun 2021
		3 PP Nomor 25 Tahun 2023
100	Inspektur Tambang Ahli Pertama	4 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020
		5 Kepmen ESDM No. 77.K-MB.01-MEM.B-2022
		6 Kepmen ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018
		7 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017
		Kompetensi Khusus:
		1 Prinsip Dasar Geologi
		2 Mineralogi dan Petrologi
		3 Teknik Eksplorasi Geologi
		4 Potensi Sumberdaya Geologi Indonesia
		5 Estimasi Sumber Daya dan Cadangan
		6 Pengeboran
		7 Pengeboran kering (tanpa fluida) dan dengan fluida
		8 Alat Gali, Muat dan Angkut
		9 Pengolahan Bahan Galian
		10 Mesin diesel dan Otto
		11 Kelistrikan
		12 Generator
		13 Motor listrik
		14 Metode dan sistem tambang terbuka
		15 Metode dan sistem tambang bawah tanah
		16 Geoteknik Tambang Terbuka
		17 Geoteknik Tambang Bawah Tanah
		18 Hidrologi
		19 Hidrogeologi
		20 Survei
		21 Perencanaan tambang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		22 Produksi tambang
		23 Teknologi proses metalurgi
		24 Analisis proses metalurgi
		25 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Th 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021
		26 Pengelolaan dan pemantauan kualitas air dan air limbah berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001
		27 Pengelolaan dan pemantauan limbah B3 kegiatan pertambangan berdasarkan PP No 101 Tahun 2014 dan PP No. 74 Tahun 2001
		28 Audit Lingkungan Hidup berdasarkan PermenLH No. 3 tahun 2013
		29 Pemantauan kualitas udara kegiatan pertambangan berdasarkan PermenLH No. 4 Tahun 2014 dan PP No 41 Tahun 1999
		30 Pengelolaan sampah dan limbah padat kegiatan pertambangan berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan
		31 Izin Lingkungan berdasarkan PermenLHK No 4 Tahun 2021
		32 Permen ESDM No 1827 Tentang Pertambangan yang baik
		33 Job Safty Analysis (JSA)
		34 Sistem manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)
101	Instruktur Ahli Pertama	Kemampuan Khusus:
		1 Identifikasi kebutuhan pelatihan atau pengukuran produktivitas
		2 Rencana Pelaksanaan Pelatihan
		3 E-learning
		4 Media Pembelajaran
		5 Perangkat Penilaian
		6 Daftar Kebutuhan Fasilitas dan Daftar Peralatan
		7 Pelatihan Tatap Muka
		8 Pemeliharaan Peralatan Pelatihan
		9 Bimbingan Konsultasi
		10 Pendampingan Pelatihan Kerja
		11 Perangkat Evaluasi Hasil Pembelajaran
		12 Evaluasi Hasil Pembelajaran
		13 Identifikasi Pengetahuan K3 Umum
		14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
		4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
		5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
		6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
102	Investigator Keselamatan Pelayaran	Kemampuan Umum:
		1 Matematika terapan
		2 Fisika terapan
		3 Informasi dan Teknologi
		4 Kesehatan dan keselamatan Kerja
		5 Bahasa Inggris maritim & SMCP
		6 Kepemimpinan
		Kemampuan Khusus:
		1 Prosedur darurat
		2 Marine Pollution
		3 Peraturan Pencegahan tubrukan dilaut dan Dinas Jaga
		4 Konstruksi dan stabilitas kapal
		5 Penanganan dan pengaturan muatan
		6 Hukum maritim
103	Jaksa Ahli Pertama	7 Global Maritime Distress Safety System
		Kemampuan Khusus:
		1 Asas-Asas Hukum Pidana
		2 Hukum Pidana
		3 Hukum Acara Pidana
		4 Hukum Pidana Khusus
		5 Hukum Pidana Internasional
		6 Kemahiran Litigasi
		7 Hukum Perjanjian Internasional
		8 Hukum dan HAM
		9 Hukum Perdata
		10 Hukum Waris Perdata
		11 Hukum Perjanjian
		12 Hukum Acara Perdata
		13 Hukum Acara Tata Usaha Negara
		14 Hukum Tata Negara
		15 Hukum Adat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		16 Ilmu Negara
		17 Pengantar Ilmu Hukum
		18 Hukum Hak Kekayaan Intelektual
		19 Hukum Ketenagakerjaan
		20 Hukum Otonomi Daerah dan Desa
		21 Hukum Perusahaan
		22 Hukum Agraria
		23 Hukum Internasional
		24 Hukum dan Masyarakat
		25 Hukum Laut Internasional
		26 Hukum Bisnis
		27 Etika dan Tanggung Jawab Profesi
		Pengetahuan Umum:
		1 Sosiologi dan Budaya Dasar
		2 Kriminologi
		3 Filsafat Hukum
		4 Argumentasi Hukum
		5 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
		6 Statistik Dasar
		7 Kesehatan Dasar
		8 Penggunaan Bahasa Asing
		9 Penguasaan Komputer
104	Jenang Kapal Kelas I	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
105	Jenang Kapal Kelas II	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
106	Juru Masak Kapal Kelas I	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
107	Juru Masak Kapal Kelas II	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
108	Juru Mesin Kapal Kelas I	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
109	Juru Mesin Kapal Kelas II	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
110	Juru Mesin Kapal Kelas III	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
111	Juru Minyak Kapal Kelas I	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
112	Juru Minyak Kapal Kelas II	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
113	Juru Minyak Kapal Kelas III	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
114	Juru Mudi Kapal Kelas I	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
115	Juru Mudi Kapal Kelas II	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
116	Juru Mudi Kapal Kelas III	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
117	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Kompetensi Umum: Pengetahuan umum, peraturan dan teori tentang pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Tata cara operasi sumber daya air 2 Tata cara pemeliharaan sumber daya air 3 Alat ukur dan instrumentasi dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air
118	Juru Pelihara Cagar Budaya	1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Cagar Budaya 2 Dasar Hukum Pemeliharaan Cagar Budaya 3 Pengertian Pelindungan Cagar Budaya 4 Pengertian Pemeliharaan Cagar Budaya 5 Tata Cara Pemeliharaan Cagar Budaya 6 Tata Cara Pembersihan Benda, Bangunan dan Struktur Cagar Budaya 7 Tata Cara Pembersihan Situs dan Lingkungannya 8 Tata Cara Perawatan dan Pembersihan Situs dan Fasilitasnya 9 Pembersihan Cagar Budaya Secara Manual Kering atau Basah
119	Kasab Deck Kapal Kelas I	Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
120	Kasab Deck Kapal Kelas II	Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
121	Kasab Mesin Kapal Kelas I	Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
122	Kataloger Pemula	1 Permenhan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kodifikasi Sistem NSN
		2 Prosedur kodifikasi secara teknis di lingkungan Kemhan dan TNI
		3 Program pengembangan teknologi industri pertahanan
123	Kelasi Kapal Kelas I	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
124	Kelasi Kapal Kelas II	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
125	Kelasi Kapal Kelas III	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
		Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
126	Kelasi Kapal Kelas IV	5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
		Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
		2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
127	Kelasi Kapal Kelas V	Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
		2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
		2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
128	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas III	Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
		2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
		2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
129	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas IV	Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
		2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
		2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
130	Kepala Kamar Mesin Kapal Kelas V	Kemampuan Umum: 1 Matematika Dasar 2 Bahasa Inggris Maritim 3 Teknologi Informatika 4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 5 Sistem Manajemen Kapal Kemampuan Khusus: 1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional 2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal 3 Mesin Penggerak Utama 4 Mesin Bantu 5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol 6 Ilmu Bahan 7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
131	Kerani Kapal Kelas I	Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
132	Kerani Kapal Kelas II	Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-undang Terkait 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
133	Kerani Kapal Kelas III	Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
134	Konselor Adiksi Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi nasional dan internasional tentang rehabilitasi
		2 Pengetahuan tentang komunikasi efektif di bidang P4GN
		3 Pengetahuan adiksi narkoba
		Kompetensi Khusus:
		1 Skrining
		2 Penerimaan awal
		3 Asesmen
		4 Rencana rawatan
		5 Rancangan edukasi
		6 Edukasi
		7 Konseling individu
		8 Konseling kelompok
		9 Intervensi keluarga
135	Konselor SDM	10 Penanganan krisis
		11 Konferensi kasus
		12 Konsultasi dan koordinasi
		13 Supervisi layanan
		14 Pencatatan dan pelaporan
		Kemampuan Umum:
		1 Regulasi mengenai kepegawaian
		2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN
		5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
		7 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
		8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
		9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
		Kompetensi Khusus:
		1 Teori motivasi
		2 Teori hierarki kebutuhan
		3 Teori kinerja
		4 Teori pelayanan dan Teori kepuasan pelanggan
		5 Teori manajemen
		6 Unsur-unsur manajemen
		7 Teori human capital
		8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
		9 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK
		10 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
		11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS
		12 Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK
		13 SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan
		14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
		15 Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 jo. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS
		16 Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
		17 Kosep dasar bimbingan dan konseling
		18 Tujuan, Prinsip, asas dan fungsi bimbingan dan konseling
		19 Ragam bimbingan dan konseling menurut masalah
		20 Kualitas pribadi konselor
		21 Keterampilan pendekatan strategi dan teknik dalam bimbingan dan konseling
		22 Manajemen konflik
		23 Strategi revolusi konflik dan bentuk intervensi konflik
		24 Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS
136	Konservator	1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya
		2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
		5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
137	Konstabel Kapal Kelas I	Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksananya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
138	Konstabel Kapal Kelas II	Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksananya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
139	Konsultan Industri	Kemampuan Umum: 1 Wawasan tentang industri dan perannya dalam perekonomian 2 Undang-Undang Perindustrian Kemampuan Khusus: 1 Identifikasi Kebutuhan Konsultasi Industri 2 Perancangan Konsultasi Industri 3 Industri Berbasis Sumber Daya Alam 4 Industri Hijau, Circular Ekonomi, dan Zero Waste 5 Produk Dalam Negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 6 Jasa Industri dan Rantai Nilai Global 7 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Industri 8 Industri Halal 9 Fasilitas Fiskal dan Nonfiskal 10 Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan Kebijakan Satu Data 11 Industri Strategis 12 Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI) 13 Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0 14 Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key Project
140	Kurator	1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
		5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
141	Kurator Keperdataan Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Kemampuan Khusus: 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.02-HT.05.10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2013 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang Milikinya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan yang Tidak Terurus yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
142	Kurator Koleksi Hayati Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Pengenalan Kurator Koleksi Hayati 2 Manajemen Koleksi Kompetensi Khusus: 1 Eksplorasi Koleksi Keanekaragaman Hayati 2 Teknik Handling Spesimen dan/atau Kultur Koleksi 3 Dasar-Dasar Analisis Koleksi 4 Perawatan Spesimen dan/atau Kultur Koleksi dan Fasilitas Pendukung Koleksi 5 Pelaporan Koleksi Hayati
143	Mandor Mesin Kapal Kelas I	Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
144	Manggala Agni Terampil	Kemampuan Umum: 1 Wawasan regulasi terkait lingkungan hidup dan kehutanan 2 Wawasan regulasi terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan 3 Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan jabatan fungsional Manggala Agni 4 Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan 5 Wawasan umum terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan Kemampuan Khusus: 1 Pendampingan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 2 Pemeliharaan sekat bakar, sekat kanal, embung, kantong air, atau bangunan air lainnya 3 Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan dan lahan 4 Pengelolaan sistem peringatan dan deteksi dini 5 Penatalaksanaan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan 6 Pengecekan lapangan informasi kebakaran hutan dan lahan (groundcheck hotspot) 7 Penatalaksanaan pemadaman darat 8 Dukungan pemadaman udara 9 Evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran hutan dan lahan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		10 Inventarisasi areal bekas kebakaran hutan dan lahan
		11 Inovasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan
145	Manggala Informatika Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Konsep dasar TIK
		2 Sistem komputer
		3 Jaringan komputer
		4 Sistem informasi
		5 Kriptografi
		Kemampuan Khusus:
		1 Budaya Kaminfo
		2 Manajemen risiko
		3 Standar dan Regulasi Kaminfo
146	Markonis Kapal Kelas I	Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
		2 Fisika Terapan
		3 Bahasa Inggris Maritim
		4 Teknologi Informatika
		5 Sistem Manajemen Kapal
		6 Budaya Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Sistem Navigasi Elektronik
		3 P2TL dan Dinas Jaga
		4 Prosedur Darurat dan SAR
		5 Ilmu Pelayaran Datar
		6 Isyarat Visual
		7 Teknik Radio
		8 Perjanjian Internasional terkait Komunikasi (ITC dan SOLAS)
		9 Peraturan Radio
		10 Service Document
		11 Telepon Radio
		12 GMDSS
147	Markonis Kapal Kelas II	Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
		2 Fisika Terapan
		3 Bahasa Inggris Maritim
		4 Teknologi Informatika
		5 Sistem Manajemen Kapal
		6 Budaya Keselamatan, Keamanan, dan Pelayanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Sistem Navigasi Elektronik
		3 P2TL dan Dinas Jaga
		4 Prosedur Darurat dan SAR
		5 Ilmu Pelayaran Datar
		6 Isyarat Visual
		7 Teknik Radio
		8 Perjanjian Internasional terkait Komunikasi (ITC dan SOLAS)
		9 Peraturan Radio
		10 Service Document
		11 Telepon Radio
		12 GMDSS
148	Masinis I Kapal Kelas I	Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
		2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
149	Masinis I Kapal Kelas III	Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
		2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
150	Masinis I Kapal Kelas IV	2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
151	Masinis II Kapal Kelas I	2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
152	Masinis II Kapal Kelas II	2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
153	Masinis II Kapal Kelas III	2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
154	Masinis III Kapal Kelas I	2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
155	Masinis III Kapal Kelas II	Kemampuan Umum:
		1 Matematika Dasar
		2 Bahasa Inggris Maritim
		3 Teknologi Informatika
		4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		5 Sistem Manajemen Kapal
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional
		2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		3 Mesin Penggerak Utama
		4 Mesin Bantu
		5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol
		6 Ilmu Bahan
		7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
		Kemampuan Khusus:
		1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
156	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	2 Hubungan Kerja
		3 Perjanjian Kerja
		4 Peraturan Perusahaan
		5 Perjanjian Kerja Bersama
		6 Pengupahan
		7 Program JAMSOS
		8 Organisasi Pengusaha
		9 Serikat Pekerja/Serikat Buruh
		10 LKS Bipartit dan LKS Tripartit
		11 Dewan Pengupahan
		12 Pemasyarakatan Hubungan Industrial
		13 Pemetaan dan Kerawanan Deteksi Dini
		14 Mogok dan Lock Out
		15 Perselisihan Industrial
		16 Teknis Mediasi Perselisihan Industrial
		17 Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
		4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
		5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
		6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
157	Medik Veteriner Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
		Kompetensi Khusus:
		1 Tatacara pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
158	Metrolog Ahli Pertama	2 Identifikasi status reproduksi dan penanganan reproduksi dan kebidanan pada hewan
		Kemampuan Umum:
		Penyediaan dan pengembangan standar pengukuran atau bahan acuan
		Kemampuan Khusus:
159	Mualim I Kapal Kelas I	1 Pemeliharaan standar pengukuran atau bahan acuan
		2 Pelaksanaan diseminasi standar pengukuran atau bahan acuan
		3 Pemenuhan pengakuan nasional atau internasional standar pengukuran atau bahan acuan
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Terapan
		2 Fisika Terapan
		3 Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Pelayaran Datar
		2 Ilmu Pelayaran Astronomi
		3 Sistem Navigasi Elektronik
		4 Kompas dan Sistem Kemudi
		5 Meteorologi
		6 Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7 Dinas Jaga
		8 Prosedur Darurat dan SAR
		9 Isyarat Visual
		10 Olah Gerak Kapal
		11 Penanganan dan Pengaturan Muatan
		12 Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
		13 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		14 Pemadaman Kebakaran di Kapal
		15 Teknik Penyelamatan diri

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
160	Mualim I Kapal Kelas II	16 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
		17 Regulasi Pelayaran
		18 Kepemimpinan dan Kerja sama tim
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Terapan
		2 Fisika Terapan
		3 Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Pelayaran Datar
		2 Ilmu Pelayaran Astronomi
		3 Sistem Navigasi Elektronik
		4 Kompas dan Sistem Kemudi
		5 Meteorologi
		6 Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7 Dinas Jaga
		8 Prosedur Darurat dan SAR
		9 Isyarat Visual
		10 Olah Gerak Kapal
161	Mualim I Kapal Kelas III	11 Penanganan dan Pengaturan Muatan
		12 Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
		13 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		14 Pemadaman Kebakaran di Kapal
		15 Teknik Penyelamatan diri
		16 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
		17 Regulasi Pelayaran
		18 Kepemimpinan dan Kerja sama tim
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Terapan
		2 Fisika Terapan
		3 Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Pelayaran Datar
		2 Ilmu Pelayaran Astronomi
		3 Sistem Navigasi Elektronik
		4 Kompas dan Sistem Kemudi
162	Mualim I Kapal Kelas IV	5 Meteorologi
		6 Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7 Dinas Jaga
		8 Prosedur Darurat dan SAR
		9 Isyarat Visual
		10 Olah Gerak Kapal
		11 Penanganan dan Pengaturan Muatan
		12 Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
		13 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		14 Pemadaman Kebakaran di Kapal
		15 Teknik Penyelamatan diri
		16 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
		17 Regulasi Pelayaran
		18 Kepemimpinan dan Kerja sama tim
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Terapan
		2 Fisika Terapan
163	Mualim II Kapal Kelas I	3 Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Pelayaran Datar
		2 Ilmu Pelayaran Astronomi
		3 Sistem Navigasi Elektronik
		4 Kompas dan Sistem Kemudi
		5 Meteorologi
		6 Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7 Dinas Jaga
		8 Prosedur Darurat dan SAR
		9 Isyarat Visual
		10 Olah Gerak Kapal
		11 Penanganan dan Pengaturan Muatan
		12 Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
		13 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		14 Pemadaman Kebakaran di Kapal
		15 Teknik Penyelamatan diri
		16 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
		17 Regulasi Pelayaran
		18 Kepemimpinan dan Kerja sama tim
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Terapan
		2 Fisika Terapan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Pelayaran Datar
		2 Ilmu Pelayaran Astronomi
		3 Sistem Navigasi Elektronik
		4 Kompas dan Sistem Kemudi
		5 Meteorologi
		6 Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7 Dinas Jaga
		8 Prosedur Darurat dan SAR
		9 Isyarat Visual
		10 Olah Gerak Kapal
		11 Penanganan dan Pengaturan Muatan
		12 Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
		13 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		14 Pemadaman Kebakaran di Kapal
		15 Teknik Penyelamatan diri
		16 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
164	Mualim II Kapal Kelas II	17 Regulasi Pelayaran
		18 Kepemimpinan dan Kerja sama tim
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Terapan
		2 Fisika Terapan
		3 Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Pelayaran Datar
		2 Ilmu Pelayaran Astronomi
		3 Sistem Navigasi Elektronik
		4 Kompas dan Sistem Kemudi
		5 Meteorologi
		6 Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7 Dinas Jaga
		8 Prosedur Darurat dan SAR
		9 Isyarat Visual
		10 Olah Gerak Kapal
		11 Penanganan dan Pengaturan Muatan
165	Mualim II Kapal Kelas III	12 Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
		13 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		14 Pemadaman Kebakaran di Kapal
		15 Teknik Penyelamatan diri
		16 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
		17 Regulasi Pelayaran
		18 Kepemimpinan dan Kerja sama tim
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Terapan
		2 Fisika Terapan
		3 Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Pelayaran Datar
		2 Ilmu Pelayaran Astronomi
		3 Sistem Navigasi Elektronik
		4 Kompas dan Sistem Kemudi
		5 Meteorologi
		6 Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
166	Mualim III Kapal Kelas I	7 Dinas Jaga
		8 Prosedur Darurat dan SAR
		9 Isyarat Visual
		10 Olah Gerak Kapal
		11 Penanganan dan Pengaturan Muatan
		12 Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
		13 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		14 Pemadaman Kebakaran di Kapal
		15 Teknik Penyelamatan diri
		16 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
		17 Regulasi Pelayaran
		18 Kepemimpinan dan Kerja sama tim
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Terapan
		2 Fisika Terapan
		3 Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Pelayaran Datar
		2 Ilmu Pelayaran Astronomi
		3 Sistem Navigasi Elektronik
		4 Kompas dan Sistem Kemudi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Meteorologi
		6 Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7 Dinas Jaga
		8 Prosedur Darurat dan SAR
		9 Isyarat Visual
		10 Olah Gerak Kapal
		11 Penanganan dan Pengaturan Muatan
		12 Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
		13 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		14 Pemadaman Kebakaran di Kapal
		15 Teknik Penyelamatan diri
		16 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
		17 Regulasi Pelayaran
		18 Kepemimpinan dan Kerja sama tim
167	Mualim III Kapal Kelas II	Kemampuan Umum:
		1 Matematika Terapan
		2 Fisika Terapan
		3 Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Pelayaran Datar
		2 Ilmu Pelayaran Astronomi
		3 Sistem Navigasi Elektronik
		4 Kompas dan Sistem Kemudi
		5 Meteorologi
		6 Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7 Dinas Jaga
		8 Prosedur Darurat dan SAR
		9 Isyarat Visual
		10 Olah Gerak Kapal
		11 Penanganan dan Pengaturan Muatan
		12 Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
168	Nakhoda Kapal Kelas III	Kemampuan Umum:
		1 Matematika Terapan
		2 Fisika Terapan
		3 Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Pelayaran Datar
		2 Ilmu Pelayaran Astronomi
		3 Sistem Navigasi Elektronik
		4 Kompas dan Sistem Kemudi
		5 Meteorologi
		6 Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7 Dinas Jaga
		8 Prosedur Darurat dan SAR
		9 Isyarat Visual
		10 Olah Gerak Kapal
		11 Penanganan dan Pengaturan Muatan
		12 Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
169	Nakhoda Kapal Kelas IV	Kemampuan Umum:
		1 Matematika Terapan
		2 Fisika Terapan
		3 Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Pelayaran Datar
		2 Ilmu Pelayaran Astronomi
		3 Sistem Navigasi Elektronik
		4 Kompas dan Sistem Kemudi
		5 Meteorologi
		6 Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7 Dinas Jaga
		8 Prosedur Darurat dan SAR
		9 Isyarat Visual
		10 Olah Gerak Kapal

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		11 Penanganan dan Pengaturan Muatan
		12 Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
		13 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		14 Pemadaman Kebakaran di Kapal
		15 Teknik Penyelamatan diri
		16 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
		17 Regulasi Pelayaran
		18 Kepemimpinan dan Kerja sama tim
		Kemampuan Umum:
		1 Matematika Terapan
		2 Fisika Terapan
		3 Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Pelayaran Datar
		2 Ilmu Pelayaran Astronomi
		3 Sistem Navigasi Elektronik
		4 Kompas dan Sistem Kemudi
170	Nakhoda Kapal Kelas V	5 Meteorologi
		6 Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut
		7 Dinas Jaga
		8 Prosedur Darurat dan SAR
		9 Isyarat Visual
		10 Olah Gerak Kapal
		11 Penanganan dan Pengaturan Muatan
		12 Kepedulian Lingkungan dan Pencegahan Polusi
		13 Konstruksi dan Stabilitas Kapal
		14 Pemadaman Kebakaran di Kapal
		15 Teknik Penyelamatan diri
		16 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan
		17 Regulasi Pelayaran
		18 Kepemimpinan dan Kerja sama tim
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyajian data dan informasi perdagangan serta penjelasan terkait data dan informasi perdagangan yang menjadi kewenangannya
171	Negosiator Perdagangan Ahli Pertama	2 Analisis bahan kerjasama perdagangan internasional
		3 Advokasi kebijakan, monitoring dan evaluasi hasil advokasi
		4 Analisis posisi runding dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait sesuai dengan prosedur kerja yang ada
		5 Isu yang relevan terkait perundingan/kerja sama perdagangan internasional di kawasan atau mitra dagang (ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan)
		6 Analisis bahan untuk aktivasi perjanjian internasional sesuai dengan pedoman yang berlaku
		Kompetensi Umum:
172	Nutrisionis Ahli Pertama	Keputusan Menkes RI No. HK.01.07/Menkes/1910/2022 tentang Standar Profesi Dietisien dan Permenkes No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
		2 Asuhan gizi klinik (clinical nutrition)
		3 Kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah masing-masing di Indonesia
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengelolaan masalah gizi
		2 Pemantauan/surveilans gizi
		3 Pemberdayaan dan kolaborasi dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat gizi dan kesehatan
		4 Asuhan gizi individu, kelompok dan masyarakat
		5 Pengelolaan sistem penyelenggaraan makanan (food service)
		6 Pengelolaan sumber daya lokal, bisnis gizi (nutripreneurship)
		Keterampilan Umum:
173	Nutrisionis Terampil	1 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengelolaan asuhan gizi
		2 Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pengelolaan gizi masyarakat
		3 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyelenggaraan makanan
		Keterampilan Khusus:
		1 Pengelolaan asuhan gizi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		2 Penyelenggaraan, pembimbingan pelaksanaan atau penyusunan peta jalan penyusunan/pemanfaatan/penggunaan
		3 Konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, serta tata cara prosedur pengelolaan gizi masyarakat
		4 Pengelolaan asuhan gizi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		5 Penyelenggaraan dan pembimbingan pelaksanaan gizi masyarakat atau penyusunan, pemanfaatan, atau penggunaan peta jalan
		6 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyelenggaraan makanan
		7 Pengelolaan asuhan gizi sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis
		8 Penyelenggaraan dan pembimbingan penyelenggaraan makanan atau penyusunan, pemanfaatan, atau penggunaan peta jalan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
174	Okupasi Terapis Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
		2 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang ASN
		3 PMK No 76 tentang Standar Layanan Terapi Okupasi
		4 SK IOTI No 134/Skep/IOTI.PUSAT/V/2021 Tentang perubahan Kode Etik Okupasi Terapis
		Kemampuan Khusus:
		1 Screening
		2 Pemeriksaan ADLs
		3 Pemeriksaan IADLs
		4 Pemeriksaan kesadaran sensori
		5 Pemeriksaan taktil
		6 Pemeriksaan proprioseptif
		7 Pemeriksaan Vestibular
		8 Pemeriksaan Visual
		9 Pemeriksaan Pendengaran
		10 Pemeriksaan pengecap
		11 Pemeriksaan stereognosis
		12 Pemeriksaan kinesthesia
		13 Pemeriksaan respon nyeri.
		14 Pemeriksaan skema tubuh.
		15 Pemeriksaan diskriminasi sisi kanan- kiri.
		16 Pemeriksaan konstansi bentuk.
		17 Pemeriksaan posisi dalam ruang
		18 Pemeriksaan Visual-Closure.
		19 Pemeriksaan persepsi latar depan dan belakang.
		20 Pemeriksaan persepsi kedalaman/jarak.
		21 Pemeriksaan hubungan spasial.
		22 Pemeriksaan orientasi topografi.
		23 Pemeriksaan biomekanik penunjang okupasional
		24 Pemeriksaan neuromuscular penunjang okupasional
		25 Pemeriksaan reflex penunjang okupasional
		26 Pemeriksaan koordinasi motorik kasar penunjang okupasional
		27 Pemeriksaan menyilang garis tengah tubuh penunjang okupasional
		28 Pemeriksaan lateralitas penunjang okupasional
		29 Pemeriksaan integrasi bilateral penunjang okupasional
		30 Pemeriksaan kontrol gerak penunjang okupasional
		31 Pemeriksaan praksis
		32 Pemeriksaan koordinasi gerak halus/dexteritas
		33 Pemeriksaan integrasi visual motor
		34 Pemeriksaan orientasi
		35 Pemeriksaan recognisi
		36 Pemeriksaan rentang atensi
		37 Pemeriksaan memori
		38 Pemeriksaan sekuensis
		39 Pemeriksaan kategorisasi
		40 Pemeriksaan keterampilan pre-akademik
		41 Pemeriksaan konsep diri
		42 Pemeriksaan kinerja peran
		43 Pemeriksaan partisipasi sosial
		44 Pemeriksaan keterampilan interpersonal
		45 Identifikasi potensi dan limitasi/restriksi komponen kinerja okupasional
		46 Penegakan diagnosis Okupasi Terapi
		47 Menentukan prognosis fungsional
		48 Menentukan tujuan terapi berbasis komponen kinerja okupasional
		49 Menentukan tujuan area kinerja okupasional
		50 Menentukan tujuan area kinerja okupasional
		51 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi gangguan sensomotorik penunjang okupasional
		52 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi gangguan integrasi sensori
		53 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi pemrosesan persepsi penunjang okupasional
		54 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi gangguan biomekanik penunjang okupasional
		55 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi gangguan neuromuskular penunjang okupasional
		56 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi gangguan integrasi kognitif penunjang okupasional
		57 Penanganan Okupasi Terapi pada kondisi psikososial penunjang okupasional
		58 Penerapan teknologi dan alat bantu fungsional.
		59 Menyusun laporan hasil pemeriksaan
		60 Menyusun Laporan kemajuan intervensi
		61 Menyusun Laporan penghentian/kelanjutan terapi
		62 Membuat laporan dan dokumentasi diagnosis okupasi terapi
		63 Melakukan komunikasi terapeutik terapi okupasional
		64 Memberikan edukasi dan informasi terapi okupasional
175	Operator Alat Berat	Kompetensi Umum:
		1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Umum
		2 Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Pengoperasian Alat Berat
		Kompetensi Khusus:
		Pengoperasian Alat Berat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
176	Operator Layanan Kesehatan	Kemampuan Umum:
		1 Permenkes Nomor 27 Tahun 2017
		2 Permenkes Nomor 71 Tahun 2015
		3 Permenkes Nomor 45 Tahun 2014
		4 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Ttg Kesehatan
		5 Bentuk Pelayanan Primer Menurut UU Kesehatan
		6 Ciri Fasyankes Utama menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2023
		7 Peran Dan Fungsi BPJS
		8 Alur Rujukan BPJS
		9 Menyebutkan Jenis-Jenis Rujukan Kesehatan
		10 Jenis Layanan Kesehatan Di Rumah Sakit Tipe A
		11 Peraturan Perundangan Tentang ASN
		12 Karakteristik ASN
		13 Kode Etik ASN
		14 Hak Dan Kewajiban ASN
		15 Konsep Penegakan Disiplin
		16 Nilai Dasar ASN
		17 Larangan Bagi PNS
		18 Jenis Hukuman Disiplin Bagi PNS Yang Melanggar Aturan
		19 Mencegah korupsi/menolak gratifikasi/penyuapan
		20 Tindakan yang termasuk korupsi/gratifikasi di RS
		21 Jenis-jenis korupsi
		Kemampuan Khusus:
		1 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings
		2 Standard precautions for the prevention and control of infections 2022 Permenkes Nomor 27 Tahun 2017
		3 Permenkes Nomor 45 Tahun 2014
		4 Permenkes Nomor 27 Tahun 2017
		5 Buku Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru 15 Apr 2021
		6 Management of needlestick injuries and exposures to blood and high-risk body fluids, NHS GG&C Clinical Guideline / Permenkes Nomor 27 Tahun 2017
		7 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016
		8 Permen LH Nomor 14 Tahun 2013
		9 Permen LHK Nomor P.12 Tahun 2020
		10 Permenkes Nomor 66 Tahun 2016 / Occupational health and safety risks in the healthcare sector, European Union, 2011
		11 Pengertian Komunikasi Efektif Pasien - Petugas
		12 Ciri Komunikasi Efektif Antara Pasien – Petugas Kesehatan
		13 Teknik Komunikasi Pada Pasien Baru
		14 Komunikasi Non Verbal Pada Pasien
		15 Tahapan Komunikasi Petugas -Pasien
		16 Teknik Komunikasi Dengan Atasan/Pimpinan
		17 Cara Meminta Maaf Kepada Pasien Atau Pimpinan
		18 Teknik Pemberian Informasi Umum RS Kepada Pasien Dan Keluarga
		19 Hambatan/Kendala Dalam Berkomunikasi
		20 Hak -Hak Pasien Di RS
		21 Kewajiban Petugas Kesehatan Di Yankes
		22 Pengertian Pelayanan Prima Di RS
		23 Tujuan Pelayanan Prima/Service Excellent
		24 Manfaat Pelayanan Prima Bagi Yankes
		25 Unsur/ Komponen Pokok Dalam Pelayanan Prima
		26 Upaya Pelayanan Prima Yang Di Lakukan RS
		27 Pengertian Sikap Caring Yang Harus Dimiliki Tenaga Kesehatan
		28 Perilaku Caring Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan
		29 Manfaat perilaku caring terhadap pasien dan petugas kesehatan
		30 Hubungan Antara Menjaga Penampilan Dan Pelayanan Prima
		31 Cara Membina Hubungan Baik Dengan Pasien
		32 Sikap Positif Dalam Menghadapi Pasien Dan Tenaga Kesehatan Lain
		33 Cara/ Teknik Menjaga Emosi/ Performance Saat Menghadapi Pasien Yang Komplain
		34 Sikap Dan Perilaku Yang Sesuai Dengan Prinsip Pokok Dalam Pelayanan Prima
		35 Perbedaan Antara Pelayanan Barang Dan Jasa
		36 Upaya Yang Dapat Dilakukan Petugas Untuk Meningkatkan Layanan
177	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terampil	Pengetahuan Umum:
		1 Materi umum terkait Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat, Dasar Negara, dan Undang-Undang Dasar
		2 Materi tentang Pemerintahan Pusat-Daerah, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersifat Umum
		3 Materi tentang Pengetahuan Komputer yang bersifat umum
		Pengetahuan Khusus:
		1 Materi khusus terkait Administrasi Kependudukan yang bersifat khusus
		2 Materi tentang Pencatatan Sipil yang bersifat khusus
		3 Materi tentang Pengetahuan Teknis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Operator SIAK
178	Ortotis Prostetis Terampil	Kemampuan Umum:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 Pengetahuan tentang patologi Cerebral Palsy
		2 Pengetahuan tentang patologi Stroke
		3 Pengetahuan tentang patologi Polio, CTEV dan congenital disease lainnya
		4 Pengetahuan tentang patologi Diabetes
		5 Patologi pada spinal ortotik
		6 Pengetahuan terkait amputasi pada ekstremitas bawah
		7 Pengetahuan terkait amputasi pada ekstremitas atas
		8 Pengetahuan dasar terkait material dan bahan pembuatan prosthesis ortosis
		9 Pengetahuan dasar komponen ortosis
		10 Pengetahuan dasar komponen prosthesis
		11 Pengetahuan anatomi tulang ekstremitas atas
		12 Pengetahuan anatomi tulang ekstremitas bawah
		13 Pengetahuan anatomi tulang area spinal/tulang belakang
		14 Pengetahuan anatomi otot ekstremitas atas
		15 Pengetahuan anatomi otot ekstremitas bawah
		16 Pengetahuan anatomi persendian pada tubuh manusia
		17 Pengetahuan mengenai peralatan, mesin, dan prinsip K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
		18 Pengetahuan konsep dasar Biomekanik
		Kemampuan Khusus:
		1 Asesmen (subjektif dan objektif) FO
		2 Penentuan Preskripsi FO
		3 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) FO
		4 Proses rektifikasi FO
		5 Proses fabrikasi FO
		6 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) FO
		7 Asesmen (subjektif dan objektif) AFO
		8 Penentuan Preskripsi AFO
		9 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) AFO
		10 Proses rektifikasi AFO
		11 Proses fabrikasi AFO
		12 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) AFO
		13 Asesmen (subjektif dan objektif) KO/HO/KAFO/HKAFO
		14 Penentuan Preskripsi KO/HO/KAFO/HKAFO
		15 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) KO/HO/KAFO/HKAFO
		16 Proses rektifikasi KO/HO/KAFO/HKAFO
		17 Proses fabrikasi KO/HO/KAFO/HKAFO
		18 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) KO/HO/KAFO/HKAFO
		19 Asesmen (subjektif dan objektif) ULO
		20 Penentuan Preskripsi ULO
		21 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) ULO
		22 Proses rektifikasi ULO
		23 Proses fabrikasi ULO
		24 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) ULO
		25 Asesmen (subjektif dan objektif) SO
		26 Penentuan Preskripsi SO
		27 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) SO
		28 Proses fabrikasi SO
		29 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) SO
		30 Asesmen (subjektif dan objektif) HDP
		31 Penentuan Preskripsi HDP
		32 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) HDP
		33 Asesmen (subjektif dan objektif) ADP
		34 Penentuan Preskripsi ADP
		35 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) ADP
		36 Proses rektifikasi ADP
		37 Proses fabrikasi ADP
		38 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) ADP
		39 Asesmen (subjektif dan objektif) TTP
		40 Penentuan Preskripsi TTP
		41 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) TTP
		42 Proses rektifikasi TTP
		43 Proses fabrikasi TTP
		44 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) TTP
		45 Asesmen (subjektif dan objektif) KDP
		46 Penentuan Preskripsi KDP
		47 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) KDP
		48 Proses rektifikasi KDP
		49 Proses fabrikasi KDP
		50 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) KDP
		51 Asesmen (subjektif dan objektif) TFP
		52 Penentuan Preskripsi TFP
		53 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) TFP
		54 Proses rektifikasi TFP
		55 Proses fabrikasi TFP
		56 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) TFP

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		57 Asesmen (subjektif dan objektif) ULP
		58 Penentuan Preskripsi ULP
		59 Pengukuran dan pencetakan (measurement & casting) ULP
		60 Proses rektifikasi ULP
		61 Proses fabrikasi ULP
		62 Fitting (pengepasan alat bantu, static fitting, dynamic fitting) ULP
179	Pamong Budaya Ahli Pertama	1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
		2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
		5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
		6 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2027 tentang Pemajuan Kebudayaan
		7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda
		9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
		10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
		11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri
		12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya
		13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
180	Pamong Budaya Terampil	1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
		2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		3 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film
		5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
		6 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2027 tentang Pemajuan Kebudayaan
		7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 th 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda
		9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
		10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
		11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengutamaan Film Indonesia dan Pengutamaan Penggunaan Sumber Daya Dalam Negeri
		12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pamong Budaya
		13 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum
		14 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
181	Pamong Pemerintahan	Kemampuan Umum:
		1 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
		2 Macam Sistem Pemerintahan di Indonesia
		3 Wawasan Nusantara/Kesadaran Nasional
		Kemampuan Khusus:
		1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
182	Paramedik Veteriner Pemula	Kompetensi Umum:
		Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
		Kompetensi Khusus:
		1 Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
183	Paramedik Veteriner Terampil	2 Tatacara pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
		3 Identifikasi status reproduksi dan penanganan reproduksi dan kebidanan pada hewan
		Kompetensi Umum:
		Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
		Kompetensi Khusus:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 Prosedur Tatacara Penanganan, Pemeliharaan dan Pemeriksaan bidang Keswan, Kesmavet, dan Kesrawan
		2 Tatacara pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis
		3 Identifikasi status reproduksi dan penanganan reproduksi dan kebidanan pada hewan
184	Pawang Anjing Pelacak	Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan umum tentang anjing 2 Pengetahuan umum tentang kesehatan anjing Kemampuan Khusus: 1 Pengetahuan umum tentang perawatan anjing 2 Pengetahuan khusus tentang bekerja dengan anjing
185	Pekerja Sosial Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial 2 Advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi Kompetensi Khusus: 1 Penyimpan bahan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis terkait Manajemen Pekerjaan Sosial 2 Analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis 3 Penyusunan rancangan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial 4 Penerapan layanan pekerjaan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis 5 Pemahaman konsep pembinaan dan pengawasan pekerja sosial
186	Pelatih dan Perawat Satwa Liar	Kemampuan Umum: 1 UU No 5 Tahun 1990 tentang KSDAE 2 UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 3 Permenhut 48/2008 tentang Penanganan Konflik Satwa Liar 4 Permen LHK No 106/2018 tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi 5 PP No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa 6 Permen LHK No 22/2019 tentang LK 7 UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN 8 PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Kemampuan Khusus: 1 Kesehatan satwa 2 Feeding satwa 3 Pemeliharaan satwa 4 Kandang satwa 5 Perawatan satwa 6 Perilaku satwa 7 Reproduksi 8 Dokumentasi/pencatatan satwa 9 Konflik manusia dengan satwa liar 10 Populasi 11 Habitat 12 Penanganan satwa 13 Pelepasliaran 14 Pelatihan satwa
187	Pelatih Olahraga Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan tentang Olahraga 2 UU Keolahragaan Tahun 2022 3 Permenpora Tahun 2023 DOD 4 Perpres Tahun 2021 DBON Kemampuan Khusus: 1 Faal dan Fisiologi Tubuh 2 Identifikasi Psikologis Atlet 3 Ilmu Kepelatihan Olahraga
188	Pemadam Kebakaran Pemula	Kompetensi Umum: 1 Teori Segitiga Api 2 Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3 Kesiapsiagaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4 Keselamatan Petugas dan Penggunaan Self Contained Breathing Apparatus (SCBA) Kompetensi Khusus: 1 Operasional Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 Tali Temali dan Penyelamatan 3 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (PPPK)
189	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Hukum kesehatan dan perundangan K3 2 Etika dan Kode Etik Profesi 3 Komunikasi K3 4 Management Patient Safety Kompetensi Khusus: 1 Surveilans Kesehatan Kerja 2 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 3 Manajemen Risiko di Tempat Kerja 4 Pembimbingan dan Pendampingan Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja 5 Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pekerja dan Kemitraan
190	Pembina Industri Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Wawasan tentang industri dan peranannya dalam perekonomian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Undang-Undang Perindustrian, RIPIN, KIN dan peraturan lain yang terkait dengan Pembangunan Industri Nasional
		Kemampuan Khusus:
		1 Perencanaan pembangunan nasional, pembangunan sumber daya industri, dan Bangun Industri Nasional
		2 Standar Produk dan Standar Kompetensi (SNI dan SKKNI)
		3 Konsepsi, Sejarah, dan Penerapan Industri 4.0, Making Indonesia 4.0, dan INDI 4.0
		4 Konsepsi Teknologi Industri, Manfaat Penggunaan, Technology Readiness Level (TRL), dan Turn Key Project
		5 Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri
		6 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu, serta Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)
		Kompetensi Umum:
		1 Manajemen Kontrak Konstruksi
191	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	2 Manajemen Risiko Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
		3 Kebijakan Publik
		4 Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah
		5 Statistik Movev dan Pelaporan
		6 Manajemen Lingkungan Pekerjaan Konstruksi
		Kompetensi Khusus:
		1 Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi
		2 Pengembangan Kerjasama Jasa Konstruksi Strategis Di Dalam Dan Luar Negeri
		3 Manajemen Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi
		4 Manajemen Pengembangan Pasar Jasa Konstruksi
		5 Pembinaan Perizinan Berusaha Jasa Konstruksi
		6 Manajemen Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
		7 Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) Bidang Jasa Konstruksi
		8 Pembinaan Penyetaraan Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi
		9 Manajemen Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Konstruksi
		10 Manajemen Rantai Pasok Material Dan Peralatan Konstruksi
192	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama	11 Manajemen Pengembangan Teknologi Konstruksi
		12 Manajemen Peningkatan Penggunaan Komponen Dalam Negeri
		13 Manajemen Pengembangan Kelembagaan Jasa Konstruksi
		14 Manajemen K3 Konstruksi
		15 Manajemen Penjaminan Dan Pengendalian Mutu Konstruksi
		16 Manajemen Konstruksi Hijau
		Kemampuan Umum:
		Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan
193	Pemelihara Tumbuhan	2 Proses perumusan standar produk kelautan dan perikanan
		3 Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
		4 Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan
		5 Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
		2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990
		3 Permen LHK No. 23 Tahun 2021
		4 Perdirjen PDASHL No. P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019
		5 Vademecum Kehutanan Indonesia 2020
194	Pemeriksa Ahli Pertama	Kemampuan Khusus:
		1 Proses Bisnis Pemerintah Pusat/KL
		2 Proses Bisnis Pemerintah Daerah
		3 Sistem Pengendalian Intern (SPI)
		4 Pengelolaan Keuangan Negara (UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004)
		5 Pengelolaan Keuangan Daerah (UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004)
		6 Aspek Hukum Dalam Pemeriksaan (UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 38 Tahun 2016, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		7 Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
		8 Advokasi Pemeriksaan
		9 Pelaporan Pemeriksaan
		10 Auditing - Pengolahan Data
		Kemampuan Umum:
		1 Sejarah BPK
		2 Lembaga BPK
		3 ASN BPK (Fungsional Pemeriksa)
		4 Kode Etik dan Budaya IIP (Integritas, Independensi dan Profesionalisme)
		5 Bahasa Indonesia dalam Penyusunan Laporan
		6 Dasar Komunikasi dalam Pemeriksaan
		7 Matematika Dasar
		8 Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Umum
195	Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Definisi desain industri
		2 Juknis pemeriksaan desain industri
		3 Klasifikasi Locamo
		4 Pengetahuan umum tentang Kekayaan Intelektual
		5 Pengetahuan umum tentang seni atau desain
		6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005
		7 TRIPS Agreement
		8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
		Kemampuan Khusus:
		1 Definisi desain industri
		2 Juknis pemeriksaan desain industri
		3 Klasifikasi Locamo
		4 Ketentuan terkait kejelasan dan kesatuan desain industri
		5 Pengetahuan umum tentang Kekayaan Intelektual
		6 Pengetahuan umum tentang seni atau desain
		7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005
		8 TRIPS Agreement
		9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
196	Pemeriksa Forensik Digital	Kemampuan Umum:
		1 Prinsip Dasar Forensik Digital
		2 Pengumpulan Bukti Digital
		3 Analisis Data Digital
		4 Penanganan dan Pelestarian Bukti Digital
		5 Enkripsi dan Forensik
		6 Penggunaan Alat Forensik Digital
		7 Etika dalam Forensik Digital
		8 Hukum dan Regulasi yang Berlaku pada Forensik Digital
		Kemampuan Khusus:
		1 Pemulihan Data yang Terhapus
		2 Keamanan Jaringan dan Forensik
		3 Forensik Sistem Operasi
		4 Forensik Perangkat Bergerak
		5 Forensik Cloud
		6 Analisis Malware
		7 Forensik Media Sosial
		8 Kriptografi dalam Forensik Digital
		9 Forensik Email
		10 Pengawasan Digital dan Forensik
		11 Kepatuhan dan Regulasi dalam Forensik Digital
		12 Forensik Gambar dan Video Digital
		13 Pengenalan Pola dan Analisis Big Data
		14 Forensik Web dan Log Analisis
		15 Forensik Perangkat IoT (Internert of Things)
		16 Analisis Jaringan dan Trafik Internet
		17 Forensik Blockchain dan Cryptocurrency
		18 Penggunaan AI dan Machine Learning dalam Forensik Digital
		19 Ancaman Internal dan Investigasi
		20 Simulasi dan Modelling dalam Forensik Digital
197	Pemeriksa Keimigrasian Pemula	Kemampuan Umum:
		1 Pengetahuan Umum
		2 Peraturan Keimigrasian
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengetahuan Umum
		2 Peraturan Keimigrasian
		3 Intelijen Keimigrasian
		4 Izin Tinggal Keimigrasian
		5 Kerjasama Keimigrasian
198	Pemeriksa Paten Ahli Pertama	6 Lalu Lintas Keimigrasian
		7 Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
		8 Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
		Kemampuan Umum:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 Sejarah, pengenalan dan perjanjian internasional mengenai paten 2 Paten dan kaitannya dengan kekayaan intelektual secara umum Kemampuan Khusus: 1 Definisi-definisi terkait dengan sistem paten di Indonesia 2 Lingkup perlindungan paten 3 Permohonan paten 4 Publikasi paten 5 Pemeriksaan substantif 6 Komisi banding dan permohonan banding 7 Pengalihan hak, lisensi dan paten sebagai objek jaminan fidusia 8 Paten sederhana (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) 9 Biaya tahunan paten 10 Penghapusan paten 11 Penyelesaian sengketa
199	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Pertama	1 Penanganan laporan dan penyusunan kertas kerja serta konsultasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/pengawasan/audit di bidang perdagangan berjangka komoditi/sistem resi gudang/pasar lelang komoditas 2 Analisis data dan dokumen serta pemberian layanan informasi terkait pengaturan perdagangan berjangka komoditi/sistem resi gudang/pasar lelang komoditas 3 Penyajian data dan informasi serta identifikasi terkait pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas 4 Analisis pelaksanaan fasilitasi substansi perdagangan berjangka komoditi/sistem resi gudang/pasar lelang komoditas
200	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Pertanian umum 2 Agronomi 3 Dasar pemuliaan 4 UU PVT dan Permentan 25/2021 5 Sistem pelepasan varietas tanaman 6 Biologi 7 Taksonomi tumbuhan Kompetensi Khusus: 1 Pemuliaan dan ilmu genetika tanaman lanjutan 2 Fisiologi tumbuhan 3 Statistik 4 Morfologi tanaman 5 Ilmu HPT 6 Ilmu tanah 7 Permentan No. 29 Tahun 2021
201	Penata Anestesi Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Peraturan tentang etik legal dan keselamatan pasien 2 Peraturan terkait pengembangan diri dan profesionalisme 3 Peraturan terkait komunikasi efektif 4 Peraturan terkait dengan Landasan ilmu biomedik, anestesiologi dan instrumentasi Kemampuan Khusus: 1 Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan Pra, Intra, Pasca Anestesi 2 Peraturan terkait dengan Tatalaksanan Obat, Gas, Mesin dan Peralatan anestesi dalam asuhan kepenataan Pra, Intra, Pasca anestesi 3 Peraturan terkait dengan Asuhan Kepenataan anestesi pada Kegawatdaruratan dan bencana
202	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman	Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung 3 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau 4 Penataan Bangunan dan Lingkungan 5 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
203	Penata Kadastral Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Dasar Pertanahan 2 Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang Kemampuan Khusus: 1 Pemetaan 2 Pengukuran Bidang Tanah 3 Survei Pertanahan
204	Penata Kehakiman Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Pengetahuan Dasar Hukum dan Peran Fungsi Komisi Yudisial Kemampuan Khusus: 1 Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc 2 Peningkatan Kapasitas Hakim 3 Investigasi Pendalaman Kasus terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) 4 Pemetaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
205	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	5 Penelusuran Rekam Jejak Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc
		6 Analisis Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
		7 Penyelenggaraab Persidangan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
		Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		Kompetensi Khusus:
		1 Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung
		3 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
		4 Penataan Bangunan dan Lingkungan
		5 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
206	Penata Kelola Hukum dan Perundang Undangan	Kemampuan Umum:
		1 Pengantar Ilmu Hukum
		2 Konsensus Kebangsaan
		3 Pengantar Filsafat Hukum
		4 Teori Hukum
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
		2 Data dan bahan terkait penyusunan telaahan di Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
		3 Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
		4 Data dan bahan terkait evaluasi di Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
		Kompetensi Umum:
207	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan
		2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
		Kompetensi Khusus:
		1 Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan
		2 Pelaksanaan Konstruksi Jalan
		3 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan
		4 Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan
		5 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
		6 Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial
		7 Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan
		8 Pengoperasian Lalu Lintas
		9 Bahan Uji Mutu
208	Penata Kelola Kelautan dan Perikanan	Kemampuan Umum:
		Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
		Kemampuan Khusus:
		1 Jenis Ikan, Biologi Perairan, Statistik Perikanan dan Daerah Penangkapan Ikan
		2 Rancang bangun kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan Metode Penangkapan Ikan
		3 Melaksanakan tata kelola pengawakan kapal perikanan
		4 Permesinan kapal perikanan, alat bantu penangkapan ikan, dan tingkah laku ikan
		5 Tambat Labuh, radio komunikasi, pemanduan kapal perikanan
		Kompetensi Umum:
		1 UU No 20 tahun 2023 tentang ASN
		2 UU Kesehatan no 17 tahun 2023
		Kompetensi Khusus:
209	Penata Kelola Layanan Kesehatan	1 Pedoman K3
		2 Prinsip Komunikasi
		3 Pedoman Promosi Kesehatan
		4 Konsep Pelayanan Prima dalam layanan kesehatan
		Kompetensi Umum:
		1 Sistem informasi dan teknologi
		2 Manajemen mutu
		3 Peraturan obat dan makanan
		4 Komunikasi risiko terkait obat dan makanan
		5 Visi Misi BPOM/Budaya Kerja BPOM
		Kompetensi Khusus:
210	Penata Kelola Obat dan Makanan	1 Pengawasan dan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan
		2 Pemeriksaan sarana produksi tingkat dasar
		3 Pemeriksaan sarana distribusi tingkat dasar
		4 Pengambilan contoh
		5 Pengawasan penandaan obat dan makanan
		6 Analisa/evaluasi permohonan surat keterangan impor/ekspor/API-PI/IPB2 obat dan makanan atau analisa hasil pengawasan narkotik, psikotropik dan prekursor
		7 Pemeriksaan penerapan farmakovigilans di industri farmasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh industri farmasi untuk melaksanakan farmakovigilans tingkat dasar
		8 Pengawasan periklanan dan promosi setelah beredar
		9 Penilaian obat tradisional, suplemen kesehatan dan obat kuasi tingkat dasar
		10 Verifikasi produk kosmetik tingkat dasar
		11 Penilaian terhadap berkas permohonan pendaftaran pangan olahan tingkat dasar

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		12 Pengujian kimia obat dan makanan
		13 Pengujian biologi obat dan makanan
		14 Riset dan kajian di bidang obat dan makanan tingkat dasar
		15 Rancangan materi penyuluhan/produk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
		16 Kegiatan penyuluhan/produk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tingkat dasar
		17 Pengumpulan data dalam rangka penyusunan perencanaan pengawasan obat dan makanan
		18 Penyusunan rancangan petunjuk pelaksanaan (juklak)/petunjuk teknis (juknis)
211	Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kompetensi Umum: Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kompetensi Khusus: 1 Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan 2 Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak 3 Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak
212	Penata Kelola Pemerintahan	Kemampuan Umum: 1 Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 2 Analisis kebijakan pemerintah terhadap perekonomian negara 3 Perencanaan negara guna memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan budaya Kemampuan Khusus: 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta turunannya 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 3 Perencanaan negara guna memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
213	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	1 Sejarah Pemilu di Indonesia 2 Sistem Pemilu dan Pilkada 3 Praktik Pemilu di Indonesia 4 Struktur Organisasi 5 Kewenangan 6 Etik 7 Policy maker dan implementator 8 Kewajiban KPU (komisioner) 9 Tugas dan Fungsi Kesekretariatan 10 Perencanaan keuangan dan anggaran 11 Tahapan pelaksanaan anggaran 12 Pencalonan 13 Data pemilih 14 Pemungutan dan penghitungan suara 15 Dasar hukum pemilu 16 Undang-Undang Pemilu 17 Peraturan KPU 18 Azas-azas Pemilu 19 Prinsip penyelenggaraan Pemilu 20 Kode Etik
214	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS 9 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 12 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 13 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14 Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2021 dan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal 15 Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 16 Peraturan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal 17 Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal 18 Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal 19 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
215	Penata Kelola Pengadaan Tanah	Kompetensi Umum: Pengertian dan Pengaturan Umum Pengadaan Tanah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kompetensi Khusus:
		1 Perencanaan Pengadaan Tanah
		2 Persiapan Pengadaan Tanah
		3 Pelaksanaan Pengadaan Tanah
		4 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
		5 Pengadaan Tanah Skala Kecil
		6 Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional
216	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	7 Sumber Dana Pengadaan Tanah dan Insentif Perpajakan
		Kemampuan Umum:
		1 Teori Pemilihan Umum
		2 Sistem-sistem Pemilihan Umum
		3 Peran dan Fungsi Bawaslu, KPU, dan DKPP
		4 Perkembangan Kelembagaan Pengawasan Pemilihan Umum
		Kemampuan Khusus:
		1 Pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu
		2 Penyusunan pedoman penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu
		3 Pengawasan Pemilu
		4 Pengawasan partisipatif
		5 Pelaporan dan registrasi dugaan pelanggaran Pemilu
		6 Persidangan pelanggaran Pemilu
		7 Permohonan sengketa proses Pemilu
		8 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu
		9 Tindak lanjut dan pemantauan putusan
217	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan
		2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan lingkungan
		Kompetensi Khusus:
		1 Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
		2 Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan
		3 Pengelolaan Air Limbah Domestik
		4 Pengelolaan Drainase Lingkungan
218	Penata Kelola Pertambangan	Kompetensi Umum:
		1 UU Nomor 3 Tahun 2020 & UU Nomor 4 Tahun 2009
		2 PP Nomor 96 Tahun 2021
		3 PP Nomor 25 Tahun 2023
		4 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020
		5 Kepmen ESDM No. 77.K-MB.01-MEM.B-2022
		6 Kepmen ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018
		7 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2017
		Kompetensi Khusus:
		1 Prinsip Dasar Geologi
		2 Mineralogi dan Petrologi
		3 Teknik Eksplorasi Geologi
		4 Potensi Sumberdaya Geologi Indonesia
		5 Estimasi Sumber Daya dan Cadangan
		6 Pengeboran
		7 Pengeboran kering (tanpa fluida) dan dengan fluida
		8 Alat Gali, Muat dan Angkut
		9 Pengolahan Bahan Galian
		10 Mesin diesel dan Otto
		11 Kelistrikan
		12 Generator
		13 Motor listrik
		14 Metode dan sistem tambang terbuka
		15 Metode dan sistem tambang bawah tanah
		16 Geoteknik Tambang Terbuka
		17 Geoteknik Tambang Bawah Tanah
		18 Hidrologi
		19 Hidrogeologi
		20 Survei
		21 Perencanaan tambang
		22 Produksi tambang
		23 Teknologi proses metalurgi
		24 Analisis proses metalurgi
		25 Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No 32 Th 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021
		26 Pengelolaan dan pemantauan kualitas air dan air limbah berdasarkan PP No. 82 Tahun 2001
		27 Pengelolaan dan pemantauan limbah B3 kegiatan pertambangan berdasarkan PP No 101 Tahun 2014 dan PP No. 74 Tahun 2001
		28 Audit Lingkungan Hidup berdasarkan PermenLH No. 3 tahun 2013
		29 Pemantauan kualitas udara kegiatan pertambangan berdasarkan PermenLH No. 4 Tahun 2014 dan PP No 41 Tahun 1999
		30 Pengelolaan sampah dan limbah padat kegiatan pertambangan berdasarkan UU No 18 Tahun 2008

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		31 Izin Lingkungan berdasarkan PermenLHK No 4 Tahun 2021
		32 Permen ESDM No 1827 Tentang Pertambangan yang baik
		33 Job Safty Analysis (JSA)
		34 Sistem manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)
219	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Program
		2 Pemantauan Evaluasi
		3 Pengelolaan Data dan Informasi
		4 Penganggaran
		5 Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
		6 Penyelenggaraan Pembinaan Teknis
		7 Manajemen Risiko
		8 Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
		Kompetensi Khusus:
		1 Penyelenggaraan dan Stimulan Rumah Umum dan Komersial
		2 Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun
220	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya
		4 Penyediaan Rumah Khusus
		Kemampuan Umum:
		1 Kebijakan dan Standar TI
		2 Manajemen Risiko TI
		3 Kepatuhan dan Regulasi TI
		4 Keamanan Siber
		5 Manajemen Proyek TI
		6 Manajemen Layanan TI
		7 Outsourcing dan Vendor Management
		8 Manajemen Perubahan TI
		9 Cloud Computing
		Kemampuan Khusus:
		1 Manajemen Aset TI
		2 Strategi dan Perencanaan TI
		3 Arsitektur Enterprise
		4 Manajemen Data dan Informasi
		5 Audit TI dan Pengendalian Internal
		6 Manajemen Sumber Daya TI
		7 Pengembangan dan Implementasi Sistem
		8 Pengelolaan Kinerja TI
		9 Tata Kelola Privasi Data
		10 Business Intelligence dan Analitik Data
		11 Manajemen Infrastruktur TI
		12 Inovasi dan Transformasi Digital
		13 Kesenambungan Bisnis dan Pemulihan Bencana TI
		14 Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam TI
		15 Manajemen Portofolio TI
		16 Integrasi Sistem dan Interoperabilitas
		17 Manajemen Sistem Informasi Kesehatan
		18 Pengembangan Agile dan Metodologi Scrum
		19 Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin dan Bisnis
221	Penata Kelola Usaha Ketenagalistrikan	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan mengenai regulasi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan
		2 Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang ketenagalistrikan
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengetahuan terkait penyiapan usaha penyediaan tenaga listrik
		2 Pengetahuan terkait fasilitasi hubungan komersial usaha ketenagalistrikan
		3 Pengetahuan terkait mutu layanan penyediaan ketenagalistrikan
		4 Pengetahuan terkait perlindungan konsumen dan usaha ketenagalistrikan
		5 Pengetahuan terkait usaha jasa penunjang ketenagalistrikan
222	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan Pengendalian Penduduk
		2 Konsep Dasar Keluarga
		3 Kebijakan Pembangunan Keluarga
		Kompetensi Khusus:
		1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
		2 Advokasi Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
		3 Analisis Demografi
		4 Penyusunan Program Kesehatan Reproduksi
		5 Pembangunan Keluarga
		6 Analisis Data dan Informasi Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana
223	Penata Keprotokolan	Kemampuan Umum:
		1 Kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Negara dalam layanan keprotokolan dalam peraturan perundang-undangan
		2 Pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Pemahaman dasar mengenai konsep pengamanan yang berkaitan dengan administrasi/protokol berdasarkan peraturan perundang-undangan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pelayanan keprotokol terkait tata tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokol
		2 Pelayanan keprotokol terkait tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokol
		3 Pelayanan keprotokol terkait tata penghormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokol
		4 Pelayanan keprotokol terkait tata cara Protokol Internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokol
		5 Protokol Kepresidenan dan Pejabat Negara/Presiden/Pemerintah lainnya
224	Penata Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	Kemampuan Umum:
		1 Matematika terapan
		2 Fisika terapan
		3 Informasi dan Teknologi
		4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
		5 Bahasa Inggris maritim & SMCP
		6 Kepemimpinan
		Kemampuan Khusus:
		1 Prosedur darurat
		2 Marine Pollution
		3 Peraturan Pencegahan tubrukan dilaut dan Dinas Jaga
		4 Konstruksi dan stabilitas kapal
		5 Penanganan dan pengaturan muatan
		6 Hukum maritim
		7 Global Maritime Distress Safety System
225	Penata Keselamatan Pelayaran	Kemampuan Umum:
		1 Matematika terapan
		2 Fisika terapan
		3 Informasi dan Teknologi
		4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
		5 Bahasa Inggris maritim & SMCP
		6 Kepemimpinan
		Kemampuan Khusus:
		1 Prosedur darurat
		2 Marine Pollution
		3 Peraturan Pencegahan tubrukan dilaut dan Dinas Jaga
		4 Konstruksi dan stabilitas kapal
		5 Penanganan dan pengaturan muatan
		6 Hukum maritim
		7 Global Maritime Distress Safety System
226	Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pertanahan
		2 Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Kemampuan Khusus:
		1 Konsolidasi Tanah
		2 Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan
		3 Pengadaan Tanah
		4 Penilaian Tanah
		5 Pemberdayaan Tanah Masyarakat
		6 Penatagunaan Tanah
		7 Reforma Agraria
227	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Pemula	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		Kompetensi Khusus:
		1 Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung
		3 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
		4 Penataan Bangunan dan Lingkungan
		5 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
228	Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan Infrastruktur Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		Kompetensi Khusus:
		1 Perencanaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
		2 Penyelenggaraan Bangunan Gedung
		3 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Gedung Hijau
		4 Penataan Bangunan dan Lingkungan
		5 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
229	Penata Laksana Barang Terampil	Kemampuan Umum: 1 Kebijakan Jabatan Fungsional 2 Konsep dasar pengelolaan BMN 3 Konsep dasar keuangan negara 4 Konsep dasar akuntansi pemerintahan Kemampuan Khusus: 1 Kebijakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara 2 Kebijakan penggunaan Barang Milik Negara 3 Kebijakan pemanfaatan Barang Milik Negara 4 Kebijakan pemindahtanganan Barang Milik Negara 5 Kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara 6 Kebijakan pengamanan (termasuk asuransi) dan pemeliharaan BMN 7 Kebijakan pemusnahan BMN dan penghapusan 8 Kebijakan pengawasan dan pengendalian kebutuhan Barang Milik Negara
230	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula	Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan 2 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 3 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan 4 Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan 5 Lingkungan dan Keselamatan Jalan 6 Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial 7 Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan 8 Pengoperasian Lalu Lintas 9 Bahan Uji Mutu
231	Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil	Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Jalan dan Jembatan 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan dan Terowongan 2 Pelaksanaan Konstruksi Jalan 3 Pelaksanaan Konstruksi Jembatan dan Terowongan 4 Preservasi Jalan, Jembatan dan Terowongan 5 Lingkungan dan Keselamatan Jalan 6 Pengadaan Lahan dan Dampak Sosial 7 Pendanaan Jalan, Jembatan dan Terowongan 8 Pengoperasian Lalu Lintas 9 Bahan Uji Mutu
232	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Pemula	Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan lingkungan Kompetensi Khusus: 1 Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 2 Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan 3 Pengelolaan Air Limbah Domestik 4 Pengelolaan Drainase Lingkungan
233	Penata Laksana Penyehatan Lingkungan Terampil	Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait Infrastruktur Penyehatan Lingkungan 2 Teori - teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan Infrastruktur penyehatan lingkungan Kompetensi Khusus: 1 Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum 2 Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan 3 Pengelolaan Air Limbah Domestik 4 Pengelolaan Drainase Lingkungan
234	Penata Laksana Sumber Daya Air Pemula	Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan 5 Pengelolaan Daerah Irigasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
235	Penata Laksana Sumber Daya Air	Kompetensi Umum:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
	Terampil	1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air
		2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengelolaan Sumber Daya Air
		2 Pengelolaan Sungai
		3 Pengelolaan Daerah Pantai
		4 Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan
		5 Pengelolaan Daerah Irigasi
		6 Pengelolaan Daerah Rawa
		7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku
236	Penata Pameran	8 Pengelolaan Bendungan
		9 Pengelolaan Tampungan Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
		1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya
		2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
		3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
237	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	5 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum
		Kemampuan Umum:
		1 Konsep Dasar Penanggulangan Bencana
		2 Perencanaan Penanggulangan Bencana
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengkajian Risiko Bencana
		2 Kesiapsiagaan logistik dan peralatan bencana
		3 Pelaksanaan kesiapsiagaan masyarakat
		4 Fasilitas kebutuhan korban dan pengungsi
		5 Mitigasi bencana
		6 Pusdalops
		7 Peringatan dini bencana
		8 Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya
		9 Rencana operasi penanganan darurat
		10 Pengendalian operasi/komando penanganan
		11 Pemenuhan kebutuhan dasar
238	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama	12 Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
		13 Konsep dasar distribusi logistik dan peralatan
		14 Tahapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka kegiatan logistik dan peralatan
		15 Pemulihan dan peningkatan fisik pasca bencana
		16 Tahapan penyusunan rencana pemulihan fungsi pemerintahan, fungsi pelayanan publik, keamanan dan ketertiban
		17 Asistensi perencanaan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, dan sumber daya alam
		Kompetensi Umum:
		1 Konsep dan strategi pemerolehan naskah atau materi audiovisual
239	Penata Perizinan Ahli Pertama	2 Rencana kerja dan kegiatan promosi dan desiminasi terbitan ilmiah
		3 Etika publikasi dalam proses verifikasi pemerolehan naskah atau materi audiovisual
		Kompetensi Khusus:
		1 Penerimaan naskah atau materi audiovisual
		2 Penelaahan dan penilaian naskah atau materi audiovisual
		3 Penyuntingan
		4 Desain
		5 Produksi
240	Penata Perlindungan Saksi dan Korban Ahli Pertama	1 UU 23 Tahun 2023, Perpres 97 Tahun 2014, PP 5 Tahun 2021, PP 6 Tahun 2021, Permendagri 138 Tahun 2017
		2 Regulasi Teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonperizinan
		Kemampuan Umum:
		1 Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
		2 Definisi Perlindungan
		3 Definisi Subyek Perlindungan
		4 Syarat Permohonan Perlindungan
		5 Tata Cara Pengajuan Permohonan
		6 Jangka Waktu Permohonan Perlindungan
		7 Persiapan Layanan Permohonan Perlindungan
		8 Jenis Tindak Pidana Dalam Pemberian Perlindungan
		9 Hak Saksi dan Korban
		10 Jenis Layanan Perlindungan
		11 Jangka Waktu Pemberian Perlindungan
		Kemampuan Khusus:
		1 Investigasi
		2 Asesmen
		3 Penelaahan Dokumen Permohonan Perlindungan
		4 Telaah Materiil Permohonan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Risalah Permohonan
		6 Keputusan Pemberian Perlindungan
		7 Teknis Perlindungan Fisik
		8 Teknis Pemberian Bantuan Medis dan Rehabilitasi Psikologis
		9 Teknis Pemenuhan Hak Prosedural
		10 Teknis Pemberian Rehabilitasi Psikososial
		11 Teknis Pemenuhan Hak Saksi Pelaku
		12 Teknis Pemenuhan Hak atas Pembiayaan
		13 Teknis Perpanjangan atau Pemberhentian Perlindungan
		14 Teknis Pemberian Perlindungan Hukum
		15 Teknis Pemberian Hak atas Informasi
241	Penata Pertanahan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pertanahan
		2 Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Kemampuan Khusus:
		1 Konsolidasi Tanah
		2 Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan
		3 Pengadaan Tanah
		4 Penilaian Tanah
		5 Pemberdayaan Tanah Masyarakat
		6 Penatagunaan Tanah
		7 Reforma Agraria
242	Penata Ruang Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pertanahan
		2 Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Kemampuan Khusus:
		1 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
		2 Pengawasan Penataan Ruang
		3 Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
		4 Penyusunan Rencana Tata Ruang
		5 Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
		6 Pengendalian, Pemanfaatan dan Sengketa Penataan Ruang
243	Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	Kemampuan Umum:
		1 Pedoman tentang pembudidayaan ikan
		2 Mengetahui pengetahuan umum di bidang Kelautan dan Perikanan kelautan dan perikanan
		3 Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
		4 Peraturan terkait sektor Kelautan dan Perikanan
		5 Pengetahuan dasar mengenai alat-alat pengolah data
		6 Peraturan Kelautan dan Perikanan
		7 Sistem manajemen keamanan pangan
		8 Sistem manajemen mutu pengujian
		9 Strategi Kebijakan Ekonomi Biru Bidang Kelautan dan Perikanan
		10 Dasar-dasar/falsafah penyuluhan perikanan
		11 Inovasi Difusi dan Adopsi
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya
		2 Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
		3 Penataan Pemasukan Benih Calon Induk dan Induk
		4 Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan
		5 Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
		6 Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
		7 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
		8 Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
		9 Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan
		10 Pengenalan Jenis Ikan
		11 Identifikasi jenis - jenis kapal penangkapan ikan
		12 Identifikasi awak kapal perikanan
		13 Identifikasi jenis mesin dan alat penangkapan ikan
		14 Identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
		15 Mampu melakukan penataan sarana dan prasarana di bidang Kelautan dan Perikanan
		16 Pengetahuan dasar mengenai Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
		17 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
		18 Pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		19 Pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		20 Sistem manajemen keamanan pangan
		21 Sistem manajemen mutu pengujian
		22 Ketertelusuran dan penarikan produk pangan
		23 Akses teknologi dan informasi sektor kelautan dan perikanan
		24 Kemitraan Usaha dan Pembiayaan/permodalan sektor kelautan dan perikanan
		25 Pengolahan Data, Produktivitas dan Skala usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
244	Penelaah Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	Kemampuan Umum:
		1 Penyusunan kebijakan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
		2 Pembinaan Penerapan Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
		Kemampuan Khusus:
		1 Pemenuhan Persyaratan Badan Akreditasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Pengembangan Sistem Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
		3 Penilaian Pemenuhan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian
245	Penelaah Ketertelusuran Standar Pengukuran	Kemampuan Umum:
		1 Penyusunan Kebijakan Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
		2 Pembinaan Penerapan Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyediaan dan Pengembangan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan
		2 Pemeliharaan Standar Pengukuran atau Bahan Acuan
		3 Pelaksanaan Diseminasi Standar Pengukuran atau Bahan Acuan
		4 Pemenuhan pengakuan nasional atau internasional standar pengukuran atau bahan acuan
246	Penelaah Pengembangan Standar	Kemampuan Umum:
		1 Penyusunan Kebijakan Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
		2 Pembinaan Penerapan Kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengembangan Standar Nasional Indonesia
		2 Pengembangan Standar Internasional
		3 Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI
247	Peneliti Ahli Muda	Kompetensi Umum:
		1 Butir-butir Kode Etik Peneliti; Tiga Pilar Etika.
		2 Pengenalan Jurnal Ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi
		3 Konsep Dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan Sistem Perlindungan KI; Kekayaan Intelektual, Inovasi, dan Kegiatan Litbang; Aspek-aspek terkait KI.
		4 Manajemen Penelitian; Implementasi Manajemen Penelitian
		Kompetensi Khusus:
		Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method); Invention, Inovation, Discovery (menuju ke Novelty); Implementasi pendekatan dan metode penelitian.
		1
		2 Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian
		3 Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian
		4 Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan.
		5 Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah.
248	Peneliti Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Butir-butir Kode Etik Peneliti; Tiga Pilar Etika.
		2 Pengenalan Jurnal Ilmiah dan e-journal; Prosedur dan praktek submit naskah; Praktek penggunaan aplikasi manajemen referensi
		3 Konsep Dasar Kekayaan Intelektual (KI) dan Sistem Perlindungan KI; Kekayaan Intelektual, Inovasi, dan Kegiatan Litbang; Aspek-aspek terkait KI.
		4 Manajemen Penelitian; Implementasi Manajemen Penelitian
		Kompetensi Khusus:
		Filosofi dan paradigma kegiatan penelitian; Pendekatan dan metode penelitian (penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method); Invention, Inovation, Discovery (menuju ke Novelty); Implementasi pendekatan dan metode penelitian.
		1
		2 Konsep proposal penelitian; Kriteria dan formulasi proposal penelitian; Strategi dan teknik penulisan proposal penelitian; Berpikir kritis; Teknik perumusan masalah/pertanyaan penelitian; Metodologi penelitian; Pengelolaan penelitian
		3 Data dan sumber data; Penelusuran informasi ilmiah; Metode pengumpulan data; Instrumen penelitian
		4 Konsep dasar pengolahan data; Metode pengolahan dan analisis data; Penyajian dan interpretasi hasil penelitian; Penarikan kesimpulan.
		5 Konsep penulisan ilmiah; Substansi, jenis, dan bentuk penerbitan untuk tulisan ilmiah; Etika publikasi ilmiah; Strategi publikasi di jurnal ilmiah.
249	Penera Ahli Pertama	1 Pelaksanaan Tera Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan III dan IV
		2 Pelaksanaan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan III dan IV
		3 Penanganan dan pengelolaan instalasi uji
250	Penera Terampil	1 Aturan dan prosedur pelaksanaan Tera Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan I dan II
		2 Aturan dan prosedur pelaksanaan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Tingkat Kesulitan I dan II
		3 Pengetahuan dasar terkait pengelolaan instalasi uji
251	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Arab	Kompetensi Umum:
		Teori Penerjemahan
		Kompetensi Khusus:
		1 Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2 Membaca teks Bahasa Indonesia
		3 Struktur Bahasa Arab dan ungkapan tulis Bahasa Arab
		4 Pemahaman membaca teks Bahasa Arab
252	Penerjemah Ahli Pertama -	Kompetensi Umum:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
	Penerjemah Bahasa Belanda	Teori Penerjemahan
		Kompetensi Khusus:
		1 Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2 Membaca teks Bahasa Indonesia
		3 Struktur tata Bahasa Belanda dan ungkapan tulis Bahasa Belanda
253	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris	4 Pemahaman membaca teks Bahasa Belanda
		Kompetensi Umum:
		Teori Penerjemahan
		Kompetensi Khusus:
		1 Merespons kaidah Bahasa Indonesia
254	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Jepang	2 Membaca teks Bahasa Indonesia
		3 Struktur Bahasa Inggris dan ungkapan tulis Bahasa Inggris
		4 Pemahaman membaca teks Bahasa Inggris
		Kompetensi Umum:
		Teori Penerjemahan
255	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Korea	Kompetensi Khusus:
		1 Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2 Membaca teks Bahasa Indonesia
		3 Struktur Bahasa Jepang dan ungkapan tulis Bahasa Jepang
		4 Pemahaman membaca teks Bahasa Jepang
256	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Mandarin	Kompetensi Umum:
		Teori Penerjemahan
		Kompetensi Khusus:
		1 Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2 Membaca teks Bahasa Indonesia
257	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Prancis	3 Struktur Bahasa Korea dan ungkapan tulis Bahasa Korea
		4 Pemahaman membaca teks Bahasa Korea
		Kompetensi Umum:
		Teori Penerjemahan
		Kompetensi Khusus:
258	Pengamat Gunung Api Pemula	1 Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2 Membaca teks Bahasa Indonesia
		3 Struktur Bahasa Mandarin dan ungkapan tulis Bahasa Mandarin
		4 Pemahaman membaca teks Bahasa Mandarin
		Kompetensi Umum:
	Penerjemah Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Prancis	Teori Penerjemahan
		Kompetensi Khusus:
		1 Merespons kaidah Bahasa Indonesia
		2 Membaca teks Bahasa Indonesia
		3 Struktur Bahasa Prancis dan ungkapan tulis Bahasa Prancis
259	Pengamat Gunung Api Terampil	4 Pemahaman membaca teks Bahasa Prancis
		Kompetensi Umum:
		1 Tugas fungsi Pengamat Gunung Api
		2 Peran Pengamat Gunung Api
		3 Organisasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	4 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		1 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		2 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		3 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		4 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	5 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		6 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		7 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		8 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		9 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	10 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		11 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		12 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		13 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		14 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	15 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		16 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		17 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		18 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		19 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	20 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		21 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		22 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		23 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		24 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	25 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		26 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		27 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		28 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		29 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	30 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		31 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		32 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		33 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		34 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	35 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		36 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		37 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		38 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		39 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	40 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		41 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		42 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		43 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		44 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	45 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		46 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		47 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		48 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		49 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	50 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		51 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		52 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		53 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		54 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	55 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		56 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		57 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		58 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		59 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	60 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		61 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		62 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		63 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		64 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	65 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		66 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		67 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		68 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		69 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	70 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		71 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		72 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		73 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		74 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	75 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		76 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		77 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		78 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		79 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	80 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		81 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		82 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		83 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		84 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	85 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		86 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		87 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		88 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		89 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	90 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		91 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		92 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		93 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		94 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	95 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		96 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		97 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		98 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		99 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
	Pengamat Gunung Api Pemula	100 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		101 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		102 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		103 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi
		104 Regulasi terkait mitigasi bencana geologi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Kejadian letusan besar gunung api di Indonesia
		6 Lokasi-lokasi gunung api di Indonesia
		Kompetensi Khusus:
		1 Pembentukan gunung api
		2 Istilah Keganungapian
		3 Dampak gunung api
		4 Kawasan rawan bencana gunung api
		5 Produk gunung api
		6 Klasifikasi gunung api
		7 Komponen dasar elektronika
		8 Rangkaian listrik
		9 Sensor dan Transducer
		10 Alat Ukur dan Pengukuran
		11 Gelombang
		12 Termodinamika
		13 Pengukuran dalam ilmu fisika
		14 Aplikasi dalam ilmu fisika
		15 Elektromagnetika
		16 Geometri
		17 Trigonometri
		18 Statistika
		19 Diferensial, integral dan limit
		20 Jaringan komputer
		21 Dasar-dasar pemrograman
		22 Elektronika digital
		23 Dasar Mikrokontroler dan Mikroprosesor
		24 Peralatan pemantauan gunung api
		25 Pengetahuan tentang pemantauan visual dan instrumental
		26 Tingkat aktivitas gunung api
		27 Diseminasi informasi gunung api
260	Pengamat Meteorologi dan Geofisika Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Pengenalan ilmu meteorologi dasar
		2 Pengolahan data meteorologi
		3 Prediksi cuaca
		4 Pengertian ilmu klimatologi-kualitas udara dasar
		5 Prakiraan iklim ekstrim
		6 Pengenalan ilmu geofisika dasar
		7 Sedimentologi dan stratigrafi
		8 Peralatan teknologi MKG
		9 Kalibrasi peralatan teknologi MKG
		Kemampuan Khusus:
		1 Model prakiraan meteorologi
261	Pengamat Tera Pemula	2 Peralatan operasional meteorologi
		3 Analisis meteorologi kompleks
		4 Pengolahan data klimatologi tingkat lanjutan
		5 Analisis klimatologi kompleks
		6 Iklim ekstrim
		7 Teknis operasional geofisika
		8 Pengolahan data geofisika
		9 Analisis geofisika kompleks
		10 Pengoperasian peralatan teknologi canggih/modern
		11 Pengujian peralatan teknologi MKG
		12 Kalibrasi peralatan teknologi canggih/modern
262	Pengamat Tera Terampil	1 Ketentuan dan metode pengambilan data alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran
		2 Penyiapan bahan pemeriksaan alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran, perlabelan barang dalam keadaan terbungkus dan pemeriksaan tanda tera serta satuan ukuran pada pengumuman atau pemberitahuan yang menyatakan ukuran, takaran, berat pada tempat penjualan barang
		3 Penyuluhan bidang metrologi legal
263	Pengantar Kerja Ahli Pertama	1 Pengumpulan dan penyajian data terkait alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran
		2 Pemeriksaan dan pengecekan unjuk kerja alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan tingkat kesulitan I, pemeriksaan pelabelan dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dinyatakan dalam berat secara umum, dan jumlah hitungan, serta pemeriksaan satuan ukuran pada pengumuman
		3 Penyuluhan bidang metrologi legal
		Kemampuan Khusus:
		1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
		2 Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
		3 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
		4 Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Penempatan
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
		4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
		5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
		6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
264	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman, PP Nomor 41 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
		2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2016
		3 SNI tentang Alat dan Mesin Pertanian dan ISO tentang Sistem Manajemen Mutu
		4 Analisa ekonomi alat dan mesin pertanian
		5 Ilmu dasar mekanisasi pertanian, alat ukur/instrumentasi, keselamatan dan kesehatan kerja, perkembangan mekanisasi pertanian saat ini
		Kompetensi Khusus:
		1 Tahapan budidaya dan alat dan mesin pra panen (pengolahan tanah, penanaman, perlindungan tanaman) dan pengawasan pengadaan, penggunaan dan peredaran alsintan
		2 Tahapan panen, pascapanen dan pengolahan serta alat dan mesin komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan
		3 Persiapan pelaksanaan pengujian, instrumen pengujian, prosedur dan tata cara pengujian, kinerja alat dan mesin pertanian
		4 Persiapan pelaksanaan sertifikasi, prosedur dan tata cara sertifikasi, serta SDM pelaksana proses sertifikasi alat dan mesin pertanian
265	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi bidang pertanian
		2 Pengetahuan budidaya tanaman (produksi benih, seleksi/detaseling)
		3 Biologi umum (pemuliaan tanaman, morfologi, fisiologi)
		Kompetensi Khusus:
		1 Regulasi perbenihan nasional
		2 Pengawasan benih tanaman (sertifikasi, pengawasan peredaran, pengujian mutu benih dan penilaian pelepasan varietas)
266	Pengawas Benih Tanaman Pemula	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi bidang pertanian
		2 Pengetahuan budidaya tanaman (produksi benih, seleksi/detaseling)
		3 Biologi umum (pemuliaan tanaman, morfologi, fisiologi)
		Kompetensi Khusus:
		1 Regulasi perbenihan nasional
		2 Pengawasan benih tanaman (sertifikasi, pengawasan peredaran, pengujian mutu benih dan penilaian pelepasan varietas)
267	Pengawas Benih Tanaman Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Regulasi bidang pertanian
		2 Pengetahuan budidaya tanaman (produksi benih, seleksi/detaseling)
		3 Biologi umum (pemuliaan tanaman, morfologi, fisiologi)
		Kompetensi Khusus:
		1 Regulasi perbenihan nasional
		2 Pengawasan benih tanaman (sertifikasi, pengawasan peredaran, pengujian mutu benih dan penilaian pelepasan varietas)
268	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan produksi benih dan bibit ternak (produksi benih, bibit, seleksi)
		2 Manajemen pemeliharaan ternak
		3 Istilah bidang peternakan
		Kompetensi Khusus:
		Ciri-ciri karakteristik ternak
269	Pengawas Bibit Ternak Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan produksi benih dan bibit ternak (produksi benih, bibit, seleksi)
		2 Manajemen pemeliharaan ternak
		3 Istilah bidang peternakan
		Kompetensi Khusus:
		Ciri-ciri karakteristik ternak
270	Pengawas Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Kompetensi Umum:
		1 Tugas, Fungsi, dan Peran Aparatur Sipil Negara
		2 Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil negara
		3 Peran jabatan Pengawas EBTKE
		4 Tugas dan tanggung jawab Pengawas EBTKE
		5 Organisasi EBTKE
		6 UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
		7 PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		8 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
		9 Perpres Nomor 112 Tahun 2022
		10 PP 33 Th 2023 tentang konservasi energi
		11 Permen ESDM no 14 th 2021
		12 Permen ESDM Nomor 12 tahun 2023
		13 Permen ESDM No 32 Th 2008 ttg Bahan Bakar Nabati dan Perubahannya
		Kompetensi Khusus:
		1 Potensi Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia
		2 Konversi satuan dalam bidang EBTKE
		3 Bioenergi: Bahan Bakar Nabati
		4 Bioenergi: PLT Bio
		5 Bioenergi: Biogas
		6 Bioenergi: Biomassa
		7 Aneka EBT: Energi Baru (Nuklir, Hidrogen, Coal Bed Methane, Liquefied Coal, Gassified Coal)
		8 Aneka EBT: Energi Surya
		9 Aneka EBT: Energi Angin
		10 Aneka EBT: Energi Gerakan dan Perubahan Suhu Air Laut
		11 Aneka EBT: Energi Aliran dan Terjunan Air
		12 Konservasi Energi: Manajemen Energi
		13 Konservasi Energi: SKEM dan Labeling
		14 Konservasi Energi: Program Konservasi Energi
		15 Analisis Ekonomi Energi
		16 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
		17 Dampak Lingkungan dan Sosial Pengembangan dan Penggunaan EBTKE
		18 Target, Komitmen, dan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca
		19 Aspek Keteknikan (SNI, SKKNI, TKDN)
271	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Aplikasi-aplikasi dan layanan call center yang ada di BPOM
		2 Sistem kerja dan proses bisnis di BPOM
		3 Tata kerja dan organisasi BPOM
		4 Kejadian terkait bahaya dan/atau risiko di bidang obat dan makanan
		5 Gambaran visi, misi dan budaya kerja POM
		Komptensi Khusus:
		1 Kasus/kejadian kejahatan obta dan makanan
		2 Regulasi yang berhubungan dengan bidang penindakan obat dan makanan
		3 Regulasi dalam pengawasan fasilitas produksi obat, produk biologi, narkotika, psikotropika, dan prekursor
		4 Prinsip-prinsip cara pembuatan obat yang baik (CPOB)
		5 Regulasi dalam pengawasan fasilitas distribusi dan pelayanan kefarmasian (obat, produk biologi, narkotika, psikotropika, dan prekursor)
		6 Prinsip-prinsip cara distribusi obat yang baik (CDOB)
		7 Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian (obat, produk biologi, narkotika, psikotropika, dan prekursor)
		8 Regulasi pengawasan mutu obat
		9 Regulasi pengawasan penandaan/label dan/atau iklan obat
		10 Regulasi pengawasan penandaan/label dan/atau iklan/promosi produk tembakau
		11 Regulasi pengawasan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor
		12 Regulasi penerapan farmakovigilans
		13 Regulasi tentang persyaratan teknis bahan kosmetik (terutama bahan dilarang) dan cemaran dalam kosmetik
		14 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi kosmetika
		15 Regulasi pengawasan penandaan kosmetika
		16 Regulasi dan prinsip-prinsip CPOTB dalam pengawasan sarana produksi obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		17 Regulasi dan prinsip-prinsip cara distribusi yang baik untuk obat bahan alam dalam pengawasan sarana distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		18 Regulasi pengawasan mutu dan keamanan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		19 Regulasi dan tata cara pengawasan iklan obat bahan alami dan suplemen kesehatan
		20 Regulasi dan tata cara pengawasan penandaan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		21 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		22 Sistem farmakovigilans dan efek tidak diinginkan pada penggunaan obat bahan alam dan suplemen kesehatan
		23 Regulasi terkait prinsip cara peredaran pangan olahan yang baik/sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran
		24 Regulasi terkait pengambilan contoh pangan dan tindak lanjut hasil pengujian pangan
		25 Regulasi terkait KLB keracunan pangan
		26 Regulasi pengawasan iklan dan/atau promosi pangan olahan
		27 Regulasi pengawasan penandaan dan/atau label pangan olahan
		28 Regulasi pengawasan pemasukan dan pengeluaran pangan
		29 Registrasi produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan
		30 Pengetahuan dasar uji pra klinik/uji klinik obat bahan alam
		31 Notifikasi produk kosmetika
		32 Penilaian dokumen informasi produk
		33 Pengetahuan tentang registrasi pangan olahan
		34 Pengetahuan tentang label pangan olahan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		35 Dasar-dasar pengujian kimia, pengujian kromatografi, spektrofotometri dan disolusi
		36 Dasar-dasar pengujian mikrobiologi, biologi molekuler, pengujian kualitatif/kuantitatif mikroba spesifik
		37 Pedoman penyusunan metodologi riset, metodologi kualitatif, dan metodologi kuantitatif
		38 Rancangan materi penyuluhan/produk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
		39 Kegiatan penyuluhan/produk komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tingkat dasar
		40 Konsep pengawasan obat dan makanan
		41 Dasar hukum penyusunan rancangan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Peraturan Badan POM, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan
		Kemampuan Umum:
		1 Wawasan tentang industri dan peranannya dalam perekonomian
		2 Undang-Undang Perindustrian
272	Pengawas Industri	Kemampuan Khusus:
		1 Definisi dan metode pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri
		2 Substansi/bidang pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri
		3 Tingkat risiko, pemberian sanksi dan rekomendasi atas hasil pengawasan dan pengendalian dalam rangka pembinaan industri
		Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
		2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
273	Pengawas Jaminan Produk Halal Ahli Pertama	3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
		4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
		5 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan Sertifikasi dan Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal
		6 Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
		Kompetensi Khusus:
		1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
		3 Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
		4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal
		5 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
		6 Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
		7 Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
		Kompetensi Umum:
		Pengetahuan Dasar Terkait Pengelolaan Jaringan Utilitas, yang meliputi :
274	Pengawas Jaringan Utilitas	1 Pemasangan Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu
		2 Jaringan Distribusi Air Minum
		3 Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
		4 Jaringan Distribusi Pipa Gas
		5 Jaringan Distribusi Telekomunikasi
		Kompetensi Khusus:
		Pelaksanaan Teknis Pemasangan Jaringan Utilitas, yang meliputi:
		1 Jaringan Utilitas di Jalan dan Jaringan Utilitas Terpadu
		2 Jaringan Distribusi Air Minum
		3 Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
		4 Jaringan Distribusi Pipa Gas
		5 Jaringan Distribusi Telekomunikasi
275	Pengawas Kegiatan Kepelabuhanan	Kemampuan Umum:
		1 Bahasa Inggris Maritim
		2 Teknologi informatika
		3 Ilmu Ekonomi
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar-dasar Kepelabuhanan
		2 Dokumen Kepelabuhanan dan Dokumen Pengangkutan
		3 Peraturan nasional dan konvensi internasional
		4 Kepedulian Lingkungan
		5 K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		6 Sistem Manajemen Keselamatan Kapal
		7 Jasa dan Fasilitas Pelabuhan
		8 IMDG Code
		9 ISPS Code
		10 Manajemen Angkutan Laut
		11 Keagenan
		12 Logistik dan Supply Chain Management
		13 Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal
		14 Manajemen Mutu

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		15 Manajemen Perusahaan Pelayaran
276	Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama	1 Analisis kebutuhan kegiatan pengawasan alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan tingkat kesulitan I dan II serta barang dalam keadaan terbungkus berat, jumlah hitungan, gas cair, panjang, dan luas serta satuan ukuran pada produk periklanan komersial yang ditayangkan di media sosial 2 Administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana 3 Penyuluhan dan konsultasi kepada pelaku usaha tentang ketentuan metrologi legal
277	Pengawas Keselamatan Pelayaran Terampil	Kompetensi Umum: Peraturan/ketentuan nasional dan internasional tentang pelayaran Kompetensi Khusus: 1 Perencanaan pengawasan keselamatan pelayaran 2 Kenavigasian 3 Pemeriksaan kelaiklautan kapal 4 Manajemen keselamatan kapal 5 Pemanduan 6 Penegakan hukum di laut dan penyelamatan 7 Kesyahbandaran 8 Kelancaran lalu lintas angkutan laut
278	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama	Kemampuan Khusus: 1 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan 2 Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan 3 Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan 4 Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan 5 Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 6 Menggunakan sumber daya untuk dialokasikan dalam penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mematuhi tenggat waktu, dan mengomunikasikan kendala yang dihadapi kepada kolega atau atasan. 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
279	Pengawas Koperasi Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Kebijakan pengawasan koperasi 2 Manajemen perkoperasian Kemampuan Khusus: 1 Pemeriksaan koperasi 2 Penilaian kesehatan koperasi 3 Penyusunan laporan hasil pemeriksaan 4 Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
280	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Definisi yang berkaitan dengan lingkungan hidup 2 Peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3 Hak asasi untuk lingkungan yang baik dijamin oleh negara 4 Persyaratan perizinan berusaha 5 Sengketa lingkungan 6 Pengawas lingkungan hidup 7 Tugas dan fungsi pengawas lingkungan hidup 8 Tahapan kegiatan pengawasan lingkungan hidup 9 Hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum 10 Jenis-jenis Penegakan Hukum 11 Dokumen lingkungan yang berlaku di Indonesia 12 Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh Pengawas Lingkungan Hidup 13 Kode etik yang harus ditegakkan oleh Pengawas Lingkungan Hidup Kemampuan Khusus: 1 Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek persetujuan berusaha terkait persetujuan lingkungan 2 Dasar hukum dan ketentuan yang menjadi acuan pengawasan dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan 3 Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengendalian pencemaran Air dan/atau Laut 4 Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengendalian pencemaran udara 5 Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan B3 6 Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan Limbah B3

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		7 Dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek pengelolaan Limbah Non B3
281	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Istilah di bidang pengawasan dan pengujian mutu dan keamanan pangan, perkarantina, peternakan, budidaya pertanian, kelembagaan 2 UU Pangan, UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, UU Perlindungan Konsumen, UU Standarisasi, UU Halal, UU Karantina, UU Perkebunan, UU Hortikultura, UU Peternakan, PP Label dan Iklan Pangan, PP Keamanan Mutu dan Gizi Pangan, PP Indikasi Geografis, Permentan tentang Pengawasan Keamanan PSAT di Pemasukan, Keamanan dan Mutu PSAT, Sistem Pertanian Organik, GAP, GHP, GMP, GRP, Pelarangan Bahan Kimia pada Beras, Tindakan Karantina untuk Pemasukan PSAT Kompetensi Khusus: 1 Lembaga Pengawas Pangan, Lembaga Pengujian, Lembaga Sertifikasi Produk/Profesi, Lembaga Akreditasi, Lembaga Standar Internasional, termasuk di dalamnya personil/SDM yang menjalankan fungsi dan tugas terkait bidang keamanan dan mutu pangan hasil pertanian 2 SNI Produk Pangan Hasil Pertanian, SNI Sistem terkait Mutu dan Keamanan Pangan, Standar Internasional terkait Mutu dan Keamanan pangan, Persyaratan Dasar Keamanan Pangan (SSOP, GAP, GHP, GMP, GRP, GFP), Sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), Persyaratan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan PSAT, Persyaratan Keamanan PSAT/PSAH 3 Mekanisme Pengawasan untuk Pemasukan PSAT, Pre Market, Post Market, Mekanisme Pengujian Mutu Hasil Pertanian (Pengujian Cepat dan Pengujian dengan Instrumen), Mekanisme Pengambilan Contoh, Mekanisme Pengawasan Pemasukan Agens Hayati 4 Cemarkan Biologi, Kimia, Fisika
282	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Regulasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 Pengetahuan Bidang Pakan Ternak 3 Regulasi Bidang Pakan Kompetensi Khusus: Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan (Produksi, Pendaftaran, Peredaran, Pengujian, Bahan Pakan, Pakan Hijauan, Pakan Olahan)
283	Pengawas Mutu Pakan Pemula	Kompetensi Umum: 1 Regulasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 Pengetahuan Bidang Pakan Ternak 3 Regulasi Bidang Pakan Kompetensi Khusus: Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan (Produksi, Pendaftaran, Peredaran, Pengujian, Bahan Pakan, Pakan Hijauan, Pakan Olahan)
284	Pengawas Mutu Pakan Terampil	Kompetensi Umum: 1 Regulasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 Pengetahuan Bidang Pakan Ternak 3 Regulasi Bidang Pakan Kompetensi Khusus: Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan (Produksi, Pendaftaran, Peredaran, Pengujian, Bahan Pakan, Pakan Hijauan, Pakan Olahan)
285	Pengawas Penanggulangan Pencemaran dan Musibah SAR	Kemampuan Umum: 1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim 2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika Kemampuan Khusus: 1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar 2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi 3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR 4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal 5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan 6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya 7 Kecakapan Bahari 8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja 9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan 10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan 11 Pengenalan Permesinan Kapal 12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika 13 Dasar-dasar Akuntansi 14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut 15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait 16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal 17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal 18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
286	Pengawas Pendataan Statistik	Kemampuan Umum: Statistik dasar Kemampuan Khusus: 1 Pengumpulan data 2 Pengolahan data 3 Evaluasi kegiatan statistik
287	Pengawas Penyelenggara Pemilu	Kemampuan Umum: 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 2 Informasi Kepemilihan Dasar

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kemampuan Khusus:
		1 Pelanggaran dan Sengketa Pemilu
		2 Pengawasan Pemilu
		3 Persidangan terhadap Pelanggaran Pemilu
		4 Pemantauan Putusan Penanganan Pelanggaran Pemilu
		5 Tindak lanjut dan Pemantauan Putusan
288	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		PP 2 Tahun 2018, UU 23 Tahun 2014, PP 60 Tahun 2008, PP 12 Tahun 2017, UU 5 Tahun 2014, Permendagri 15 Tahun 2019, Permendagri 23 Tahun 2020, Permendagri 61 Tahun 2019, Permenpan 10 Tahun 2019, Permendagri 18 Tahun 2020, UU 32 Tahun 2004, Permenpan 36 tahun 2020, PP 18 Tahun 2016, UU 25 Tahun 2009, PP 38 Tahun 2007
		Kemampuan Khusus:
		1 Butir kegiatan jenjang jabatan PPUPD
		2 Tugas PPUPD
		3 Urusan pemerintahan
		4 Pemerintahan daerah
		5 Standar kompetensi jabatan PPUPD
		6 Unsur SPIP
		7 Manajemen PNS
		8 Fokus dan Sasaran Kebijakan Pengawasan
		9 Pelayanan Dasar
		10 Kompetensi ASN
		11 Angka kredit PPUPD
		12 Pembinaan dan pengawasan
289	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	1 Penyiapan bahan perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan
		2 Penyelenggaraan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan
		3 Pemeriksaan legalitas pelaku usaha dan barang, perizinan bidang perdagangan, serta data lain yang diperlukan
		4 Verifikasi bahan dalam pelaksanaan kegiatan penataan jaringan distribusi dan logistik pengelolaan sarana distribusi perdagangan
		5 Analisis kelayakan pelaku usaha, barang, jasa, dan kegiatan perdagangan
		6 Identifikasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan tindak pidana pengawasan barang, jasa dan kegiatan perdagangan
290	Pengawas Perikanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Peraturan Kelautan dan Perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Perencanaan pengawasan perikanan
		2 Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
		3 Penanganan pelanggaran bidang perikanan
291	Pengawas Radiasi Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		UU No. 10 Tahun 1997
		Kemampuan Khusus:
		1 Organisasi BAPETEN (Peraturan BAPETEN No 9 Tahun 2020)
		2 Peraturan, nilai, tuisi, dan tata Kelola ASN dan jabatan fungsional pengawas radiasi
		3 Fisika Nuklir
		4 Proteksi Radiasi (Peraturan BAPETEN No. 4 Tahun 2013)
		5 Teknologi Nuklir
		6 Pengelolaan Limbah Radioaktif (PP No 61 tahun 2013)
292	Pengawas Salvage dan Pekerjaan Bawah Air	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
293	Pengawas Transportasi Darat	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
		2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
		4 PM Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional
		5 PM Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang
		6 PM PAN-RB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar-dasar pengaturan lalu lintas
		2 Prinsip dasar keselamatan angkutan jalan
		3 Operasional terminal angkutan jalan
		4 Operasional angkutan jalan
		5 Perencanaan dan organisir kegiatan operasional transportasi
		6 Mitigasi permasalahan yang muncul dalam operasional Transportasi
		7 Prinsip-prinsip dasar Transportasi Darat
		8 Transportasi darat ramah lingkungan
		9 Infrastruktur transportasi darat
		10 Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana transportasi darat
		11 Teknologi manajemen sarana dan prasarana transportasi darat
		12 Potensi risiko dalam operasional sarana dan prasarana transportasi darat
294	Pengawas Transportasi Perkeretaapian	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
		2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api
		6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
		7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
		Kemampuan Khusus:
		1 Operasional sarana dan prasarana Transportasi Perkeretaapian
		2 Pengawasan penyelenggaraan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		3 Pengaturan perjalanan kereta api
		4 Awak sarana perkeretaapian
		5 Perawatan, pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		6 Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
		7 Pemeriksaan kecelakaan perkeretaapian
295	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Peraturan Kelautan dan Perikanan
		Kemampuan Khusus:
		1 Perencanaan Tata Ruang laut dan Zonasi Kawasan
		2 Pemanfaatan Ruang Perairan dan Sumber Daya di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil
		3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
		4 Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi
		5 Valuasi Ekonomi Sumber daya Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau Kecil
296	Pengelola Keprotokolan	Kemampuan Umum:
		1 Kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Negara dalam layanan keprotokolan dalam peraturan perundang-undangan
		2 Pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan berdasarkan peraturan perundang-undangan
		3 Pemahaman dasar mengenai konsep pengamanan yang berkaitan dengan administrasi/protokol berdasarkan peraturan perundang-undangan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pelayanan keprotokolan terkait tata tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		2 Pelayanan keprotokolan terkait tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		3 Pelayanan keprotokolan terkait tata penghormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		4 Pelayanan keprotokolan terkait tata cara protokol internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan
		5 Protokol Kepresidenan dan Pejabat Negara/Presiden/Pemerintah lainnya
297	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Kebijakan bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyiapan dan pelaksanaan Pengendalian Penyakit Ikan
		2 Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya
		3 Pengendalian Residu
		4 Konsep dasar, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penataan obat ikan Pengendalian Peredaran Obat Ikan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
298	Pengelola Keselamatan Ketenagalistrikan	5 Konsep dasar, metode, peraturan, tata cara prosedur rehabilitasi kawasan Lingkungan Perikanan Budidaya
		6 Konsep dasar, metode, peraturan, tatacara prosedur Pemantauan Fungsi Kawasan Budidaya
		Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan mengenai regulasi bidang keselamatan ketenagalistrikan
		2 Pedoman dan prosedur kerja terkait dengan bidang keselamatan ketenagalistrikan
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengetahuan terkait permohonan registrasi sertifikat laik operasi instalasi tenaga listrik
		2 Pengetahuan pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
		3 SNI Wajib Ketenagalistrikan
		4 Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan oleh badan usaha ketenagalistrikan
		5 Sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik dan keselamatan ketenagalistrikan
299	Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan	6 NSPK Keselamatan Ketenagalistrikan
		7 Aplikasi pelayanan Sertifikasi Laik Operasi
		8 Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah
		9 Sertifikasi instalasi penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
		10 Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan dalam rangka penghargaan bidang keselamatan ketenagalistrikan
		Kemampuan Umum:
		1 Pedoman tentang pembudidayaan ikan
		2 Pengetahuan umum terkait bidang kelautan dan perikanan
		3 Peraturan terkait sektor Kelautan dan Perikanan terkait UU dan PP
		4 Peraturan Kelautan dan Perikanan
		5 Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap
300	Pengelola Layanan Kesehatan	6 Sistem manajemen keamanan pangan
		7 Harmonisasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
		8 Pengenalan bahan baku hasil perikanan
		9 Strategi Kebijakan Ekonomi Biru Bidang Kelautan dan Perikanan
		10 Dasar-dasar/falsafah penyuluhan perikanan
		11 Inovasi Difusi dan Adopsi
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan kawasan perikanan budidaya
		2 Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan
		3 Pengelolaan Bahan Baku Pakan Ikan dan Pakan Ikan
		4 Cara Penanganan Ikan yang Baik
301	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5 Pengelolaan logistik hasil kelautan dan perikanan
		6 Peningkatan Kewirausahaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
		7 Peningkatan Akses Pasar Dalam Negeri
		8 Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
		9 Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan
		10 Identifikasi data kesesuaian dan kelayakan kawasan
		11 Identifikasi data kesesuaian perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keaneka ragaman hayati laut pada tingkat spesies dan genetik jenis ikan
		12 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Materi Teknis Kawasan
		13 Kelompok Sumberdaya Ikan
		14 Identifikasi komponen kapal perikanan
		15 Identifikasi Sertifikasi Awak Kapal Perikanan
300	Pengelola Layanan Kesehatan	16 Identifikasi komponen mesin dan alat penangkapan ikan
		17 Identifikasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan
		18 Sistem manajemen keamanan pangan
		19 Sistem manajemen mutu pengujian
		20 Pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sektor tangkap
		21 Ketertelusuran dan penarikan produk pangan
		22 Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan
		23 Pengelolaan sistem pemantauan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		24 Pengoperasian armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
		25 Kelembagaan Sektor Kelautan dan Perikanan
		26 Akses teknologi dan informasi sektor kelautan dan perikanan
300	Pengelola Layanan Kesehatan	27 Kemitraan Usaha dan Pembiayaan/permodalan sektor kelautan dan perikanan
		28 Pengolahan Data, Produktivitas dan Skala usaha Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha Perikanan
		Kemampuan Umum:
		UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN; Core Value ASN BerAkhlak; PP 11 Tahun 2017; PP 17 Tahun 2020
		Kemampuan Khusus:
		1 Regulasi terkait dengan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan
		2 Regulasi terkait promosi kesehatan, standar kompetensi nakes
		3 Jaminan kesehatan nasional
		4 Etika dan hukum kesehatan
		5 Regulasi kesehatan dan keselamatan kerja
		6 Regulasi terkait perencanaan bidang kesehatan
301	Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kompetensi Umum:
		Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Kompetensi Khusus:
		1 Kebijakan terkait kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
302	Pengelola Penanganan Perkara	2 Kebijakan terkait perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak
		3 Kebijakan terkait standar layanan perlindungan perempuan dan anak
		Kemampuan Umum:
		1 Pancasila
		2 Kewarganegaraan
		3 Pengantar Ilmu Hukum
		4 Pengantar Hukum Indonesia
		5 Geografi
		6 Ekonomi
		7 Sejarah
		8 Sosiologi
		9 Seni dan Budaya
		10 Olahraga
		11 Politik
		12 Agama
		13 Teknologi
		Kemampuan Khusus:
		1 Perundang-Undangan tentang Kejaksaan
		2 Administrasi Data
		3 Operasi Perangkat Lunak dan Pengolahan Data
		4 Penyusunan Laporan
		5 Pengetahuan Umum Hukum Acara Pidana
		6 Pengetahuan Umum Hukum Acara Perdata
303	Pengelola Pencarian dan Pertolongan	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
		2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
		5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 33 Tahun 2021
		6 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Sarana Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan
		9 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia
		10 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		11 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Latihan Pencarian dan Pertolongan
		12 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		13 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		14 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
		15 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengakreditasi Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan Bangunan
		Kompetensi Khusus:
		1 Teknik operasi SAR di gunung dan hutan
		2 Teknik operasi SAR di ketinggian
		3 Teknik operasi SAR di perairan
		4 Teknik pertolongan pertama
304	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	1 Identifikasi/reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa
		2 Penyusunan spesifikasi teknis dan KAK
		3 Penyusunan perkiraan harga pada tahapan pengadaan
		4 Perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan
		5 Perumusan organisasi pengadaan
		6 Pengelolaan risiko dan risiko dalam perencanaan pengadaan
		7 Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi
		8 Reviu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa
		9 Penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran dan pengelolaan sanggah
		10 Penyusunan daftar penyedia barang/jasa pemerintah
		11 Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan persyaratan khusus dan/atau spesifik
		12 Risiko pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
		13 Data dan informasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
		14 Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
		15 Pembentukan tim pengelola kontrak
		16 Pengendalian kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		17 Serah terima hasil pengadaan barang/jasa pemerintah
		18 Evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah
		19 Perumusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah dalam bentuk kuitansi, bukti
		20 Risiko pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
		21 Identifikasi dan pengumpulan bahan/data/informasi untuk melakukan persiapan dan pengendalian kontrak, serta evaluasi kinerja penyedia pengadaan barang/jasa
		22 Perencanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola dan persiapan pengadaan barang/jasa secara swakelola
		23 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola
		24 Pengawasan pengadaan barang/jasa secara swakelola
		25 Risiko pengadaan barang/jasa secara swakelola
		26 Identifikasi dan pengumpulan bahan, data, dan informasi dalam pengadaan barang/jasa secara swakelola
305	Pengelola Peralatan Keselamatan Pelayaran	Kemampuan Umum: 1 Matematika Dasar 2 Bahasa Inggris Maritim 3 Teknologi Informatika 4 Kepedulian Lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 5 Sistem Manajemen Kapal Kemampuan Khusus: 1 Peraturan Nasional dan Konvensi Internasional 2 Konstruksi dan Stabilitas Kapal 3 Mesin Penggerak Utama 4 Mesin Bantu 5 Sistem Kelistrikan Kapal, elektronika dan sistem kontrol 6 Ilmu Bahan 7 Perawatan dan Perbaikan Mesin Induk dan bantu
306	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama	Kemampuan Umum: Hukum dan Dasar Kebijakan Perikanan Tangkap Kemampuan Khusus: 1 Dinamika populasi, Keragaan SDI, Daerah Penangkapan Ikan dan Pengumpulan Data Perikanan 2 Rancang bangun kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan Metode Penangkapan Ikan 3 Melaksanakan tata kelola pengawakan kapal perikanan 4 Permesinan kapal perikanan, alat bantu penangkapan ikan, daerah penangkapan ikan dan tingkah laku ikan 5 Fungsi, Klasifikasi, Fasilitas dan Aktivitas Pelabuhan Perikanan
307	Pengelola Rumah Aman	Kemampuan Umum: Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Aman Kemampuan Khusus: 1 Pemenuhan Persyaratan Penempatan 2 Persiapan Perlindungan 3 Pelaksanaan Perlindungan 4 Pengamanan dan Pengawasan 5 Program Perlindungan 6 Pemantauan dan Pengendalian 7 Penghentian Perlindungan
308	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Kebijakan/Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan sumber daya air 2 Teori-teori pada bidang keilmuan yang terkait pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air Kompetensi Khusus: 1 Pengelolaan Sumber Daya Air 2 Pengelolaan Sungai 3 Pengelolaan Daerah Pantai 4 Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan 5 Pengelolaan Daerah Irigasi 6 Pengelolaan Daerah Rawa 7 Pengelolaan Daerah Air Tanah & Air Baku 8 Pengelolaan Bendungan 9 Pengelolaan Tampung Air Lainnya (Danau, Situ, Embung)
309	Pengembang Buku Elektronik	Kompetensi Umum: 1 Identifikasi asas penyelenggaraan sistem perbukuan 2 Penerapan proses pemerolehan naskah buku 3 Bentuk, jenis, dan isi buku 4 Aspek legalitas dan etika penerbita buku 5 Penerapan standar mutu buku 6 Ekosistem dan pelaku perbukuan 7 Evaluasi buku sesuai dengan perjenjangan buku 8 Bagian-bagian buku 9 Penerapan sikap kerja dalam proses penerbitan buku Kompetensi Khusus: 1 Proses produksi 2 Regulasi perbukuan 3 Pengembangan aset audio visual 4 Perakitan buku elektronik

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
310	Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Pengantar pemetaan potensi kewirausahaan
		2 Pengantar pemetaan data kewirausahaan
		3 Pengantar analisis usaha
		4 Kolaborasi stakeholder
		5 Pengantar pengembangan teknologi informasi usaha
		6 Pengantar asesmen teknologi informasi dalam usaha
		7 Pengantar inkubasi wirausaha
		8 Pengantar pembiayaan wirausaha
		9 Pengantar pengembangan permodalan wirausaha
		10 Pengantar pengembangan ekosistem bisnis
		11 Pengantar kurikulum kewirausahaan
		12 Pengantar pengembangan kewirausahaan
		Kemampuan Khusus:
		1 Praktik pemetaan potensi kewirausahaan
		2 Perumusan konsepsi survey
		3 Praktik analisis usaha
		4 Konsultasi bisnis
		5 Praktik konsultasi bisnis
		6 Pendampingan usaha
		7 Praktik pendampingan usaha dalam lingkup perizinan dan pembukuan
		8 Praktik pengembangan usaha baru berbasis teknologi
		9 Praktik pengembangan inkubator wirausaha pemerintah atau swasta
		10 Pengembangan ekosistem bisnis
		11 Kebijakan kewirausahaan
		12 Program pengembangan kewirausahaan
		13 Pemantauan pelaksanaan kebijakan, program, atau kegiatan pengembangan kewirausahaan
		14 Praktik pemantauan pengembangan UMK
311	Pengembang Kurikulum Ahli Pertama	1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan
		3 Model konsep kurikulum
		4 Landasan pengembangan kurikulum
		5 Prinsip pengembangan kurikulum
		6 Komponen kurikulum
		7 Inovasi kurikulum
		8 Ekosistem pengembangan kurikulum
		9 Pengelolaan kurikulum
		10 Kerangka program pengembangan kurikulum
		11 Pengumpulan data untuk penyusunan program pengembangan kurikulum
		12 Perbaikan draf kurikulum
		13 Petunjuk pelaksanaan uji coba draf kurikulum
		14 Naskah pengarah kegiatan uji coba draf kurikulum
		15 Uji coba draf kurikulum
		16 Pengumpulan dan klasifikasi data uji coba draf kurikulum
		17 Laporan hasil uji coba draf kurikulum
		18 Revisi draf kurikulum sesuai hasil analisis
		19 Rencana perbaikan draf kurikulum berdasarkan uji coba
		20 Identifikasi draf kurikulum yang akan diperbaiki
		21 Pelaksanaan kegiatan perbaikan draf kurikulum
		22 Laporan hasil perbaikan draf kurikulum
		23 Program sosialisasi
		24 Pelaksanaan sosialisasi
		25 Pelaksanaan persiapan implementasi
		26 Koordinasi dengan instansi terkait
		27 Perencanaan kegiatan bimbingan teknis
		28 Perencanaan kegiatan pemantauan
		29 Perencanaan kegiatan penelitian pengembangan kurikulum
312	Pengembang Tafsir Al Quran Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur'an
		2 Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
		3 Makna dan arti kosakata bahasa Arab
		4 Struktur dan kaidah bahasa Arab
		5 Wawasan keislaman
		6 Perkembangan buku digital dan bentuknya
		7 Peran media sosial dalam publikasi dan diseminasi pengetahuan
		8 Ilmu komputer dasar
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Asbabun Nuzul
		2 Ilmu Makkiyyah dan Madaniyyah
		3 Ilmu Muhkam dan Mutasyabih
		4 Ilmu Nasakh wa Mansukh
		5 Ilmu Kisah Al-Qur'an
		6 Ilmu Qiraat Al-Qur'an

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		7 Nama dan proses turun dan sejarah pembukuan Al-Qur'an
		8 Manuskrip AL-Qur'an
		9 Terjemahan Al-Qur'an, pengertian, sejarah dan metodenya
		10 Implementasi bahasa Arab dalam penerjemahan Al-Qur'an
		11 Diskursus tafsir dan ilmu tafsir
		12 Metode dan corak penafsiran
		13 Sejarah dan dinamika perkembangan tafsir di Indonesia
		14 Bahasa Arab dan hubungannya dengan tafsir
		15 Isi dan kandungan beberapa surah dalam Al-Qur'an
313	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		Peraturan terkait jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan turunannya, termasuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023
		Kompetensi Khusus:
		1 Analisis pengembangan teknologi pembelajaran
		2 Perancangan pengembangan sumber belajar
		3 Pengembangan sumber belajar berbasis aneka sumber
		4 Penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
314	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	5 Difusi hasil pengembangan teknologi pembelajaran
		6 Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
		Kemampuan Umum:
		Regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan air, udara, lahan, ekosistem gambut, pesisir, laut, dan pengelolaan bahan dan limbah B3
315	Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	Kemampuan Khusus:
		Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
		Kemampuan Umum:
		Regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan air, udara, lahan, ekosistem gambut, pesisir, laut, dan pengelolaan bahan dan limbah B3
316	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	Kemampuan Khusus:
		Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan
		Kemampuan Umum:
		1 Wawasan Umum Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan
		2 Wawasan Umum Terkait Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
		3 Peraturan, Data dan Informasi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
		4 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan, Data dan Informasi Pengendali Ekosistem Hutan
		2 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		3 Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
		4 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
317	Pengendali Ekosistem Hutan Pemula	5 Pengendalian Perubahan Iklim
		6 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
		Kemampuan Umum:
		1 Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan
		2 Wawasan regulasi terkait peraturan perundang-undangan pelaksanaan kegiatan pengendali ekosistem hutan
		3 Wawasan regulasi terkait peraturan perundangan jabatan fungsional PEH
		4 Wawasan umum terkait lingkungan hidup dan kehutanan
		5 Wawasan umum terkait pelaksanaan kegiatan pengendalian ekosistem hutan
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		2 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		3 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
		4 Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya
		5 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya
		6 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Konservasi Sumber Daya
		7 Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
		8 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
		9 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
318	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil	10 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Hutan Lestari
		11 Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim
		12 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim
		13 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan Bidang Pengendalian Perubahan Iklim
		14 Penyiapan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
		15 Pelaksanaan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
		16 Pengembangan Pengendalian Ekosistem Hutan bidang Pengelolaan Perhutanan Sosial
		Kemampuan Umum:
		1 Regulasi Kebijakan dan regulasi pengelolaan hutan dan kehutanan di Indonesia
		2 Pengetahuan dasar dan wawasan umum bidang hutan dan kehutanan
		3 Dasar dasar kehutanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
319	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama	4 Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan
		Kemampuan Khusus:
		Pengetahuan dasar bidang pengendalian ekosistem hutan
		Kemampuan Umum:
		1 Peraturan Perundang-Undangan terkait Telekomunikasi
		2 Dasar-Dasar Telekomunikasi
		3 Komponen Elektronika
		4 Rangkaian Dasar Elektronika
		5 Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
		6 Dasar-Dasar Komputer
		7 Jaringan Komputer
		8 Perangkat Lunak
		9 Regulasi tentang Informatika
		10 Pemeliharaan Komputer
		Kemampuan Khusus:
		1 Antena, Propagasi, dan Saluran Transmisi
		2 Sistem Jaringan Telekomunikasi
		3 Modulasi Gelombang Radio
		4 Rangkaian Dasar Elektronika
		5 Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
		6 Elektronika Digital
		7 Jaringan Komputer
		8 Perangkat Lunak
		9 Pemeliharaan Komputer
320	Pengendali Frekuensi Radio Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Peraturan Perundang-Undangan terkait Telekomunikasi
		2 Dasar-Dasar Telekomunikasi
		3 Komponen Elektronika
		4 Rangkaian Dasar Elektronika
		5 Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
		6 Dasar-Dasar Komputer
		7 Jaringan Komputer
		8 Perangkat Lunak
		9 Regulasi tentang Informatika
		10 Pemeliharaan Komputer
		Kemampuan Khusus:
		1 Antena, Propagasi, dan Saluran Transmisi
		2 Sistem Jaringan Telekomunikasi
		3 Modulasi Gelombang Radio
		4 Rangkaian Dasar Elektronika
		5 Rangkaian Elektronika Telekomunikasi
		6 Elektronika Digital
		7 Jaringan Komputer
		8 Perangkat Lunak
		9 Pemeliharaan Komputer
321	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan
		2 Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
		3 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi SDI
		4 Organisasi kesehatan hewan akuatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
		5 Permen PAN RB nomor 46 tahun 2022
		6 Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi, dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
		Kemampuan Khusus:
		1 Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan - mampu menyebutkan dan menjelaskan tugas dan fungsi karantina
		2 Sanitary PhytoSanitary (SPS) Agreement terhadap perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan
		3 Organisasi kesehatan hewan akuatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOAH)
		4 Peraturan Pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang PNBP
		5 Permen KP nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasukan media pembawa
		6 Permen KP nomor 38 tahun 2019 tentang pengeluaran media pembawa
		7 Permen KP nomor 9 tahun 2019 tentang Instalasi karantina Ikan (IKI)
		8 Permen KP nomor 32 tahun 2012 tentang jenis tatacara, penerbitan dan format dokumen tindakan karantina
		9 Permen KP nomor 19 tahun 2020 tentang larangan pemasukan pembudidayaan peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang berbahaya
		10 Permen KP nomor 8 tahun 2022 tentang jenis komoditas wajib periksa karantina ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
		11 Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi, dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
		12 Kepmen KP nomor 55 tahun 2022 tentang pemasukan dan pengeluaran media jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		13 Kepmen 17 tahun 2021 tentang penetapan jenis PIK organisme penyebab golongan dan media pembawa
		14 Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan karantina
		15 Pedoman pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif
		16 Pengelolaan laboratorium
		17 Teknik pengambilan sampel
322	Pengendali Kedaruratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	Kemampuan Umum: 1 Dasar-dasar pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup 2 Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) 3 Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 4 Penyusunan Program Kedaruratan pengelolaan B3, Limbah B3, dan NonB3 5 Penanggulangan kedaruratan pengelolaan B3, Limbah B3, dan NonB3 Kemampuan Khusus: 1 Pengelolaan B3 2 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 3 Penyusunan program kedaruratan pengelolaan B3, Limbah B3, dan Non B3 4 Penanggulangan kedaruratan pengelolaan B3, Limbah B3, dan Non B3 5 Pemulihan fungsi lingkungan hidup 6 Pemahaman kebencanaan 7 Pengelolaan sampah 8 Prosedur tindakan pencegahan risiko bahaya dalam keselamatan dan kesehatan kerja 9 Perubahan Iklim 10 Prosedur tindakan mitigasi risiko bahaya dalam keselamatan dan kesehatan kerja 11 Prosedur tindakan penanganan risiko bahaya dalam keselamatan dan kesehatan kerja 12 Aspek Pencemaran Lingkungan
323	Pengendali Konten Internet	Kemampuan Umum: 1 Pembuatan Konten Digital 2 Pemasaran Media Sosial 3 Pemasaran Konten 4 Blogging dan Penulisan Online 5 Video Marketing dan Produksi 6 Podcasting 7 E-commerce dan Perdagangan Online 8 Strategi Media Sosial 9 Iklan Online dan PPC (Pay-Per-Click) 10 Manajemen Reputasi Online 11 Penggunaan Media Sosial untuk Bisnis 12 Keterlibatan Pengguna dan Komunitas Online 13 Email Marketing 14 Personal Branding di Internet Kemampuan Khusus: 1 Pengoptimalan Mesin Pencari (SEO) 2 Desain Web dan Pengembangan 3 Analitik Web dan Pengukuran Data 4 Keamanan dan Privasi Online 5 Hak Cipta dan Lisensi Konten Digital 6 Grafis dan Desain Visual untuk Web 7 Pengembangan Aplikasi Mobile 8 Strategi Konten Multiplatform 9 Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) di Web 10 Blockchain dan Implikasinya pada Konten Web 11 Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pembuatan Konten 12 Etika dan Hukum dalam Konten Digital 13 Analisis Sentimen pada Media Sosial 14 Internet of Things (IoT) dan Konten Web
324	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama	Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait OPT/DPI 2 Budidaya tanaman 3 Pengetahuan umum OPT/DPI 4 Pengendalian OPT/penanganan DPI secara umum Kompetensi Khusus: 1 Pengenalan OPT 2 Pengenalan dan penanganan DPI 3 Musuh alami 4 Pengendalian OPT 5 Koleksi OPT 6 Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
325	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula	Kompetensi Umum: 1 Regulasi terkait OPT/DPI 2 Budidaya tanaman 3 Pengetahuan umum OPT/DPI 4 Pengendalian OPT/penanganan DPI secara umum Kompetensi Khusus: 1 Pengenalan OPT 2 Pengenalan dan penanganan DPI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Musuh alami
		4 Pengendalian OPT
		5 Koleksi OPT
		6 Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
		Kompetensi Umum:
		1 Regulasi terkait OPT/DPI
326	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil	2 Budidaya tanaman
		3 Pengetahuan umum OPT/DPI
		4 Pengendalian OPT/penanganan DPI secara umum
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengenalan OPT
		2 Pengenalan dan penanganan DPI
		3 Musuh alami
		4 Pengendalian OPT
		5 Koleksi OPT
		6 Pengamatan, peramalan dan analisis OPT
		Kemampuan Umum:
327	Pengevaluasi Penerbangan	1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
		2 Peraturan pemerintah No. 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang penerbangan
		3 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
		4 ICAO Annexes
		5 Keudaraan
		Kemampuan Khusus:
		1 Peralatan di Bandar Udara
		a. PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
		b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara.
		c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.
		d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan.
		e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual of Standard CASR-Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome).
		2 Fasilitas di Bandar Udara
		a. PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
		b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara.
		c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara.
		d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Manajemen Lalu Lintas dan Telekomunikasi Penerbangan.
		e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 tentang Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-Bagian 139 (Manual of Standard CASR-Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodrome).
		3 Keamanan Penerbangan
		a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional;
		b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara;
		c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan;
		d. PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);
		e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional.
		f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara.
		g. Keudaraan.
		4 Keselamatan Penerbangan
		a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara;
		b. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 30 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Manual Of Standard CASR Part 139) Volume IV Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK);
		c. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 479 Tahun 2015 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 (Advisory Circular CASR Part 139-10), Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan.
		e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 038 Tahun 2017 Tentang Apron Management Service.
		5 Perawatan peralatan penerbangan
		a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 164 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 145 Amandemen tentang Organisasi Perusahaan Perawatan Pesawat Udara;
		b. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 75 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 65 (Civil Aviation Safety Regulations Part 65) Sertifikasi Ahli Perawatan Pesawat Udara (Licensing Of Aircraft Maintenance Engineer) Edisi 1 Amandemen 0 (Edition 1 Amendment 0);
		c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara;
		d. Advisory Circular 171 – 05 Petunjuk dan Tata Cara Penyelenggaraan Kalibrasi Fasilitas Navigasi dan Prosedur Penerbangan;
		e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan.
		6 Operasi Pesawat Udara
		a. Civil Aviation Safety Regulation Part 61 Licensing of Pilots and Flight Instructors;
		b. Civil Aviation Safety Regulation Part 91 General Operating and Flight Rules;
		c. Civil Aviation Safety Regulation Part 135 Certification and Operating Requirement: For Commuter and Charter Certificate Holders;
		d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Pelatihan bagi Inspektur Penerbangan;
		e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan.
328	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Jabatan Fungsional
		2 Tugas, Fungsi dan Peran Jabatan Penggerak Swadaya Masyarakat dalam pembangunan Desa, Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		3 Identifikasi khalayak sasaran penggerakan
		Kemampuan Khusus:
		1 Desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
		2 Kelembagaan desa
		3 Peraturan perundang-undangan mengenai desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
		4 Kewenangan pembangunan desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi
		5 Konsep Kemandirian Masyarakat
		6 Jejaring Kemitraan dan Inovasi
		7 Pemberdayaan Masyarakat
329	Penghulu Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
		2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
		3 Pengertian dan Urgensi Moderasi Beragama
		4 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
		5 Profil Kementerian Agama dan struktur pemerintahan RI dari pusat sampai daerah
		6 Cara membaca Al-Qur'an
		7 Ketentuan penggunaan tata bahasa dalam bahasa Arab dan Inggris
		Kemampuan Khusus:
		1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
		2 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974
		3 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan
		4 Kepdirjen Bimas Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Juknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan
		5 PP Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk (PNBPNR)
		6 Kompilasi Hukum Islam
		7 Fikih Munakahat Klasik
		8 Fikih Munakahat Kontemporer
		9 Kandungan Ayat Al-Qur'an tentang Nikah, Talak, dan Rujuk, Keluarga Sakinah, dan Kebimasislamatan
		10 Tugas dan fungsi KUA dalam bidang Kebimasislamatan
		11 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang JF Penghulu, PMA Nomor 16 Tahun 2021 tentang Juknis JF Penghulu, dan Perpres Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penghulu
330	Penguji Kendaraan Bermotor Pemula	Kemampuan Umum:
		1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
		4 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
		5 Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor
		6 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		7 Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) pengujian kendaraan bermotor
		8 Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor
		Kemampuan Khusus:
		1 Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor
		2 Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor
		3 Sistem kendaraan bermotor
		4 Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
		5 Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor
		6 Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor
		7 SDM pengujian kendaraan bermotor
		8 Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor
		Kemampuan Umum:
		1 Peraturan Perundang-Undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
331	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	2 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
		3 Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
		4 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor
		5 Peraturan Perundang-Undangan tentang Akreditasi Pengujian Kendaraan Bermotor
		6 Peraturan Perundang-Undangan tentang Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan Bermotor
		7 Peraturan Perundang-Undangan tentang Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) pengujian kendaraan bermotor
		8 Etika Profesi Penguji Kendaraan Bermotor
		Kemampuan Khusus:
		1 Teknik pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor
		2 Teknik pengujian laik jalan kendaraan bermotor
		3 Sistem kendaraan bermotor
		4 Rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
		5 Fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor
332	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ahli Pertama	6 Sistem informasi pengujian kendaraan bermotor
		7 SDM pengujian kendaraan bermotor
		8 Teknik pengukuran dimensi dan daya angkut kendaraan bermotor
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
		4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
		5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
		6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan
		Kemampuan Khusus:
		1 Perencanaan kegiatan K3
333	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama	2 Pengujian K3
		3 Pengujian kompetensi K3
		4 Pengendalian K3
		5 Pengkajian K3
		6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
		1 Pengambilan contoh uji dan pengujian/kalibrasi tingkat kesulitan kompleks serta verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi
		2 Pengelolaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		3 Pengendalian pengujian/kalibrasi/sertifikasi/inspeksi
		4 Analisa kebutuhan pengembangan, serta verifikasi metode pengembangan metode pengujian/kalibrasi atau pengembangan skema sertifikasi/inspeksi
334	Penguji Mutu Barang Pemula	1 Penyiapan peralatan dalam pelaksanaan pengujian mutu barang/kalibrasi, penyiapan contoh uji dan pengujian tingkat kesulitan I
		2 Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		3 Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		4 Prosedur pemeliharaan dan perawatan serta perekaman kondisi lingkungan pada ruang dan peralatan pengujian/kalibrasi
335	Penguji Mutu Barang Terampil	1 Pengambilan contoh tingkat kesulitan I, penyiapan contoh dan pengujian/kalibrasi Tingkat kesulitan II serta penghitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel ≤ 2
		2 Identifikasi dan pengumpulan bahan untuk pelaksanaan sistem manajemen mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		3 Identifikasi data serta penyiapan peralatan dan/atau bahan yang diperlukan dalam pengendalian mutu Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi/Inspeksi
		4 Penghitungan persediaan, verifikasi kesesuaian dan penyimpanan bahan pembantu/standar pengujian/kalibrasi
336	Penguji Perangkat Telekomunikasi Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Dasar-dasar Elektronika
		2 Dasar-dasar Kelistrikan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Dasar Telekomunikasi
		4 Telekomunikasi Seluler
		5 Satelit
		6 Radar
		7 Antenna
		8 Dasar-dasar Komputer
		9 Jaringan Komputer
		10 Perangkat Lunak
		11 Dasar Elektromagnetik
		12 Parameter RF
		13 Dasar Modulasi
		14 Frekuensi dan Panjang Gelombang
		15 Pengoperasian Komputer
		16 Literasi Digital
		17 Statistika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar-dasar Elektronika
		2 Dasar-dasar Kelistrikan
		3 Optik
		4 Rangkaian Digital
		5 Dasar Elektromagnetik
		6 Frekuensi dan Panjang Gelombang
		7 Daya RF, gain dan attenuasi
		8 Antenna dan Propagasi
		9 S-Parameter
		10 Komponen RF
		11 Electromagnetic Compatibility (EMC)
		12 Alat Pengolah Perkantoran
		13 Literasi Digital
		14 Statistika
337	Penguji Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU No 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
		2 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3 Permenpan RB No 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian
		4 Permenhub No. 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian Dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian
		Kemampuan Khusus:
		1 PM 60 Tahun 2012 tentang Standar Teknis Jalur Kereta Api
		2 PM 29 Tahun 2011 tentang Stasiun
		3 PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian
		4 PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian
		5 PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian
		6 Rencana kerja, prosedur, tata cara pengujian jalur dan bangunan, fasilitas pengoperasian kereta api serta K3 pelaksanaan pengujian
338	Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang No 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian
		2 PM Perhubungan Tahun 2011
		3 Permenpan RB No. 32 Tahun 2022
		Kemampuan Khusus:
		1 Dinamika sarana
		2 Sarana Berpenggerak
		3 Sarana Tanpa Penggerak
		4 Sarana Peralatan khusus
		5 Sistem Mekanik Sarana KA
		6 Sistem Pengereman Sarana KA
		7 Instrument kabin masinis
		8 Pola pengoperasian sarana
		9 KRL
339	Penguji Sumber Daya Manusia Perkeretaapian	10 No identitas sarana KA
		11 Fungsi jabatan penguji sarana KA
		12 Pengujian statis dan dinamis sarana perkeretaapian
		13 K3LH
		14 Perawatan sarana perkeretaapian
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
		2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api
		6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
		7 PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
		Kemampuan Khusus:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		1 Operasional sarana dan prasarana Transportasi Perkeretaapian
		2 Pengawasan penyelenggaraan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		3 Pengaturan perjalanan kereta api
		4 Awak sarana perkeretaapian
		5 Perawatan, pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		6 Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
		7 Pemeriksaan kecelakaan perkeretaapian
340	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 2 PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah 3 Konsep dasar keuangan negara 4 Konsep dasar pengelolaan BMN/D 5 Mikro ekonomi dasar Kemampuan Khusus: 1 Konsep dasar penilaian 2 Penilaian properti dengan pendekatan pasar 3 Penilaian properti dengan pendekatan biaya 4 Penilaian properti dengan pendekatan pendapatan 5 Konsep dasar penilaian bisnis 6 Konsep dasar penilaian Sumber Daya Alam 7 Analisis terpisah di bidang penilaian = analisis HBU
341	Penilik Angkutan Laut	Kemampuan Umum: 1 Bahasa Inggris Maritim 2 Teknologi Informatika 3 Ilmu Ekonomi Kemampuan Khusus: 1 Dasar-dasar kepelabuhanan 2 Dokumen kepelabuhanan dan dokumen pengangkutan 3 Peraturan nasional dan konvensi internasional 4 Kepedulian lingkungan 5 K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 6 Sistem Manajemen Keselamatan Kapal 7 Jasa dan Fasilitas Pelabuhan 8 IMDG Code 9 ISPS Code 10 Manajemen Angkutan Laut 11 Keagenan 12 Logistik dan supply chain management 13 Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal 14 Manajemen mutu 15 Manajemen perusahaan pelayaran
342	Penilik Kelaiklautan Kapal	Kemampuan Umum: 1 Matematika dasar 2 Bahasa Inggris Maritim 3 Teknologi Informatika 4 Kepedulian lingkungan dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) 5 Sistem Manajemen Kapal Kemampuan Khusus: 1 Peraturan nasional dan konvensi internasional 2 Konstruksi dan stabilitas kapal 3 Mesin Penggerak Utama 4 Mesin Bantu 5 Sistem kelistrikan kapal, elektronika dan sistem kontrol 6 Ilmu bahan 7 Perawatan dan perbaikan mesin induk dan bantu
343	Penilik Kenavigasian	Kemampuan Umum: 1 Matematika dasar 2 Fisika terapan 3 Bahasa Inggris Maritim 4 Teknologi Informatika 5 Sistem manajemen kapal 6 Budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan Kemampuan Khusus: 1 Peraturan nasional dan konvensi internasional 2 Sistem navigasi elektronik 3 P2TL dan dinas jaga 4 Prosedur darurat dan SAR 5 Ilmu Pelayanan Datar 6 Isyarat visual 7 Teknik radio 8 Perjanjian internasional terkait komunikasi (ITC dan SOLAS) 9 Peraturan Radio 10 Service document

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		11 Telepon Radio
		12 GMDSS
344	Penilik Kepelabuhanan	Kemampuan Umum:
		1 Bahasa Inggris Maritim
		2 Teknologi Informatika
		3 Ilmu Ekonomi
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar-dasar kepelabuhanan
		2 Dokumen kepelabuhanan dan dokumen pengangkutan
		3 Peraturan nasional dan konvensi internasional
		4 Kepedulian lingkungan
		5 K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
		6 Sistem Manajemen Keselamatan Kapal
		7 Jasa dan Fasilitas Pelabuhan
		8 IMDG Code
		9 ISPS Code
		10 Manajemen Angkutan Laut
		11 Keagenan
		12 Logistik dan supply chain management
		13 Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal
		14 Manajemen mutu
		15 Manajemen perusahaan pelayaran
345	Penjaga Menara Suar	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaannya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang-Undang terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
346	Penjaga Tahanan	Kemampuan Umum:
		UU 1945, UU HAM, UU ASN
		Kemampuan Khusus:
		1 UU Pemasarakatan, KUHP, KUHP, Permenkumham Tata Tertib Lapas dan Rutan, Permenkumham Pengamanan Lapas dan Rutan, Permenpan JF Pengaman Pemasarakatan
		2 UU Narkotika, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024
347	Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama	1 Analisis data dan informasi terkait pengembangan standar mutu produk
		2 Analisis data dan informasi terkait penilaian mutu
		3 Identifikasi data dan informasi hasil audit dalam rangka penerapan sistem mutu
348	Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Permenpan RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an
		2 PMA No. 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan peredaran mushaf Al-Qur'an
		3 Kodifikasi Al-Qur'an
		4 Struktur kalimat dan perubahan kata dalam bahasa Arab
		Kemampuan Khusus:
		1 Ilmu Rasm
		2 Ilmu Dhabt
		3 Ilmu Waqaf Ibtida
349	Penyelam Scuba Kapal Kelas I	Kemampuan Umum
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
		Kemampuan Khusus
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaannya.
		7 Kecakapan Bahari.
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
		13 Dasar-dasar Akuntansi.
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut.
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
350	Penyelam Scuba Kapal Kelas II	Kemampuan Umum
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
		Kemampuan Khusus
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
		7 Kecakapan Bahari.
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
		13 Dasar-dasar Akuntansi.
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut.
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
351	Penyelam Scuba Kapal Kelas III	Kemampuan Umum
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
		Kemampuan Khusus
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
		7 Kecakapan Bahari.
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
		13 Dasar-dasar Akuntansi.
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut.
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
352	Penyelidik Bumi Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi
		2 Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Peran Penyelidik Bumi terkait tugas dan fungsi instansi di lingkungan Kementerian ESDM/Instansi lain/Pemerintah Provinsi
		3 Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Sumber daya mineral (mineral radioaktif) dan energi (batubara, minyak dan gas bumi, panas bumi, energi baru terbarukan)
		4 Pengetahuan regulasi dan kebijakan: Mitigasi bencana geologi
		5 Pengetahuan isu strategis: Minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, panas bumi, kebijakan satu peta (KSP), aturan pemanfaatan data minyak dan gas bumi (Permen ESDM No. 1 Tahun 2022), mitigasi bencana geologi, geopark, perubahan iklim global dan warisan geologi
		Kompetensi Khusus:
		1 Pengetahuan kajian data sekunder Geologi: petrologi-mineralogi, geomorfologi, cekungan sedimen tersier, struktur geologi-tektonik, vulkanologi
		2 Pengetahuan kajian data sekunder Geofisika: geofisika dasar, seismologi, metode geofisika, geostatistika, geofisika global
		3 Pengetahuan kajian data sekunder Kimia: kimia dasar, kimia terapan, geokimia
		4 Pengetahuan kajian data sekunder Geodesi: geomatika, penginderaan jauh, kartografi
		5 Pengetahuan kajian data sekunder Fisika: fisika dasar, instrumentasi
		6 Pengetahuan kajian data sekunder Teknik Sipil: geologi teknik
		7 Pengetahuan kajian data Geologi: petrologi-mineralogi, geomorfologi, stratigrafi-sedimentologi-paleontologi, struktur geologi-tektonik, vulkanologi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		8 Pengetahuan kajian data Geofisika: geofisika dasar, seismologi, metode geofisika, geofisika global
		9 Pengetahuan kajian data Kimia: kimia dasar (persamaan reaksi kimia), kimia terapan, geokimia
		10 Pengetahuan kajian data Geodesi: penginderaan jauh
		11 Pengetahuan kajian data Teknik Sipil: geologi teknik
		12 Pengetahuan kajian data primer Geohazard: gunung api, gempa bumi dan tsunami (jenis gelombang dan kegempaan), gerakan tanah
		13 Pengetahuan kajian data primer Lingkungan dan Konservasi: tata ruang, air tanah, geopark, geologi teknik
		14 Pengetahuan kajian data primer Resources: minyak dan gas bumi, mineral (logam-bukan logam dan batuan), batubara, panas bumi
		15 Pemahaman mengenai pemetaan Geohazard: gunung api, gempa bumi dan tsunami, gerakan tanah
		16 Pemahaman mengenai pemetaan Lingkungan dan Konservasi: tata ruang, , air tanah, geopark, geologi teknik
		17 Pemahaman mengenai pemetaan Resources: minyak dan gas bumi, mineral (logam-non logam), batubara, panas bumi
		18 Pemahaman mengenai pemetaan Geologi, geofisika, geokimia
		19 Pengetahuan mengenai seluruh aspek data kebumihan di dalam sistem informasi geografi yang terpadu dan terstruktur
		20 Pengetahuan mengenai aspek permodelan Geohazard: gunung api, gempa bumi dan tsunami, gerakan tanah
		21 Pengetahuan mengenai aspek permodelan Resource: minyak dan gas bumi, mineral (logam-non logam), batubara, panas bumi
		22 Pengetahuan mengenai aspek permodelan Geologi, geofisika, geokimia
353	Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Penanganan, Pengelolaan Data, dan Informasi terkait Tindak Pidana Korupsi
		2 Manajemen Dukungan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi
		3 Penyusunan Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		Kompetensi Khusus:
		1 Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi
		2 Pelaksanaan Pelacakan Aset
		3 Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
		4 Penanganan Pertama Barang Bukti Elektronik
		5 Penyusunan pendapat dan kajian hukum terkait pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK
		6 Manajemen Penanganan Perkara/Litigasi dan Non Litigasi yang terkait tugas dan kewenangan KPK
		7 Pengelolaan pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
354	Penyidik Badan Narkotika Nasional Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika
		2 Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN
		Kompetensi Khusus:
		1 Menyusun dan menyelesaikan berkas perkara
		2 Kemampuan mengumpulkan data dan informasi terkait pemetaan jaringan kejahatan terorganisir narkoba
		3 Kemampuan dalam pelaksanaan prosedur penyelidikan
		4 Kemampuan untuk merumuskan Perencanaan dan melaksanakan Penindakan Peredaran Gelap Narkoba
355	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Buddha	Kompetensi umum:
		1 Memahami regulasi tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20/2023, PP 49/2018, PP 94/2021)
		2 Mampu menerapkan tugas pokok penyuluh agama (PermenPANRB 9/2021 tentang Penyuluh Agama)
		3 Mampu menerapkan Wawasan Kebangsaan (pancasila)
		4 Menerapkan Moderasi Beragama
		5 Menerapkan Komunikasi Publik
		6 memahami penggunaan IT dalam kegiatan penyuluhan
		Kompetensi khusus:
		1 Memahami dan Meneladan Kehidupan Siddharta Gautama
		2 Menganalisis Pancasila Buddhis dan Panca Dhamma
		3 Menganalisis penerapan Sifat Luhur Buddha
		4 Menganalisis penerapan Sila/Moralitas
		5 Menganalisis Puja dan Budaya Buddhis
		6 Menganalisis Konsep Empat Kebenaran Mulia
		7 Menganalisis Hukum Karma dan Tumimbal Lahir
		8 Menganalisis Hukum Tilakkhana
		9 Memahami Hukum Pativasamuppada
		10 Memahami Misi Pembabaran Dhamma
		11 Memahami Kitab Suci Tripitaka
		12 Menganalisis Kesetaraan Gender dan HAM
		13 Memahami sejarah Perkembangan Agama Buddha
		14 Memahami persiapan bimbingan dan penyuluhan
356	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Hindu	1 Kompetensi umum:
		2 PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
		4 Memahami terkait syarat pendirian rumah ibadah
		5 memahami regulasi tentang pengelolaan dana punia
		6 Keputusan Dirjen Bimas Hindu No 85 Tahun 2023
		7 Menjelaskan dasar-dasar komunikasi efektif
		8 Deteksi dini konflik sosial
		9 Menerapkan teknologi dalam bimbingan penyuluhan
		Kompetensi khusus:
		1 Memahami kitab suci Weda
		2 Memahami Sejarah Agama Hindu
		3 Memahami Nyanyian
		4 Memahami Tri Kerangka Dasar Agama Hindu (sradha dan bhakti, susila dan acara)
		5 Konsep Tri Murti
		6 Menganalisis Karmapala
357	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Islam	7 Menganalisis pemikiran dalam Dharsana
		8 Menganalisis status Pandita dan Pinandita
		9 Menganalisis tugas dan kewajiban orang suci
		10 Menganalisis Tri Parartha
		11 Menganalisis Catur Guru
		12 Menganalisis Tri Hita Karana
		13 Menganalisis Tri Sandhya dan dinika upasana
		14 Menilai persembahyangan
		Kompetensi Umum:
		1 Teori Pembinaan dan Pemberdayaan Umat
		2 Fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat
		3 Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat
		4 Regulasi tentang penyelesaian konflik sosial dan keagamaan
		5 Penyelesaian Konflik keagamaan
358	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Katolik	6 RAN PE Nomor 7 Tahun 2021 dan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006
		7 Teknologi Informasi dan Komunikasi
		8 Analisis Data
		9 Retorika Dakwah
		10 Kelembagaan, Organisasi, Kepemimpinan, dan Hubungan Masyarakat
		11 Metodologi Bimbingan dan Penyuluhan Agama
		12 Manajemen bimbingan dan penyuluhan agama Islam
		Kompetensi Khusus:
		1 Agama dan Wabah
		2 Dakwah Digital
		3 Intoleransi Beragama
		4 Moderasi Beragama
		5 Kaidah Ushul
		6 Ijtihad
		7 Sumber Hukum Islam
		8 Sejarah Peradaban Islam Indonesia
		9 Dinasti 'Abbasiyah
		10 Dinasti Umayyiah
		11 Khulafaur Rasyidin
		12 Sirah Nabawiyah
		13 Shorof
		14 Nahwu
		15 Mu'amalah
		16 Ibadah
		17 Akhlak Tercela
		18 Akhlak Terpuji
		19 Ilmu tasawuf
		20 Ilmu Kalam
		21 Rukun Iman
		22 Mustholah Hadis
		23 Terjemahan Hadis
		24 Hafalan Hadis
		25 Ulumul Qur'an
		26 Tafsir
		27 Terjemahan Ayat
		28 Tajwid
		Kemampuan Umum:
		1 Mengidentifikasi kebijakan ASN merujuk UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
		2 Mengidentifikasi Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Guru
		3 Mengimplementasikan 4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia
		Kemampuan khusus:
		1 Memahami Kitab Suci Katolik perjanjian lama
		2 Memahami Kitab Suci Katolik perjanjian baru
		3 Mengidentifikasi kitab nabi-nabi
		4 Menganalisis teks Kitab Suci tentang Mukjizat Yesus
		5 Mengidentifikasi Surat-surat Pastoral, menginterpretasikan pesan Surat Paulus

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
359	Penyuluh Agama Ahli Pertama - Penyuluh Agama Kristen	6 Mengidentifikasi 12 Rasul Yesus, menghubungkan Cara hidup jemaat Pertama dengan konteks sekarang
		7 Memahami Magisterium Gereja Katolik (sejarah dan sifat gereja, 10 perintah allah, 5 tugas gereja, sakramen, liturgi, dokumen konsili vatikan II dan ajaran sosial gereja)
		Kompetensi khusus:
		1 UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
		2 Pancasila dalam pandangan hidup bangsa serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari
		3 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
		4 Hak dan kewajiban Penyuluh Agama Kristen dan kode etik Penyuluh Agama Kristen
		5 Sasaran pelayanan Penyuluhan dan Metode Penyuluhan
		Kompetensi umum:
		1 Arti pemeliharaan Allah
		2 Keselamatan Allah bersifat universal dan pribadi
		3 Allah membaharui kehidupan dalam Roh Kudus
		4 Allah membimbing, mendamaikan dan menopang umat-Nya dalam sehat dan sakit
		5 Menjadi Jemaat yang misioner
		6 Pelayan Yang berhati Hamba
		7 Keaslian kitab-kitab Perjanjian Lama dan baru
		8 Alkitab penuntun hidup orang beriman dan pelita dalam kegelapan
		9 Nilai Kristiani berdasarkan Galatia 5:22-23, Mazmur dan Kitab Amsal
		10 Gereja, Kemajemukan dan multikulturalisme
		11 Moderasi beragama dalam pandangan Alkitab: Hidup Rukun dan Damai
		12 ICT dan perkembangannya (evolusi dan inovasi ICT)
360	Penyuluh Bahasa	Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, mencegah dan mengantisipasi HOAX
		14 Pendidikan dalam Keluarga Kristen
		15 Peran dan Tanggung Jawab Gereja dalam Pendidikan
		16 Sikap Orang Kristen terhadap Kesenjangan dan Keadilan Gender
		17 Penyimpangan Seksual, pencegahan dan antisipasi
		18 Praktik demokrasi dalam perspektif iman Kristen
		19 Faktor penghambat damai sejahtera
		20 Krisis dalam kehidupan Lansia
		21 Ciri-ciri orang Kristen pembawa damai sejahtera
		Kemampuan Umum:
		Kebijakan kebahasaan dan Kesastraan (Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang kebahasaan, diantaranya UU Nomor 24 Tahun 2009, PP Nomor 57 Tahun 2014, dan Perpres Nomor 63 Tahun 2019)
		Kemampuan Khusus:
		1 Substansi Penyuluhan Bahasa
		a) Ejaan
		b) Bentuk dan Pilihan Kata
		c) Kalimat
		d) Paragraf dan Teks
		2 Substansi Penyuluhan Sastra
		a) Kategorisasi Sastra
		b) Apresiasi Sastra
		c) Metode Penyuluhan Sastra
		d) Sastrawan dan Karyanya
		3 Teknik dan Etika Menyuluh
361	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
		2 Pancasila
		3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
		4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
		5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		Kemampuan Khusus:
		1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
		2 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
		3 Dasar-dasar konsultasi hukum
		4 Dasar-dasar komunikasi publik
		5 Dasar-dasar komunikasi dialogis
		6 Substansi hukum
		7 Struktur hukum
		8 Budaya hukum
		9 Dasar-dasar sosiologi hukum
		10 Perkawinan
		11 Hukum Perjanjian
		12 Kewarganegaraan
		13 Metode dan pendekatan penyuluhan hukum
		14 Tugas dan fungsi Penyuluh Hukum
362	Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Wawasan umum terkait perencanaan penyuluhan kehutanan
		2 Wawasan umum terkait penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3 Wawasan umum terkait pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Wawasan umum terkait pengembangan sistem penyuluhan kehutanan
		5 Wawasan Umum terkait pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kemampuan Khusus:
		1 Teknis Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2 Teknis Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3 Teknis Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Teknis Pengembangan Sistem Penyuluhan Kehutanan
		5 Teknis Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
363	Penyuluh Kehutanan Pemula	Kemampuan Umum:
		1 Wawasan Umum Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2 Wawasan Umum Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3 Wawasan Umum Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Wawasan Umum Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan kehutanan
		Kemampuan khusus:
		1 Teknis Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2 Teknis Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3 Teknis Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Teknis Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
364	Penyuluh Kehutanan Terampil	Kemampuan umum:
		1 Wawasan Umum Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2 Wawasan Umum Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3 Wawasan Umum Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Wawasan Umum Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyuluhan kehutanan
		Kemampuan khusus:
		1 Teknis Perencanaan Penyuluhan Kehutanan
		2 Teknis Penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan
		3 Teknis Pendampingan pemberdayaan sasaran penyuluhan kehutanan
		4 Teknis Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan
365	Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengendalian Penduduk
		2 Alat dan Metode Kontrasepsi
		3 Pembangunan Keluarga
		4 Konsep Dasar Keluarga
		5 Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi, dan Komunikasi Interpersonal
		Kompetensi Khusus:
		1 Tumbuh Kembang Anak dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)
		2 Generasi Remaja dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)
		3 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)
		4 Kemandirian Ekonomi Keluarga
		5 Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
		6 Pendataan Keluarga
		7 Pencatatan dan Pelaporan Keluarga
		8 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP)
		9 Penyuluh KB
366	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama	Kemampuan umum:
		1 Peraturan-Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Sampah
		2 Peraturan-Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah
		3 Undang-undang tentang Pengelolaan Sampah
		4 Peraturan Lain tentang Pengelolaan Sampah (Permenpan/Perpres, dll)
		5 Wawasan umum dan lingkungan hidup
		Kemampuan Khusus:
		1 Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
		2 Pengelolaan Sampah, Jenis Sampah Rumah Tangga dan Bank Sampah
		3 Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3
		4 Dasar Pengetahuan Teknis Lingkungan Hidup
		5 Wawasan Teknis dan Lingkungan Hidup
367	Penyuluh Narkoba Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan dasar tentang ruang lingkup Narkotika, Psikotropika, Bahan Adiktif dan prekursor narkotika
		2 Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BNN
		Kompetensi Khusus:
		1 Menyampaikan informasi P4GN yang efektif
		2 Keterampilan dasar dalam penyuluhan narkotika
		3 Kemampuan melakukan penerapan metode, teknik dan model penyuluhan Narkotika
		4 Kemampuan untuk mengetahui gambaran umum tentang sasaran penyuluhan
		5 Kemampuan untuk membuat laporan dan mengevaluasi penyuluhan Narkotika
368	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	Kemampuan Umum
		1 Pengetahuan Umum Tentang Industri dan Kebijakan Industri
		2 Pohon Industri
		3 Klasifikasi Industri
		4 Perijinan Usaha
		5 Pengetahuan Umum Tentang ASN
		Kemampuan Khusus:
		1 Standar Industri
		2 Kewirausahaan
		3 Industri Kecil dan Menengah
		4 Manajemen Operasional (Produksi)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Manajemen Pemasaran
		6 Pengelolaan program penyuluhan usaha indag
		7 Penyusunan dan Penerapan Metoda dan Materi Penyuluhan Usaha Indag
		8 Pendampingan dan/atau konsultasi usaha indag
		9 Monitoring dan evaluasi
369	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Regulasi di bidang Penyuluhan Pertanian
		2 Ilmu-ilmu Pertanian, Metodologi Evaluasi, Budidaya Pertanian, Panen dan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran
		3 Akses Informasi dan Teknologi, Akses Kelembagaan Keuangan, Alat mesin pertanian, sarana produksi
		Kompetensi Khusus:
		1 Potensi wilayah, Penyusunan Programa, Penyusunan Rencana Kerja Penyuluh
		2 Materi, Metode, Media Penyuluhan Pertanian dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian
		3 Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani, Kelembagaan Penyuluhan
370	Penyuluh Pertanian Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Regulasi di bidang Penyuluhan Pertanian
		2 Ilmu-ilmu Pertanian, Metodologi Evaluasi, Budidaya Pertanian, Panen dan Pasca Panen, Pengolahan, Pemasaran
		3 Akses Informasi dan Teknologi, Akses Kelembagaan Keuangan, Alat mesin pertanian, sarana produksi
		Kompetensi Khusus:
		1 Potensi wilayah, Penyusunan Programa, Penyusunan Rencana Kerja Penyuluh
		2 Materi, Metode, Media Penyuluhan Pertanian dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian
		3 Kelembagaan Petani, Kelembagaan Ekonomi Petani, Kelembagaan Penyuluhan
371	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Kompetensi Umum:
		1 Pemahaman konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial
		2 Advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi
		Kompetensi Khusus:
		1 Penerapan konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam penyusunan perencanaan penyuluhan sosial
		2 Pemahaman konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam melakukan pemetaan potensi kerawanan sosial
		3 Pemahaman dan pengumpulan bahan-bahan terkait penyelenggaraan penyuluhan sosial
372	Penyusun Buku Braille dan Buku Bicara	Kompetensi Umum:
		1 Kebijakan dan penyedia layanan aksesibilitas kesejahteraan sosial
		2 Implementasi kebijakan dan penyedia layanan aksesibilitas kesejahteraan sosial
		Kompetensi Khusus:
		1 Penyusunan dan perencanaan kerja penyusunan buku braille dan buku bicara
		2 Analisis kelayakan pengembangan kebijakan dan standarisasi penyusunan buku braille dan buku bicara
		3 Penyiapan bahan dan pengolahan naskah buku braille dan buku bicara
373	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Kemampuan Umum:
		1 Pengantar Ilmu Hukum
		2 Konsensus Kebangsaan
		3 Pengantar Filsafat Hukum
		4 Teori Hukum
		Kemampuan Khusus:
		1 Peraturan Perundang-undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
374	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Pengantar Ilmu Hukum
		2 Konsensus Kebangsaan
		3 Pengantar Filsafat Hukum
		4 Teori Hukum
		Kemampuan Khusus
		1 Data dan bahan terkait Program Legislasi Nasional, di luar Program Legislasi Nasional, Program Legislasi Daerah, di luar Program Legislasi Daerah, daftar kumulatif terbuka, usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan, atau di luar usul penyusunan Peraturan Perundang-undangan
		2 Data dan bahan terkait analisis urgensi Instrumen Hukum lainnya
		3 Data dan bahan terkait proses pembentukan peraturan perundang-undangan
		4 Data dan bahas terkait proses merumuskan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural
		5 Merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri atau yang sederajat, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang materi muatannya bersifat teknis dan prosedural

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Data dan bahan terkait penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota; perjanjian internasional; persetujuan internasional; memorandum of understanding; kontrak internasional; kontrak nasional/perjanjian kerja sama; keterangan pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat, kesimpulan Presiden atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, jawaban termohon atas permohonan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung, serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara; naskah somasi; legal opinion; kajian/telaahan atas permohonan mediasi langsung 7 Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
375	Perawat Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Praktik Keperawatan Berdasarkan Etik (Standar Profesi perawat) 2 Praktik Keperawatan Berdasarkan Legal (Standar Profesi Perawat) 3 Praktik Keperawatan Berdasarkan Peka Budaya (Standar Profesi Perawat) 4 Area Praktik Keperawatan Profesional (Standar Profesi Perawat) 5 Area Kepemimpinan dan Manajemen (Standar Profesi Perawat) 6 Area Pendidikan dan Penelitian (Standar Profesi Perawat) 7 Area Pengembangan Kualitas Personal dan Profesional (Standar Profesi Perawat) Kemampuan Khusus: 1 Asuhan Keperawatan Medikal Bedah (Kamus Kompetensi) 2 Asuhan Keperawatan Maternitas (Kamus Kompetensi) 3 Asuhan Keperawatan Anak (Kamus Kompetensi) 4 Asuhan Keperawatan Jiwa (Kamus Kompetensi) 5 Asuhan Keperawatan Komunitas (Kamus Kompetensi)
376	Perawat Terampil	Kemampuan Umum: 1 Praktik keperawatan berdasarkan Etik, Legal dan Peka Budaya 2 Area Praktik Keperawatan Profesional Kemampuan Khusus: 1 Pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat 2 Asuhan keperawatan medikal bedah 3 Asuhan keperawatan maternitas 4 Asuhan Keperawatan Anak 5 Asuhan Keperawatan Jiwa 6 Asuhan Keperawatan Komunitas
377	Perekam Medis Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1 Manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan Kemampuan Khusus: 1 Pelayanan Pendaftaran Pasien 2 Pengelolaan Rekam Medis 3 Kodifikasi Klinis Sistem Pembiayaan Kesehatan 4 Statistik dan Pelaporan Data Pasien 5 Penjaminan Mutu Pelayanan Rekam Medis 6 Pelepasan Informasi Kesehatan
378	Perekam Medis Terampil	Kemampuan Umum: 1 Tenaga kesehatan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 3 Jabatan Fungsional Perekam medis 4 Dasar Hukum Kebijakan Pelayanan RME di Fasyankes 5 Klasifikasi dan perijinan rumah sakit 6 Puskesmas 7 KMK no.312 Tahun 2020, Hasil Kongres IX PORMIKI Tahun 2018 8 Aspek Hukum Rekam Medis 9 Permenkes 1171 tahun 2011 dan Permenkes 31 tahun 2019 10 Budaya kerja dan nilai-nilai anti korupsi 11 Kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain 12 Tanggap terhadap kejadian bencana Kemampuan Khusus: 1 Identifikasi data sosial pasien 2 Registrasi Pendaftaran 3 Indeks utama pasien 4 Penomoran rekam medis 5 Penyiapan rekam medis 6 Pemesanan rekam medis pasien lama 7 Pengumpulan data pelayanan pendaftaran pasien 8 Pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien 9 Penyajian data pelayanan pendaftaran pasien 10 Instrumen pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien 11 Instrumen penyajian data pelayanan pendaftaran pasien 12 Analisis hasil pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien 13 Penyajian hasil pengolahan data pelayanan pendaftaran pasien 14 Analisis data pelayanan pendaftaran pasien dan memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan terhadap pelayanan pendaftaran

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		15 Evaluasi hasil laporan analisis dan rekomendasi untuk perbaikan cara kerja pelayanan pendaftaran pasien yang lebih efektif
		16 Pedoman, standar, dan prosedur pelaksanaan pelayanan pendaftaran pasien
		17 Sosialisasi implementasi pedoman standar prosedur pelayanan pendaftaran pasien yang dilakukan perbaikan
		18 Konsep dan metode tata kelola pelayanan pendaftaran pasien
		19 Persiapan perlengkapan penyediaan rekam medis untuk berobat
		20 Bukti petunjuk keluar (outguide) sesuai dengan ketentuan
		21 Pengambilan kembali (retrieval) rekam medis
		22 Lokasi penjajaran
		23 Pengambilan rekam medis
		24 Penyisipan outguide
		25 Perapihan rekam medis
		26 Penyortiran rekam medis
		27 Analisis kegiatan pengelolaan rekam medis
		28 Penyajian kegiatan pengelolaan rekam medis
		29 Perumusan kegiatan pengelolaan rekam medis
		30 Pendistribusian rekam medis berdasarkan permintaan rekam medis
		31 Pencatatan pada buku ekspedisi
		32 Pendistribusian rekam medis sesuai permintaan
		33 Pelaksanaan bimbingan penyimpanan Rekam medis untuk berbagai kepentingan
		34 Pelestarian rekam medis di ruang penyimpanan
		35 Konsep dan metode tata kelola pengelolaan rekam medis di ruang penyimpanan
		36 Pengolahan data hasil kodifikasi klinis
		37 Audit hasil laporan kodifikasi klinis
		38 Pengolahan data hasil kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan
		39 Konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi pengolahan kodifikasi klinis sistem pembiayaan kesehatan
		40 Pengolahan data pelayanan dan program kesehatan
		41 Evaluasi data pelayanan kesehatan dan pelaporan pelayanan kesehatan
		42 Penyediaan data pelayanan dan program kesehatan untuk keperluan pihak lain
		43 Konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah pengelolaan statistik dan pelaporan data pasien
		44 Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur penjaminan mutu pelayanan rekam medis berdasarkan pedoman
		45 Penyelenggaraan penjaminan mutu pelayanan rekam medis
		46 Pelayanan peminjaman rekam medis untuk pihak internal dan eksternal
379	Perekayasa Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Pengelolaan Kerekayasaan
		2 Pendayagunaan Teknologi
		Kemampuan Khusus:
380	Perencana Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Teknis Perencanaan Pembangunan Tingkat Dasar
		Kemampuan Khusus:
		1 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tingkat Dasar
381	Perevitalisasi Bahasa dan Sastra	2 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Tingkat Dasar
		3 Perencanaan Pembangunan Bidang Spasial Tingkat Dasar
		Kemampuan Umum:
		1 Pemahaman terhadap perlindungan bahasa dan sastra sesuai dengan PP Nomor 57 Tahun 2014
382	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Kemampuan Khusus:
		1 Pemahaman tentang pemetaan bahasa
		2 Pemahaman tentang pemetaan sastra (lisan, tulis tangan, dan cetak)
		3 Pemahaman tentang kajian vitalitas bahasa
383	Petugas Barang Bukti	4 Pemahaman tentang kajian vitalitas sastra
		5 Pemahaman tentang Revitalisasi Bahasa Daerah
		6 Pemahaman tentang Revitalisasi Sastra Lisan
		7 Pemahaman tentang Konservasi Bahasa Daerah
382	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	8 Pemahaman tentang Konservasi Sastra Lisan
		9 Pemahaman tentang Konservasi Manuskrip
		Kompetensi Umum:
		1 Kelembagaan Negara dan Sejarah Indonesia
383	Petugas Barang Bukti	2 Manajemen ASN dan Pembentukan Perundang-Undangan
		Kompetensi Khusus:
		1 Kelembagaan DPR
		2 Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan penulisan sesuai PUEBI
383	Petugas Barang Bukti	3 Instansi Pembina dan Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
		Kemampuan Umum:
		1 Peraturan Perundang-Undangan Nasional
		2 Fungsi Pengelolaan Barang Bukti
383	Petugas Barang Bukti	3 Uraian Tugas
		4 Sistem Informasi
		5 Manajemen
		6 Administrasi Data
383	Petugas Barang Bukti	7 Operasi Perangkat Lunak dan Pengolahan Data

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kompetensi Khusus:
		1 Aturan Penggunaan
		2 Aturan Pengelolaan
		3 Identifikasi Data
		4 Integrasi Data
		5 Analisa Data
		6 Hukum Acara Pidana
		7 Hukum Acara Perdata
		8 Hukum, Pendidikan dan Kewarganegaraan
		9 Penyusunan Laporan dan Layanan
384	Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional
		5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang
		6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar-dasar pengaturan lalu lintas
		2 Prinsip dasar keselamatan angkutan jalan
		3 Operasional terminal angkutan jalan
		4 Operasional angkutan jalan
		5 Perencanaan dan organisasi kegiatan operasional transportasi
		6 Mitigasi permasalahan yang muncul dalam operasional Transportasi
		7 Prinsip-prinsip dasar Transportasi Darat
		8 Transportasi darat ramah lingkungan
		9 Infrastruktur transportasi darat
		10 Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana transportasi darat
		11 Teknologi manajemen sarana dan prasarana transportasi darat
		12 Potensi risiko dalam operasional sarana dan prasarana transportasi darat
385	Petugas Lapangan Keluarga Berencana Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Pengendalian Penduduk
		2 Alat dan Metode Kontrasepsi
		3 Pembangunan Keluarga
		4 Konsep Dasar Keluarga
		5 Advokasi dan Komunikasi Interpersonal
		Kompetensi Khusus:
		1 Tumbuh Kembang Anak
		2 Pendampingan Masa Perkembangan Remaja dan Penguatan Karakter
		3 Lansia, Keluarga yang Memiliki Lansia dan Keluarga Rentan
		4 Kemandirian Ekonomi Keluarga
		5 Pusat Informasi dan Konseling Remaja
		6 Pendataan Keluarga
		7 Pencatatan dan Pelaporan Keluarga
		8 Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP)
		9 Tugas fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana
		10 Percepatan Penurunan Stunting
386	Petugas Operasi dan Pemeliharaan	Kompetensi Umum:
		1 Pengetahuan Umum
		Kompetensi Khusus:
		1 Tata cara operasi
		2 Tata cara pemeliharaan
		3 Alat ukur dan instrumentasi
387	Petugas Pengaman Hutan dan Hasil Hutan	Kemampuan Umum:
		1 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
		2 UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan
		3 UU No 18 tahun 2013 Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan
		4 PP No 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa
		5 PP No 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar
		6 PP No.45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
		7 PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
		8 PP No.28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA
		Kemampuan Khusus:
		1 Penjagaan
		2 Patroli
		3 Pengawasan
		4 Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara
		5 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran hutan
		6 Kesamaptaaan
		7 Materi Keterampilan Teknis

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
388	Petugas Sarana dan Prasarana Transportasi	8 Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Tenaga Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan (TP3H)
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional
		5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang
		6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar-dasar pengaturan lalu lintas
		2 Prinsip dasar keselamatan angkutan jalan
		3 Operasional terminal angkutan jalan
		4 Operasional angkutan jalan
		5 Perencanaan dan organisasi kegiatan operasional transportasi
		6 Mitigasi permasalahan yang muncul dalam operasional Transportasi
		7 Prinsip-prinsip dasar Transportasi Darat
		8 Transportasi darat ramah lingkungan
		9 Infrastruktur transportasi darat
		10 Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana transportasi darat
		11 Teknologi manajemen sarana dan prasarana transportasi darat
		12 Potensi risiko dalam operasional sarana dan prasarana transportasi darat
389	Petugas Survei Geologi	Kompetensi Umum:
		1 Geologi Dasar
		2 Alat dan teknik survei lapangan
		Kompetensi Khusus:
		1 Pemetaan geologi
		2 Batuan dan mineral
		3 Geologi struktur
		4 Potensi sumberdaya alam
		5 Pengelolaan data geologi
		6 Teori dasar geofisika dan geokimia
		7 Pengoperasian peralatan geofisika
		8 Manajemen proyek
		9 UU No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja; Keselamatan dan kesehatan kerja
		10 Interpretasi dan quality control data geofisika
		11 Pembuatan peta geologi berbasis SIG
390	Petugas Transportasi Darat	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
		4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Pada Kawasan Strategis Nasional
		5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Barang
		6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar-dasar pengaturan lalu lintas
		2 Prinsip dasar keselamatan angkutan jalan
		3 Operasional terminal angkutan jalan
		4 Operasional angkutan jalan
		5 Perencanaan dan organisasi kegiatan operasional transportasi
		6 Mitigasi permasalahan yang muncul dalam operasional Transportasi
		7 Prinsip-prinsip dasar Transportasi Darat
		8 Transportasi darat ramah lingkungan
		9 Infrastruktur transportasi darat
		10 Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana transportasi darat
		11 Teknologi manajemen sarana dan prasarana transportasi darat
		12 Potensi risiko dalam operasional sarana dan prasarana transportasi darat
391	Petugas Transportasi Perkeretaapian	Kemampuan Umum
		1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
		2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api
		6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
		Kemampuan Khusus
		1 Operasional sarana dan prasarana Transportasi Perkeretaapian
		2 Pengawasan penyelenggaraan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		3 Pengaturan perjalanan kereta api
		4 Awak sarana perkeretaapian
		5 Perawatan, pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		6 Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
392	Petugas Ukur Kawasan Hutan	7 Pemeriksaan kecelakaan perkeretaapian
		Kemampuan Umum:
		1 Pemahaman tentang kawasan hutan
		2 Regulasi tentang pengukuran
		3 Teknologi Informasi
		4 Pemahaman tentang SIG
		Kemampuan Khusus:
		1 Matematika Dasar dan Trigonometri
		2 Pengertian Ilmu ukur tanah
		3 Pemahaman tentang kawasan hutan
		4 Pengenalan alat ukur secara umum
		5 Alat ukur untuk kawasan hutan secara spesifik
		6 Cara kerja alat ukur
		7 Proses pengukuran kawasan hutan
		8 Proses pengolahan data hasil lapangan
		9 Pengenalan kompetensi umum surveyor
393	Polisi Kehutanan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Pengendalian Kebakaran Hutan
		2 Metode Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan
		3 Tindak Pidana Kehutanan
		4 Wawasan Tentang Peraturan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
		5 Pelaksanaan Kegiatan Yustisi Tindak Pidana Kehutanan
		6 Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
		Kemampuan Khusus:
		1 Pelaksanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
		2 Perencanaan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan
		3 Wawasan Umum Perlindungan dan Pengamanan Hutan
394	Polisi Kehutanan Pemula	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
		2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
		3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
		4 Pengetahuan Umum dan Teknis
		Kemampuan Khusus:
		1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
		2 Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
		4 Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
395	Polisi Kehutanan Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN
		2 Wawasan Kehutanan
		3 Pengetahuan Umum
		4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
		5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
		6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
		Kemampuan Khusus:
		1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
		2 Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan
		3 Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Kepolisian Khusus
		4 Tugas Pokok, Fungsi dan peran Polisi Kehutanan
		5 Pelaksanaan Operasi Fungsional Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan
		6 Kesamaptaan
		7 Pelaksanaan Penanganan Kebakaran Hutan
		8 Pelaksanaan Penjagaan
		9 Pelaksanaan Patroli
		10 Materi Keterampilan Teknis
396	Polisi Khusus Cagar Budaya	1 Prosedur pengamanan
		2 Pelaporan tugas
		3 Identifikasi potensi pengamanan cagar budaya
		4 Penanganan pengamanan
		5 Pemahaman dasar hukum

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		6 Pemahaman dasar hukum pelanggaran cagar budaya
		7 Pengadaan peralatan
		8 Penegakan peraturan atau larangan yang berlaku pada CB
		9 Pengamanan darurat
		10 Laporan pelanggaran cagar budaya
397	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Kemampuan Umum
		1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
		Kemampuan Khusus
		1 Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
		2 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
		3 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
		4 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
		5 Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
398	Polisi Pamong Praja Pemula	Kemampuan Umum
		1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
		Kemampuan Khusus
		1 Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
		2 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
		3 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
		4 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
		5 Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
399	Polisi Pamong Praja Terampil	Kemampuan Umum
		1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Penerapan Minimal
		Kemampuan Khusus
		1 Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
		2 Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP
		3 Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
		4 Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
		5 Permendagri Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
400	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Ruang lingkup humas
		2 Etika kehumasan
		Kemampuan Khusus:
		1 Manajemen isu
		2 Manajemen komunikasi
		3 Karakteristik media
		4 Media baru
		5 Komunikasi massa
		6 Publisitas
		7 Penulisan kehumasan
		8 Kegiatan-kegiatan humas
		9 Komunikasi organisasi
		10 Komunikasi interpersonal
		11 Teori komunikasi
		12 Model komunikasi
		13 Metode penelitian komunikasi
		14 Audit komunikasi
401	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Ruang lingkup humas
		2 Etika kehumasan
		Kemampuan Khusus:
		1 Manajemen isu
		2 Manajemen komunikasi
		3 Karakteristik media

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Media baru
		5 Komunikasi massa
		6 Publisitas
		7 Penulisan kehumasan
		8 Kegiatan-kegiatan humas
		9 Komunikasi organisasi
		10 Komunikasi interpersonal
		11 Teori komunikasi
		12 Model komunikasi
		13 Metode penelitian komunikasi
		14 Fotografi
		15 Komunikasi visual
402	Pranata Keuangan APBN Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Keuangan Negara
		2 Perbendaharaan Negara
		3 Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
		Kemampuan Khusus:
		1 Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN
		2 Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran
		3 Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
		4 Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara
		5 Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga
		6 Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
403	Pranata Kewilayahan	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat
		3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
		4 Pancasila
		5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Teori Pemerintahan
		6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
		7 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
		8 Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah
		9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
		10 PP No. 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
		Kompetensi Khusus:
		1 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan RPJPN 2025-2045
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang DKTP
		3 Konsep, Metodologi dan Survei Pemetaan
		4 Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
		5 Dasar Pemetaan
		6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
		7 PP No. 28 Tahun 20018 Tentang Kerja Sama Daerah
		8 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau
404	Pranata Komputer Ahli Pertama	1 IT Enterprise
		2 Manajemen Layanan TI
		3 Pengelolaan Data
		4 Manajemen Risiko TI
		5 Infrastruktur TI
		6 Sistem Informasi dan Multimedia
405	Pranata Komputer Terampil	1 Manajemen Layanan TI
		2 Pengelolaan Data
		3 Infrastruktur TI
		4 Sistem Informasi dan Multimedia
406	Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Pertama	1 Verifikasi Standar Ukuran Metrologi Legal
		2 Penanganan dan pengelolaan laboratorium metrologi legal
407	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	Kompetensi Generik:
		1 Pengambilan, penanganan, pengiriman, dan penyimpanan spesimen laboratorium kesehatan
		2 Audit mutu internal (IQC) dan verifikasi pengendalian mutu internal laboratorium
		3 Quality management laboratorium
		4 Sistem pekayaan laboratorium
		Kompetensi Spesifik:
		1 Pemeriksanaan darah lengkap dan hemostasis
		2 Urinalisis, pemeriksaan feses lengkap, pemeriksaan kimia darah, dan cairan tubuh
		3 Pemeriksaan imunologi dasar
		4 Pemeriksaan mikroskopik preparat, BTA, malaria, protozoa, helmintologi, dan mikologi
		5 Pemeriksaan Sito-Histoteknologi (prosesing jaringan, sitopatologi, mikrotom, potong beko jaringan)
		6 Diagnostik molekuler (isolasi, amplifikasi, dan identifikasi asam nukleat)
408	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	Kemampuan Umum:
		Kamus Kompetensi General / 1
		Kemampuan Khusus:
		Kamus Kompetensi / 6

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
409	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	1 Perencanaan kegiatan laboratorium
		2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan
		3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan
		4 Pengevaluasian sistem kerja laboratorium
		5 Pengembangan kegiatan laboratorium
410	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil	1 Perencanaan kegiatan laboratorium
		2 Pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan
		3 Pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan
		4 Pengevaluasian sistem kerja laboratorium
411	Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terampil	Kemampuan Khusus:
		1 Pengelolaan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		2 Pengelolaan Dukungan Kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
		3 Pengamanan Data dan Informasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
412	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
		2 Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
		5 Permenpan No. 33 Tahun 2021
		6 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Sarana Penyelenggaraan Pencarian Pertolongan Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan
		9 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia
		10 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		11 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Latihan Pencarian dan Pertolongan
		12 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		13 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
		14 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengakreditasi Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan dan Bangunan
		Kompetensi Khusus
		1 Teknik operasi SAR di gunung dan hutan
		2 Teknik operasi SAR di ketinggian
		3 Teknik operasi SAR di perairan
		4 Teknik pertolongan pertama
413	Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan
		2 Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan
		5 Permenpan No. 33 Tahun 2021
		6 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Kerja Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		7 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Sarana Penyelenggaraan Pencarian Pertolongan Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		8 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Siaga Pencarian dan Pertolongan
		9 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Wilayah Pencarian dan Pertolongan Indonesia
		10 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		11 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Latihan Pencarian dan Pertolongan
		12 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Standar Kebutuhan Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		13 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Waktu Respons dan Waktu Tempuh Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
		14 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara
		15 Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Pengakreditasi Nasional Tim Pencarian dan Pertolongan Reruntuhan dan Bangunan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		Kompetensi Khusus:
		1 Teknik operasi SAR di gunung dan hutan
		2 Teknik operasi SAR di ketinggian
		3 Teknik operasi SAR di perairan
414	Pranata Siaran Ahli Pertama	4 Teknik pertolongan pertama
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Penyiaran
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
		3 P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran)
		4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
		5 Kode Etik Jurnalistik Nomor 6 Tahun 2008
		6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar-dasar Komunikasi
		2 Penulisan sesuai kaidah bahasa Indonesia
		3 Agenda Setting Produksi dan Penyiaran
		4 Kelayakan materi produksi
		5 Penulisan naskah
		6 Tim Produksi
		7 Dasar Jurnalistik
		8 Proses produksi
		9 Media Online
		10 Media Sosial
		11 Tugas-tugas profesi
		12 Membaca Naskah
		13 Membuat program siaran
		14 Mengevaluasi siaran
		15 Format program
		16 Animasi
		17 Tata Artistik
		18 Berita
		19 Desain Grafis
		20 Komunikasi Massa
		21 Konsep Dasar Multimedia
		22 Konsep Media Sosial
		23 Teori Dasar Penyiaran
		24 Produksi Siaran
		25 Profesi Siaran
		26 Program Siaran
		27 Proses Produksi Siaran
		28 Videografi
415	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Kemampuan Umum:
		1 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		2 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3 PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017
		4 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
		5 Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
		Kemampuan Khusus:
		1 Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur
		2 Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN
		3 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN
		4 Pengadaan ASN
		5 Pangkat dan Jabatan ASN
		6 Pengembangan Karier ASN
		7 Pola Karier ASN
		8 Promosi ASN
		9 Mutasi ASN
		10 Penugasan ASN
		11 Pengembangan Kompetensi ASN
		12 Penilaian Kinerja ASN
		13 Disiplin ASN
		14 Penghargaan ASN
		15 Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN
		16 Pemberhentian ASN
		17 Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN
		18 Perlindungan ASN
		19 Cuti ASN
		20 Sistem Informasi ASN
416	Protokol Kenegaraan	Kemampuan Umum
		1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
		3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
		4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
		6 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan
		7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
		9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
		Kemampuan Khusus
		1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan
		4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
		5 Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri
		6 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia
		7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
		8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
		9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan tata Tempat, Tata Upacara dan tata Penghormatan
		10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
		11 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara Kepala Pemerintahan
		12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
417	Psikolog Klinis Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Kebijakan Transformasi Kesehatan Kementerian Kesehatan
		2 Kebijakan Terkait Jabatan Fungsional Psikolog Klinis
		3 Ketentuan Umum Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis
		4 Prinsip Kode Etik Psikologi Klinis
		5 Dewan Kehormatan
		6 Pengaduan Masalah Etik
		7 Sanksi
		8 Prinsip Kode Etik Tenaga Psikologi Klinis
		9 Konsep Umum Keselamatan Pasien
		10 Aspek Keselamatan Pasien
		11 Aspek Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Psikologi Klinis
		Kemampuan Khusus
		1 Observasi pada Asesmen Psikologi
		2 Wawancara Klinis pada Asesmen Psikologi
		3 Alat Tes Psikologi Terstandar pada Asesmen Psikologi
		4 Observasi dengan Pedoman Kerja atau Petunjuk Teknis
		5 Wawancara Klinis dengan Pedoman Kerja atau Petunjuk Teknis
		6 Alat Tes Psikologi Terstandar dengan Pedoman Kerja atau Petunjuk Teknis
		7 Pelaksanaan Asesmen pada Pasien Normal
		8 Pelaksanaan Asesmen pada Pasien Normal Bermasalah
		9 Pelaksanaan Asesmen pada Pasien Gangguan Perkembangan
		10 Pelaksanaan Asesmen pada Pasien Gangguan Penyesuaian Diri
		11 Pelaksanaan Asesmen pada Pasien Gangguan Kecemasan
		12 Interpretasi Tes Kognitif, Non-Kognitif, Interview dan Observasi
		13 Interpretasi Asesmen Psikologi Klinis Sesuai dengan Pedoman
		14 Membimbing Pelaksanaan Interpretasi Asesmen Psikologi
		15 Penegakan Diagnosis Psikologis Sesuai dengan Pedoman Diagnostik yang berlaku
		16 Penegakan Diagnosis Psikologis Sebagai Dasar untuk Penentuan Prognosis dan Intervensi
		17 Rekomendasi Hasil Penegakan Diagnosis
		18 Psikoedukasi
		19 Psikoedukasi Terhadap Komunitas
		20 Konseling dalam Intervensi Psikologi Klinis
		21 Psikoterapi
		22 Rujukan
		23 Rehabilitasi Intervensi Psikologi Klinis
		24 Psikoedukasi pada Pasien Normal Bermasalah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		25 Psikoedukasi pada Pasien Gangguan Penyesuaian dalam intervensi psikologi
		26 Konseling
		27 Psikoterapi Pasien Normal Bermasalah
		28 Rujukan pada Anak dengan Penyakit Kronis
		29 Rujukan pada Pasien Normal Bermasalah
		30 Rehabilitasi Psikologi Klinis
		31 Psikoedukasi pada Pasien Gangguan Penyesuaian dalam intervensi psikologi klinis
		32 Konseling pada Pasien Normal dan Pasien Normal Bermasalah
		33 Psikoterapi Pasien Gangguan Kecemasan
		34 Rujukan Pasien Gangguan Kecemasan
		Kompetensi Umum:
		1 Pembudayaan Kegemaran Membaca
		2 Sejarah Dunia Pustakawan
418	Pustakawan Ahli Pertama	Kemampuan Khusus:
		1 Pengembangan Koleksi Perpustakaan
		2 Pengorganisasian Bahan Perpustakaan dan Pengetahuan
		3 Pengembangan Sistem Kepustakawanan
		4 Pelayanan Informasi dan Referensi
		5 Promosi Perpustakaan
		6 Pengembangan Literasi Informasi
419	Radiografer Ahli Pertama	SKKNI, Standar Profesi Radiografer dan Text book
420	Radiografer Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Standar Kompetensi dan Kode Etik Radiografer
		2 SKKNI/Kepmenaker 237/2020
		3 Vinnita Meril, Bontrager
		4 Buku teks Komunikasi Efektif dan Efisien
		5 Buku Teks Manajemen Logistik
		6 Buku Manajemen Radiologi
		7 Buku Teks K3 Radiologi
		8 Buku Teks Proteksi Radiasi
		9 Buku Teks Manajemen Mutu Radiologi
		10 Buku Teks QA dan QC Radiologi
		Kemampuan Khusus:
		1 Standar Kompetensi dan Kode Etik Radiografer
		2 SKKNI/Kepmenaker 237/2020
		3 Vinnita Meril, Bontrager
		4 Buku Teks Pemeriksaan Radiografi
		5 Buku Teks Pemeriksaan CT Scan
		6 Snopeck, CT Scan
		7 Buku Teks K3 Radiologi
		8 Buku Teks Proteksi Radiasi
421	Refraksionis Optisien Terampil	Kompetensi Umum:
		1 Standar Profesi Refraksionis Optisien,
		2 Standar Pelayanan Refraksionis Optisien
		3 Regulasi dan perundang-undangan, Kode Etik Profesi.
		Kompetensi Khusus:
		1 Pelayanan Fungsi Penglihatan
		2 Pelayanan Teknologi Optik
		3 Pelayanan Diagnostik
		4 Pelayanan Terapeutik
422	Registrar	1 Implementasi rancangan tata pameran
		2 Prosedur pameran
		3 Antisipasi keamanan dan pengamanan
		4 Penjelasan penyajian koleksi
		5 Perkiraan kebutuhan bahan dan meteri pameran
		6 Perkiraan kebutuhan peralatan
		7 Perkiraan kebutuhan media komunikasi pameran
		8 Perkiraan kebutuhan benda koleksi
		9 Perkiraan benda koleksi
		10 Perkiraan sarana dan prasarana pameran
		11 Design penyajian koleksi
		12 Penataan koleksi di ruang tata pameran
		13 Standar penyajian rancangan benda koleksi
		14 Sistem pencatatan
		15 Tampilan pencahayaan dalam tata pameran
		16 Tampilan tata warna
		17 Pembongkaran pameran
		18 Evaluasi kegiatan pameran
		19 Perawatan benda koleksi pasca pameran
		20 Promosi pameran
		21 Laporan pertanggungjawaban kegiatan
		22 Prosedur penerimaan
		23 Sistem penomoran koleksi
		24 Sistem pencatatan ke dalam buku induk registrasi
		25 Standar pembuatan label koleksi hasil registrasi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		26 Standar pembuatan kartu registrasi koleksi hasil registrasi
		27 Standar pembuatan informasi identitas koleksi
		28 Prosedur administrasi pemindahan koleksi
		29 Standar penataan koleksi di ruang storage
423	Sandiman Ahli Pertama	Kemampuan umum:
		1 Konsep dasar TIK
		2 Sistem komputer
		3 Jaringan komputer
		4 Sistem informasi
		5 Kriptografi
		Kemampuan khusus:
		1 Budaya Kaminfo
		2 Penanggulangan dan pemulihan insiden
		3 Penerapan Kaminfo
424	Sandiman Terampil	Standar dan regulasi Kaminfo
		Kemampuan umum:
		1 Konsep dasar TIK
		2 Sistem komputer
		3 Jaringan komputer
		4 Sistem informasi
		5 Kriptografi
		Kemampuan khusus
		1 Budaya Kaminfo
		2 Penerapan Kaminfo
425	Serang Kapal Kelas I	Standar dan regulasi Kaminfo
		Kemampuan Umum
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
		Kemampuan Khusus
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
426	Serang Kapal Kelas II	6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
		7 Kecakapan Bahari.
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
		13 Dasar-dasar Akuntansi.
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut.
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
427	Serang Kapal Kelas III	16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
		Kemampuan Umum
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
		Kemampuan Khusus
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
		7 Kecakapan Bahari.
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
		13 Dasar-dasar Akuntansi.
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut.
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
		Kemampuan Umum
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim.
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika.
		Kemampuan Khusus
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar.
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR.
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal.
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan.
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya.
		7 Kecakapan Bahari.
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja.
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan.
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan.
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika.
		13 Dasar-dasar Akuntansi.
		14 Dasar Dasar Managemen Angkutan Laut.
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait.
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal.
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal.
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut.
428	Statistisi Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		Statistik Dasar
		Kemampuan Khusus:
		1 Persiapan kegiatan statistik
		2 Pengumpulan Data
		3 Pengolahan Data
		4 Analisis Data Statistik
		5 Diseminasi Hasil Kegiatan Statistik
429	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama	Kemampuan umum:
		Pemahaman dasar informasi geospasial
		Kemampuan khusus:
		1 Pengukuran/pengumpulan dan pengolahan data hasil survei terestris dan survei hidrografi
		2 Pengumpulan dan pengolahan data fotogrametri/foto udara
		3 Penyajian data hasil survei
		4 Pengolahan data penginderaan jauh
		5 Pemanfaatan data dan informasi geospasial
430	Surveyor Pemetaan Terampil	Kemampuan umum:
		Pemahaman dasar informasi geospasial
		Kemampuan khusus:
		1 Pengukuran/pengumpulan dan pengolahan data hasil survei terestris dan survei hidrografi
		2 Pengumpulan dan pengolahan data fotogrametri/foto udara
		3 Penyajian data hasil survei
		4 Pengolahan data penginderaan jauh
		5 Pemanfaatan data dan informasi geospasial
431	Surveyor Pengangkutan Barang Berbahaya	Kemampuan Umum
		1 Bahasa Inggris Maritim.
		2 Teknologi informatika.
		3 Ilmu Ekonomi
		Kemampuan Khusus
		1 Dasar-dasar Kepelabuhanan.
		2 Dokumen Kepelabuhanan dan Dokumen Pengangkutan.
		3 Peraturan nasional dan konvensi internasional.
		4 Kepedulian Lingkungan.
		5 K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).
		6 Sistem Manajemen Keselamatan Kapal.
		7 Jasa dan Fasilitas Pelabuhan.
		8 IMDG Code.
		9 ISPS Code.
		10 Manajemen Angkutan Laut.
		11 Keagenan.
		12 Logistik dan Supply Chain Management.
		13 Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kapal.
		14 Manajemen Mutu.
		15 Manajemen Perusahaan Pelayaran
432	Teknisi Akuakultur Pemula	Kemampuan Umum
		1 Pedoman tentang pembudidayaan ikan
		Kemampuan Khusus
		1 Pengelolaan sarana, prasarana, dan kawasan perikanan budidaya
		2 Pengelolaan perbenihan ikan
		3 Pembinaan unit pembenihan ikan
		4 Pengelolaan sertifikasi bidang perikanan budidaya
433	Teknisi Akuakultur Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Pedoman tentang pembudidayaan ikan
		Kemampuan Khusus
		1 Pengelolaan sarana, prasarana, dan kawasan budidaya perikanan
		2 Pengelolaan perbenihan ikan
		3 Pembinaan unit pembenihan ikan
		4 Pengelolaan bahan baku pakan ikan dan pakan ikan
		5 Pengelolaan sertifikasi bidang perikanan budidaya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
434	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama	6 Pengelolaan dan rehabilitasi lingkungan budidaya
		Kemampuan Umum
		1 Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik
		2 Identifikasi pengembangan karir elektromedis
		3 Identifikasi jabatan fungsional elektromedis
		4 Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik
		5 Identifikasi tata cara menjadi pejabat fungsional elektromedis
		6 Identifikasi pelayanan kegiatan kalibrasi alat kesehatan
		7 Identifikasi dasar alur dan proses pelayanan elektromedis
		8 Identifikasi dasar area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-5
		9 Identifikasi pelayanan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan
		Kemampuan Khusus
		1 Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar
		2 Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar
		3 Pengujian/kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar
		4 Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar
		5 Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar
435	Teknisi Elektromedis Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Identifikasi regulasi pengelolaan alat elektromedik
		2 Identifikasi pengembangan karir elektromedis
		3 Identifikasi jabatan fungsional elektromedis
		4 Identifikasi kebijakan pelayanan elektromedik
		5 Identifikasi pelayanan kalibrasi alat kesehatan
		6 Identifikasi alur dan proses pelayanan elektromedis
		7 Identifikasi area kompetensi dan kode etik elektromedis nomor 1-4
		8 Identifikasi pelayanan pemeliharaan alat kesehatan
		9 Identifikasi unit kompetensi bidang elektromedis
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengkajian teknis alat elektromedik dan alat ukur standar
		2 Instalasi alat elektromedik dan alat ukur standar
		3 Pemeliharaan alat elektromedik dan alat ukur standar
		4 Pengujian/Kalibrasi alat elektromedik dan alat ukur standar
		5 Perbaikan alat elektromedik dan alat ukur standar
436	Teknisi Gigi Terampil	Kemampuan Umum:
		1 KepmenakerNo.115 Tahun 2019 Tentang SKKNI
		2 Permenkes No.460 Tahun 2020 tentang standar profesi
		3 Permenkes 54 tahun 2012 ttg penyelenggaraan pekerjaan
		Kemampuan Khusus:
		1 Analisis Rekomendasi Instruksi Kerja Disertai Persiapan Alat, Bahan, dan Model Kerja untuk Pelayanan Laboratorium Teknik Gigi
		2 Pelayanan Laboratorium Gigi Tiruan
		3 Pelayanan Laboratorium Alat Orthodonti
		4 Pelayanan Laboratorium Protese Maxillo Facial
437	Teknisi Kesehatan Ikan Pemula	Kompetensi Umum:
		Kebijakan bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya
		Kompetensi Khusus:
		1 Jenis-jenis penyakit ikan
		2 Monitoring dan/atau surveilan penyakit ikan
		3 Penanganan penyakit
		4 Metode pengujian laboratorium
		5 Jenis-jenis obat ikan
438	Teknisi Kesehatan Ikan Terampil	Kompetensi Umum:
		Kebijakan bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya
		Kompetensi Khusus:
		1 Jenis-jenis penyakit ikan
		2 Monitoring dan/atau surveilan penyakit ikan
		3 Biosecurity
		4 Penanganan penyakit
		5 Metode pengujian laboratorium
439	Teknisi Listrik Kapal Kelas I	Substansi Uji Residu
		7 Monitoring lingkungan
		Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
		Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
440	Teknisi Listrik Kapal Kelas II	5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
		Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
441	Teknisi Menara Suar	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut
442	Teknisi Mesin Alat Berat	Kompetensi Umum:
		1 Prinsip-prinsip Dasar Hidrolik
		2 Pengukuran
		3 Keamanan Pengoperasian Alat Berat
		4 Penggunaan Peralatan Perawatan Alat Berat
		Kompetensi Khusus:
		1 Komponen Alat Berat
		2 Sistem dan Konstruksi Alat Berat
		3 Sistem Kelistrikan pada Alat Berat
		4 Pelepasan dan Pemasangan Komponen Alat berat
443	Teknisi Penelitian dan Perekayasa Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Penyusunan daftar kebutuhan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi
		2 Penyiapan kebutuhan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan teknologi
		Kemampuan Khusus:
		1 Pelaksanaan Penelitian
		2 Pelaksanaan Pengembangan
		3 Pelaksanaan Pengkajian
		4 Pasca Pelaksanaan Penjaminan Mutu Layanan IPTEK
444	Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		2 Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan - mampu menyebutkan dan menjelaskan tugas dan fungsi karantina
		3 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi SDI
		4 Permen PAN RB nomor 47 tahun 2022
		5 Permen KP nomor 17 tahun 2021 tentang PIK
		6 Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi,dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
		Kemampuan Khusus:
		1 Undang-undang 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan
		2 Organisasi kesehatan hewan aquatik dunia (World Organisation for Animal Health, WOA)
		3 Permen KP nomor 11 tahun 2019 tentang Pemasukan media pembawa
		4 Permen KP nomor 38 tahun 2019 tentang pengeluaran media pembawa
		5 Permen KP nomor 19 tahun 2020 tentang larangan pemasukan pembudidayaan peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang berbahaya
		6 Permen KP nomor 9 tahun 2019 tentang Instalasi karantina Ikan
		7 Permen KP nomor 8 tahun 2022 tentang jenis komoditas wajib periksa katrantina ikan mutu dan keamanan hasil perikanan
		8 Kepmen KP nomor 1 tahun 2021 tentang Jenis ikan yang dilindungi,dan aturan KKP lain yang berkaitan dengan jenis ikan dilindungi/dibatasi
445	Teknisi Perkebunrayaan Pemula	9 Kepmen KP nomor 55 tahun 2022 tentang pemasukan dan pengeluaran media jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia
		10 Kepmen 17 tahun 2021 tentang penetapan jenis Penyakit Ikan Karantina organisme penyebab golongan dan media pembawa
		11 Pedoman Pemantauan Penyakit Ikan karantina
		12 Pedoman pemetaan sebaran jenis ikan bersifat invasif
		13 Pengelolaan laboratorium
		14 Teknik pengambilan sampel
		1 Bank biji
		2 Identifikasi tumbuhan
		3 Registrasi
		4 Kebun raya
		5 Herbarium
		6 Konservasi umum
		7 Pembibitan
		8 Pemeliharaan koleksi
446	Teknisi Perkebunrayaan Terampil	1 Bank biji
		2 Identifikasi tumbuhan
		3 Registrasi
		4 Kebun raya
		5 Herbarium
		6 Konservasi umum
		7 Pembibitan
		8 Pemeliharaan koleksi
447	Teknisi Perkeretaapian	Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
		2 Peraturan Pemerintah 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
		4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
		5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 tahun 2012 Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api
		6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
		7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian
		Kemampuan Khusus:
		1 Operasional sarana dan prasarana Transportasi Perkeretaapian
		2 Pengawasan penyelenggaraan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		3 Pengaturan perjalanan kereta api
		4 Awak sarana perkeretaapian
		5 Perawatan, pemasangan, perbaikan, dan pengecekan serta pemeliharaan sarana, prasarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian
		6 Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
		7 Pemeriksaan kecelakaan perkeretaapian
448	Teknisi Sarana dan Prasarana	Kompetensi Umum
		Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
		Kompetensi Khusus
		1 Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung
449	Teknisi Siaran Ahli Pertama	2 Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
		2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang LPP
		3 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2017

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
		4 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 51 Tahun 2009 tentang Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran
		Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Induk dan Ketentuan Teknis
		5 Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Keperluan Jasa Penyiaran Radio melalui Media Terestrial
		6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE
		Kemampuan Khusus:
		1 Peralatan-peralatan Penyiaran
		2 Peralatan Pemancar
		3 Jenis Antenna
		4 Teknik Pengukuran RF
		5 Fungsi Aplikasi Penyiaran
		6 Fungsi Peralatan Distribusi Audio
		7 Jaringan Internet
		8 Perangkat Server
		9 Peralatan Teknik Produksi
		10 Dasar Aplikasi Berbasis Web
		11 Perangkat Pendukung Media Baru
		12 Sistem 3 Phase
		13 Sistem 1 Phase
		14 Audio-Video
		15 Teknik Tata Cahaya
		16 Teknik Kamera-Video
		17 Sistem Komputer
		18 Teknik Komputer
		19 Multimedia
		20 Elektronika
450	Teknisi Transfusi Darah Terampil	21 Listrik
		22 Multiplexing
		23 Dasar Penyiaran
		24 Server
		25 Frekuensi
		Kemampuan Umum:
		1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
		2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan
		3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
		4 PP No. 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah
		5 Permenkes NO. 83 tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
		6 Permenkes No. 91 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Darah
		7 Permenkes No. 92 Tahun 2015 Tentang Kerjasama antara puskesmas, UTD dan Rumah Sakit dalam Pelayanan Darah untuk menurunkan angka kematian Ibu
		8 Perka BPOM No. 10 Tahun 2017
		9 Etika Profesi TPD
		10 Kode Etik Profesi TPD
		11 Komunikasi Efektif
		12 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.07.01/MENKES/410/2020
		13 Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.07.01/MENKES/410/2020
		14 SKKNI No. 220 tahun 2020
		Kemampuan Khusus:
		1 Penjaminan Mutu di Bidang Pelayanan Darah
		2 Penyediaan Darah Untuk Transfusi
		3 Pengolahan, dan pengujian Darah
		4 Penyimpanan dan Distribusi Darah
		5 Pemeriksaan Pencocokkan Darah
451	Tenaga Penanggulangan Pencemaran Kapal Kelas I	Kemampuan Umum:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Bahasa Inggris Maritim
		2 Dasar Pengetahuan Teknologi Informatika
		Kemampuan Khusus:
		1 Dasar Pengetahuan tentang Pelayaran Datar
		2 Dasar Pengetahuan tentang Meteorologi
		3 Dasar Pengetahuan tentang Prosedur Darurat dan SAR
		4 Dasar Pengetahuan tentang Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
		5 Dasar Pengetahuan tentang Kepedulian Lingkungan
		6 Undang-undang Pelayaran dan Pelaksanaanya
		7 Kecakapan Bahari
		8 Dasar Kepemimpinan dan Etos Kerja
		9 Dasar Pengetahuan tentang Perbengkelan
		10 Dasar Pengetahuan tentang Gambar dan Kapal Desain Permesinan
		11 Pengenalan Permesinan Kapal
		12 Dasar Pengetahuan tentang Listrik dan Elektronika
		13 Dasar-dasar Akuntansi
		14 Dasar Dasar Manajemen Angkutan Laut
		15 Dasar Peraturan Perundang-undangan Kepelabuhanan dan Undang- undang Terkait
		16 Dasar Bisnis Keagenan Kapal
		17 Dasar Bisnis Sewa Menyewa Kapal
		18 Dasar Ganti Rugi dan Asuransi Angkutan Laut

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
452	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Permenpan No. 70 Tahun 2021 Tentang JF TPKIP
		2 Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3 Permenkes No. 44 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan PKRS
		4 Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang GERMAS
		Kemampuan Khusus:
		1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan
		2 Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		3 Penggalangan Kemitraan
		4 Advokasi Kesehatan
453	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Permenpan No. 70 Tahun 2021 Tentang JF TPKIP
		2 Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
		3 Permenkes No. 44 Tahun 2018 ttg Penyelenggaraan PKRS
		4 Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang GERMAS
		Kemampuan Khusus:
		1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan
		2 Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		3 Penggalangan Kemitraan
		4 Advokasi Kesehatan
454	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Undang Undang N0.12 th 2023 tentang Kesehatan
		2 PP No. 11 Th 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		3 Peraturan Menteri Kesehatan No. 2 Th 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP RI No. 66 Th 2014 tentang Kesehatan Lingkungan
		4 Peraturan Menpan RB no.71 Tahun 2021 tentang Jabatan fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
		5 Kepmenkes RI No.HK.01.07/MENKES/4788/2021 tentang Standar Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan
		Kemampuan Khusus:
		1 Surveilans Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan
		2 Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan
		3 Edukasi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan
		4 Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Rekayasa Lingkungan
		5 Intervensi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Penyakit dan Gangguan Kesehatan
		6 Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini, Tanggap Darurat, dan Rehabilitasi Sanitasi Lingkungan pada Kondisi Matra, Perubahan Iklim, dan Ancaman Global
455	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Peraturan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan
		2 Peraturan tentang standar profesi TSL (Tenaga Sanitasi Lingkungan)
		3 Kode Etik Profesi TSL
		4 Pelayanan kesehatan lingkungan
		5 Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL)
		6 Program PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)
		Kemampuan Khusus:
		1 Surveilans Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan
		2 Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan
		3 Edukasi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Gangguan Kesehatan
		4 Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Rekayasa Lingkungan
		5 Intervensi Kualitas Media Lingkungan dan Unsur yang Dapat Menimbulkan Penyakit dan Gangguan Kesehatan
		6 Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini, Tanggap Darurat, dan Rehabilitasi Sanitasi Lingkungan pada Kondisi Matra, Perubahan Iklim, dan Ancaman Global
456	Terapis Gigi dan Mulut Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 Permenkes No 20 Tahun 2016
		2 Konsep Dasar Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		3 Kode etik Terapis Gigi dan Mulut
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		2 Diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		3 Penyusunan Tujuan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		4 Intervensi Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		5 Penilaian Tata Laksana Asuhan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
457	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Permenkes No 20 Tahun 2016
		2 Konsep Dasar Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		3 Kode etik Terapis Gigi dan Mulut
		Kemampuan Khusus:
		1 Pengkajian Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		2 Diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		3 Penyusunan Tujuan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		4 Intervensi Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		5 Penilaian Tata Laksana Asuhan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
		6 Pengelolaan Tata Laksana Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Masyarakat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI



NO	NAMA JABATAN	MATERI POKOK
458	Terapis Wicara Terampil	Kemampuan Umum:
		1 Regulasi dan perundang-undangan; Standar Profesi Terapis Wicara;
		2 Regulasi dan perundang-undangan; PMK NO.81/2013; uu no.17/2023; KEPUTUSAN KETUA UMUM DPP IKATAN TERAPIS WICARA INDONESIA NOMOR: 02/DPP-IKATWI/SK/V/2015 TENTANG STANDAR KODE ETIK TERAPIS WICARA INDONESIA
		3 Regulasi dan perundang-undangan; PMK NO.24/2013; pmk no.81 tahun 2023; SKKNI; Standar Kompetensi Profesi Terapi Wicara
		4 Regulasi dan perundang-undangan; KEPUTUSAN KETUA UMUM DPP IKATAN TERAPIS WICARA INDONESIA NOMOR: 02/DPP-IKATWI/SK/V/2015 TENTANG STANDAR KODE ETIK TERAPIS WICARA INDONESIA; PMK NO.24/2013; pmk no.81 tahun 2023; SKKNI; Standar Kompetensi Profesi Terapi Wicara
		5 Regulasi dan perundang-undangan; PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KESEHATAN
		6 Regulasi dan perundang-undangan; PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
		7 Regulasi dan perundang-undangan; Permendikbud Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata cara uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan.
		8 Regulasi dan perundang-undangan; PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KLINIK
		9 Regulasi dan perundang-undangan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; 21) Peraturan Menteri Kesehatan RI No 56 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
		10 Regulasi dan perundang-undangan; Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas; Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
		11 Regulasi dan perundang-undangan; KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/3648/2021 TENTANG STANDAR PROFESI TERAPIS WICARA
		Kemampuan Khusus:
		Regulasi dan perundang-undangan; KEMENNAKER NO. 227/2020 tentang SKKNI, Standar Kompetensi Profesi Terapis Wicara, PERMENPAN NO.48 TAHUN 2005 ; PMK NO.24/2013; PMK no.81 tahun 2023; KEPUTUSAN KETUA UMUM DPP IKATAN TERAPIS WICARA INDONESIA NOMOR: 02/DPP- IKATWI/SK/V/2015 TENTANG STANDAR KODE ETIK TERAPIS WICARA INDONESIA dan BUKU PENUNJANG
459	Widyabasa Ahli Pertama	Kemampuan Umum:
		1 UU Nomor 24 Tahun 2009
		2 PP Nomor 57 Tahun 2014
		3 Perpres Nomor 63 Tahun 2019
		Kemampuan Khusus
		1 Pemahaman tentang tes kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI)
		2 Penyuntingan dan penyuluhan bahasa
		3 Pemahaman terhadap Ahli Bahasa
		4 Penguasaan literasi
		5 Produk leksikografi
		6 Pemahaman terhadap kaidah Bahasa Indonesia (EYD, TBBI, PUPU)
		7 Perlindungan bahasa dan sastra
		8 Perencanaan peningkatan kompetensi pengajar BIPA
		9 Perencanaan fasilitasi pembelajaran BIPA
		10 Perancangan bahan fasilitasi pembelajaran BIPA
460	Widyaiswara Ahli Pertama	1 Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN
		2 Pembelajaran Orang Dewasa
		3 Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan
		4 Media Pembelajaran
		5 Metode Pembelajaran
		6 E-learning/Pembelajaran Daring
		7 Teknik Komunikasi dalam Pembelajaran
		8 Praktik Mengajar/Micro Teaching
		9 Penyusunan Kurikulum
		10 Penyusunan Modul Pelatihan
		11 Dasar-dasar Karya Tulis Ilmiah (KTI)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 241104UUNI

